

**NILAI-NILAI & PRAKTIK
MODERASI BERAGAMA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DI SUMATERA UTARA**

NILAI-NILAI & PRAKTIK MODERASI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI SUMATERA UTARA

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

Dr. Darwis Harahap, M.Si.



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sumper Mulia Harahap, dkk.

Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara / Sumper Mulia Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar & Darwis Harahap.

—Ed. 1, Cet. 1. —Medan: Merdeka Kreasi, 2021

viii, 198 hlm., 24 cm.

Bibliografi: hlm. 173

ISBN: 978-623-6198-80-3

Hak Cipta © 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

Dr. Darwis Harahap, M.Si.

Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara

Cetakan ke-1, Desember 2021

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Penerbit Nasional

Anggota IKAPI No. 148/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai
Villa 18, Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977/ 0821-6710-1076

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

Website : merdekakreasi.co.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, petunjuk-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul **“Nilai-Nilai dan Praktik Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Sumatera Utara”**. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, terhadap keluarga, para sahabat, dan para pejuang yang penuh keikhlasan dalam membela kebenaran, keadilan, dan memberantas kebodohan, semoga kita mampu mewarisi dan meneladaninya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang di danai oleh BOPTN IAIN Padangsidempuan Tahun 2021 dengan mengambil setting lokasi di Sumatera Utara terkait nilai-nilai dan praktik moderasi beragama berbasis kearifan lokal, sebagai penawar dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah literatur atau referensi terkait moderasi beragama sehingga dapat meningkatkan keharmonisan hubungan umat antar agama.

Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Padangsidempuan, Kepala LPPM IAIN Padangsidempuan beserta Panitia Penyelenggara Penelitian BOPTN IAIN Padangsidempuan Tahun 2021, dan semua pihak yang telah

membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Terkhusus kepada Penerbit atas kesediaannya menerbitkan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Padangsidempuan, Desember 2021

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI vii

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Gagasan Moderasi Beragama 1
- B. Kajian Terdahulu.....3
- C. Konsep atau Teori Moderasi 6
- D. Metode dan Teknik Penggalian Data..... 10
- E. Rencana Pembahasan..... 11

BAB 2. KAJIAN TEORITIS

- A. Term Moderasi Versus Wasathiyah..... 13
- B. Prinsip Dasar Moderasi..... 15
- C. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama..... 19
- D. Moderasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis 33
- E. Karakteristik Moderasi dalam Islam 36
- F. Ciri-Ciri Pengamalan Moderasi 39
- G. Aktualisasi Konsep Moderasi dalam Islam 46
- H. Sumber Moderasi Beragama di Indonesia 54

BAB 3. POTRET SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUMATERA UTARA

- A. Profil Provinsi Sumatera Utara 81
- B. Keragaman Suku di Sumatera Utara dan Integrasi Sosialnya.. 89
- C. Keragaman Budaya Masyarakat Sumatera Utara 119
- D. Akulturasi Budaya Masyarakat Sumatera Utara 132

BAB 4. DINAMIKA MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI BUDAYA SOSIAL

- A. Moderasi Beragama Di Tapanuli Selatan 143
- B. Akomodasi Agama dan Budaya di Tapanuli Selatan 147
- C. Keseimbangan Sosial Pada Masyarakat “Berbilang Kaum” di Tapanuli Tengah dan Sibolga 153
- D. Hubungan Antar Kelompok Pada Masyarakat Sibolga 156
- E. Moderasi Beragama Sebagai Penawar Konflik Sosial Dalam Masyarakat Multikultural 163

BAB 5. PENUTUP

- A. Kesimpulan 171
- B. Implementasi Hasil Penelitian 172
- C. Saran 172

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gagasan Moderasi Beragama

Indonesia memiliki sejarah kelam dalam hubungan antar agama, padahal negeri ini terkenal sebagai negeri yang santun dan toleran. Setidaknya terjadi kerusuhan Poso di Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok muslim dan Kristen pada Desember 1998 dan April-Juni 2000. Kerusuhan yang terjadi beberapa fase inisebenarnya disebabkan oleh miskomunikasi bukan karena faktor agama (Mappangara, 2000). Namun begitu konflik membesar kedua kelompok agama tersebut saling berhadap-hadapan dalam pertikaian fisik, bahkan saling membunuh. Kejadian lain yang ditengarai sebagai konflik agama terbesar dalam sejarah sosial-politik di Indonesia terjadi di Ambon pada tahun 1999. Konflik ini telah berlalu namun terkadang masih muncul letupan-letupan kecil hingga tahun 2011 (Lindawaty, 2011)

Meskipun penyebab utama konflik bukan karena faktor keyakinan agama, namun Ketika kemudian menjadi kerusuhan yang melibatkan kelompok agama yang berbeda, kejadian tersebut terjadi karena cara beragama yang ekstrem. Tiadak ada agama yang mengajarkan kekerasan, namun seringkali cara beragama yang memandang penganut agama lain secara tidak bersahabat menimbulkan banyak kerawanan. Pada masyarakat yang multibudaya seperti Indonesia,

artikulasi keberagaman yang cenderung eksklusif, yang mengklaim kebenaran dan keselamatan hidup secara sepihak, ternyata acapkali mengakibatkan gesekan antar penganut agama.

Agar agama yang sebenarnya bertujuan memberi kemaslahatan seluas-luasnya termasuk menciptakan harmoni kehidupan dalam pluralitas agama, tidak justru menimbulkan gesekan maka perlu dikembangkan cara-cara menjalankan agama yang moderat. Moderasi beragama sebenarnya terdapat dalam agama itu sendiri. Islam misalnya meniscayakan penganutnya untuk menjadi kelompok moderat dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana Firman Allah berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Artinya: "Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu semua, umat yang 'wasatha' agar kamu menjadi saksi atas sekalian manusia." (Surah Al-Baqarah, 2: 143).

Prinsip-prinsip universal seperti nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat pada ajaran semua agama turut mengokohkan moderasi demi kedamaian. Disamping itu moderasi beragama dapat dicapai dengan cara mengubah cara beragama bukan mengubah agama karena agama bersifat final dan tidak bisa dirubah.

Moderasi beragama dapat juga dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal yang terdapat dalam adat di berbagai daerah di Indonesia. Sistem kekerabatan adat Dalihan na tolu di Tapanuli misalnya yang bertumpu kepada sikap saling kerjasama dan saling menghormati (Armawy, 2008) sebagai modal utama moderasi akan sangat berkontribusi terhadap harmoni kehidupan bersama antar penganut agama yang berbeda di wilayah ini. Di daerah Ambon *pela gandong* merupakan perekat yang melintasi batas-batas agama. Masyarakat Ambon pasca konflik bahkan lebih mempercayai perangkat adat ini lebih dapat diandalkan sebagai alat perekat masyarakat dibanding jargon-jargon agama.

Di daerah Poso yang juga sempat terjadi kerusuhan antar agama, jugamemiliki tradisi luhur yang disebut *padungku*. Ini merupakan aktualisasi dari rasa syukur kepada sang Pencipta atas hasil yang dicapai

setelah bekerja keras. Padungku ini juga dihelat dalam upacara besar yang meriah dan melibatkan semua unsur masyarakat tanpa mengenal sekat agama (Budianto, 2018). Di wilayah Jawa moderasi beragama juga dilakukan berbasis adat dan tradisi setempat. Pada upacara-upacara siklus kehidupan dan kematian seperti *kenduren*, *merti dusun* dan *nyadran* merupakan kegiatan penting yang melibatkan warga lintas agama (Hasanah, 2016). Penelitian ini akan mengungkap nilai-nilai moderasi beragama pada adat di berbagai wilayah Nusantara secara utuh dan praktiknya secara empiris.

B. Kajian Terdahulu

Moderasi beragama sudah banyak dikaji dan diteliti dengan berbagai perspektif dan focus pembahasan. Misalnya penelitian bertajuk Pengembangan Moderasi beragama di Lembaga Pendidikan Keagamaan. Penelitian ini dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2019 di 16 Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Enam belas Lembaga tersebut meliputi berbagai perguruan tinggi keagamaan, beberapa pondok pesantren, ditambah beberapa sekolah formal berbasis agama. Riset tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Diantaranya bahwa konsep moderasi beragama ternyata belum begitu akrab dikenal oleh para peserta didik. Sebenarnya konsep tersebut dapat dijumpai pada substansi semua ajaran agama dengan bentuk dan istilah yang beraneka ragam dengan mengacu kepada Bahasa agama yang bersangkutan. Lebih detail, ditemukan bahwa terdapat dua bentuk praktik moderasi beragama yang dilakukan oleh 16 lembaga tersebut, yaitu Pertama, moderasi beragama yang bersifat pasif. Bentuk ini dimaksudkan sebagai suatu praktik yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dengan cara mengajarkan sikap beragama yang moderat dalam rangka memenuhi kewajiban pribadi penganut beragama sebagai manusia yang beretika dan berpandangan hidup humanis. Artinya tidak dilakukan upaya yang lebih praktik dengan menyemai sikap moderasi beragama untuk turut berkontribusi bagi terciptanya masyarakat plural yang damai.

Kedua, moderasi beragama yang bersifat aktif, ialah Lembaga Pendidikan formal berbasis keagamaan mengajarkan moderasi beragama secara terstruktur, sebagiannya sengaja memasukkan dalam kurikulum. Melalui cara ini, maka peserta didik tentu diharapkan memahami secara tuntas konsep dan praktik moderasi beragama. Lebih lanjut peserta didik diharapkan bertanggung jawab dan bersikap proaktif dalam membangun relasi sosial yang lebih erat dan produktif. Tujuan keagamaan untuk hidup sebagai penganut agama yang baik dan tujuan kebangsaan secara luas dengan demikian dapat dicapai secara bersamaan. Kegiatan dan program bahkan dirancang sedemikian rupa dengan kesadaran moderasi beragama. Cara yang bersifat aktif ini sudah barang tentu akan memudahkan penyebaran moderasi beragama, sekalipun belum secara maksimal dapat memberi pengaruh kepada masyarakat luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa secara umum moderasi beragama belum menjadi kesadaran kolektif. Narasi moderasi beragama masih sangat terbatas dalam berbagai literatur keagamaan. Disamping terjadinya perbedaan penafsiran tentang moderasi beragama itu sendiri.

Penelitian ini kemudian merekomendasikan agar moderasi beragama dirumuskan dengan akurat berdasarkan indikator yang jelas dalam pandangan agama-agama yang ada, sehingga para tokoh agama dapat memiliki cara pandang yang sama secara konseptual dan praksis. Moderasi beragama itu kemudian harus diinternalisasi kepada peserta didik sejak dini untuk membentuk sikap beragama yang moderat. Selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi moderasi beragama secara massif dan simultan kepada semua masyarakat beragama (Balitbang dan Diklat, 2019).

Untuk penelitian langsung secara empiris dalam kehidupan keagamaan masyarakat Elma Haryani melakukan penelitian berjudul *Pendidikan Moderasi Beragama untuk Generasi Milenia: Kasus "Lone Wolf" pada Anak di Medan*. Sebagaimana disebutkan oleh peneliti, riset tersebut bertujuan mencari masukan pengembangan Pendidikan moderasi beragama berbasis keluarga. Penelitian tersebut bersifat keahliatan dengan pendekatan studi kasus penyerangan seorang anak muda terhadap seorang pastur yang sedang menyampaikan khutbah di gereja Santo Joseph di Medan.

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Medan dan Sumatera Utara secara umum merupakan ikon toleransi beragama di Indonesia. Medan merupakan kota termajemuk dan sangat rawan terhadap munculnya konflik antar kelompok termasuk antar kelompok beragama. Akan tetapi kerukunan dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, baik unsur masyarakat maupun pemerintah daerah. Kehadiran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Lintas Pemuda, Forum Lembaga Adat Budaya adalah diantara unsur yang berperan aktif menciptakan kerukunan di wilayah ini. Lembaga ini banyak melakukan kegiatan berwawasan moderasi beragama seperti seminar dan pertemuan lintas agama dan budaya. Pemerintah turut berperan melalui dukungan anggaran dan berperan aktif melakukan pembinaan. Di tengah suasana damai tersebut masyarakat dikejutkan oleh Tindakan intoleran seorang pemuda yang tiba-tiba menyerang pastor yang sedang berkhotbah di Gereja Santo Joseph Medan.

Berdasarkan penyidikan dan penyelidikan ternyata anak tersebut bertindak seorang diri, tidak terkait dengan suatu jaringan yang tergolong kepada kelompok teroris atau fundamentalis. Disimpulkan bahwa anak tersebut hanya dipengaruhi oleh bacaan sendiri yang dia dapat melalui jaringan teknologi dan informasi. Dia memperoleh paham intoleran tanpa dipengaruhi oleh orang tertentu (tanpa guru). Aparat kepolisian melihat Tindakan ini sebagai bentuk *lone wolf*. Tindakan lone wolf ini biasanya terjadi dalam bentuk:

1. Beroperasi seorang diri, tanpa bantuan kelompok
2. Tidak berafiliasi kepada organisasi teroris manapun
3. Pola kejadiannya dilakukan secara spontan tanpa komando dari pihak tertentu.

Pelaku berasal dari keluarga yang tidak berpotensi melakukan Tindakan intoleran. Ayah anak tersebut berprofesi sebagai pengacara senior di Kota Medan, sedangkan ibunya adalah seorang pegawai negeri sipil. Fenomena lone wolf ini tidak boleh dianggap sepi agar kemudian Tindakan serupa tidak terulang Kembali. Dibutuhkan keseriusan semua pihak untuk berperan aktif melakukan pencegahan dan pembinaan serta kampanye yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari kejadian serupa.

Melihat latar belakang pelaku, korban yang merupakan seorang pastur kemudian memberi saran agar keluarga hendaknya menjadi semacam “gereja kedua” yang memberi penerangan kepada jiwa anak. Peneliti sendiri menyarankan agar Pendidikan moderasi beragama harus dimulai dari keluarga agar sejak dini, bahkan sebelum usia sekolah, seorang anak sudah memiliki sikap toleran dan berwawasan moderasi beragama.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu di seputar tema moderasi beragama. Penelitian ini menjadi khas karena akan menggali nilai-nilai adat pada masyarakat yang di masa lalu mengalami kekerasan karena perbedaan agama, juga pada wilayah yang Rentan terhadap konflik agama namun masih dapat menjaga kerukunan karena adat menjadi alat perekat yang efektif. Penelitian ini ingin menggali dan menyajikan secara lengkap nilai-nilai moderasi beragama dan praktik yang sebenarnya telah berlangsung dengan sangat baik. Penelitian ini menemukan urgensinya agar masyarakat kemudian memiliki kesadaran moderasi beragama dari nilai-nilai yang mereka miliki sendiri (Haryani, 2020).

C. Konsep atau Teori Moderasi

1. Moderasi beragama

Sikap moderat sesungguhnya dapat ditemukan pada semua agama. Dalam Islam misalnya moderasi langsung disebutkan dalam ayat Alquran. Islam sebagai agama maupun sebagai peradaban diorientasikan pada pandangan yang bersifat futuristik dan moderat. (Madjid, 1993). Sejarah mencatat bahwa deklarasi Piagam Madinah oleh Nabi dengan kaum Yahudi dan Nashrani merupakan peristiwa monumental yang ideal menjadi panduan hidup bersama. Diantara isi terpenting Piagam Madinah yang dapat menjadi referensi hidup bersama adalah prinsip keadilan, persamaan warga di kota Madinah yang merupakan kawasan yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, prinsip kebebasan baik dalam menjalankan ibadah maupun kebebasan memeluk agama, dan prinsip musyawarah.

Kesepakatan seperti Piagam Madinah sangat relevan untuk masyarakat Indonesia yang multibudaya. Prinsip-prinsip sebagaimana pada piagam Madinah tersebut pada intinya membangun tatanan

kehidupan yang inklusif, sekaligus menghindari eksklusivisme. Eksklusivisme kelompok tertentu dengan klaim kebenaran dan keselamatan hidup sepihak dapat menimbulkan terjadinya gesekan antar umat beragama. Permusuhan antar umat beragama yang sampai menimbulkan bentrokan secara fisik seringkali dipicu adanya sikap keberagamaan yang tertutup dan bersifat sangat eksklusif. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pergesekan dengan intensitas yang tinggi terjadi antara kelompok kiri (komunisme) dan kelompok kanan (islamsme). Akan tetapi saat ini kerawanan terjadinya konflik lebih disebabkan oleh dua fundamentalisme, yaitu fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar (Latif, 2016).

Terkait dengan fundamentalisme agama, agar disharmoni tidak menerpa masyarakat beragama maka mutlak dibutuhkan cara beragama yang sejak dari alam pikiran bersifat moderat, berada di tengah-tengah dengan sikap saling memahami. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mencoba mendalami, atau menjalani ajaran agama lain. Moderasi justru menghendaki agar setiap penganut agama tetap berdiri tegak lurus pada keyakinan dan pelaksanaan agamanya masing-masing, namun ketika ada persoalan yang membutuhkan penyelesaian maka setiap orang mampu melakukan kompromi dan menyikapi sebuah perbedaan secara bijaksana, tidak memaksakan kehendak dan tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. (Darlis, 2017), tetapi menyelesaikan masalah dengan kepala dingin yang melegakan semua pihak.

Ancaman moderasi beragama dapat terjadi karena kesalahan dalam memahami teks-teks keagamaan. Umat terpolarisasi kepada dua kutub ekstrem dalam memahami teks dimaksud. Di satu sisi terdapat sekumpulan penganut agama yang terlalu bersemangat memahami ajaran agamanyamurni secara tekstual. Teks kitab suci dibaca dan dipahami untuk seterusnya diamalkan,, sehingga dapat membahayakan kedamaian hidup bersama ketika misalnya mereka membaca teks yang mengharuskan bersikap keras terhadap kelompok agama lain tanpa memperhatikan konteksnya. Biasanya kelompok dengan corak pemahaman seperti ini disebut sebagai kaum konservatif.. Pada sisi lain ada kelpok ekstrem lain pula yang terlalu berpikir kontekstual,

sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Mereka kemudian diberi label sebagai kelompok liberal. Sikap terbaik tentu saja adalah moderat yang dalam pemikiran Islam berarti mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, mampu menerima keberagaman (inklusivisme). Keberagaman dimaksud dapat bersifat internal dalam satu agama, tetapi berbeda mazhab, dapat juga bersifat eksternal, yaitu berbeda dalam agama yang dianut. Perbedaan tersebut tidak perlu sampai menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan (Darlis, 2017). Berpegang teguh dan mempercayai agama Islam sebagai yang paling benar, tidak berarti harus menghina agama selain Islam. Moderasi beraagama adalah sebuah cara pandang yang berhubungan dengan proses memahami dan mengamalkan ajaran agama sehingga dalam melaksanakannya selalu dalam koridor yang bersifat moderat. Moderat berarti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem, baik ekstrem kiri atau kanan. Jadi yang dimoderasi adalah cara beragama, bukan agamanya. Agama sendiri merupakan sesuatu yang bersifat final dan sempurna karena datangnya dari yang Maha Sempurna. Moderasi beragama di Indonesia saat ini menemukan urgensinya mengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen yang terdiri dari bermacam suku dan agama.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dimaknai sebagai usaha manusia dengan menggunakan potensi akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. (Ridwan, 2007). Kearifan lokal ini sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007). Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa kearifan lokal diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui proses internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. (Harmoni, 2010). Kearifan lokal juga dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif dan dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Wagiran, 2012). Secara kongkrit kearifan

lokal merupakan aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat dalam bertindak yang mencakup seluruh aspek hidup, yaitu:

- a. Tata aturan yang berkaitan dengan interaksi antar sesama manusia, seperti tata cara upacara perkawinan, etika dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Tata aturan tentang interaksi manusia dengan lingkungan, hewan, tumbuh-tumbuhan.
- c. Tata aturan yang dengan interaksi manusia dengan yang hal-hal yang bersifat gaib, misalnya menyembah Tuhan dan kepercayaan terhadap roh-roh gaib. Kearifan lokal tersebut kemudian melembaga menjadi adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah (Rahmat, 2012).

Kearifan lokal merupakan pemikiran atau ide yang bersifat lokal, terbatas pada suatu tempat tertentu yang mengandung nilai-nilai bijaksana, kreatif, kebaikan, yang diwariskan secara turun temurun. Masyarakat begitu setia terhadap nilai-nilai tersebut yang diyakini sebagai kebenaran sehingga ditaati secara konsisten oleh semua anggota masyarakat, inilah yang diistilahkan sebagai nilai-nilai luhur (adhiluhung) masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik dalam rangka menciptakan harmoni (Kriyantoro, 2014). Selanjutnya kearifan lokal akan bermakna jika senantiasa diperlakukan sebagai panduan dalam mencari solusi persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ketangguhan nilai-nilai tersebut sebagai kearifan lokal akan diuji dalam kancah kehidupan sosial yang selalu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks ketangguhan ini kearifan lokal dipandang sebagai kemampuan untuk mempertahankan tradisi dari pengaruh budaya lain. Untuk konteks Indonesia ada 3 peran kearifan lokal, yaitu:

- a. Pedoman moral dan spiritual bagi masyarakat.
- b. Inspirasi ilmu yang menunjang kehidupan.
- c. Penjamin harmoni kehidupan, baik antar sesama manusia, maupun manusia dengan alam. (Pesurnay, 2018).

D. Metode dan Teknik Penggalian Data

Lokasi penelitian adalah di berbagai daerah adat di Indonesia. Dalam hal ini yang dipilih adalah di daerah Ambon dan Poso sebagai daerah yang pernah mengalami konflik antar agama dan saat ini terus mengalami integrasi yang semakin kuat karena faktor kearifan lokal. Kemudian Tapanuli sebagai wilayah yang rawan konflik tetapi kearifan lokal dan adat sebagai perakat mampu menciptakan harmoni. Selanjutnya Jawa sebagai etnis terbesar yang memiliki dinamika tersendiri dengan corak kearifan lokal dan adat yang sangat kental. Penelitian akan berlangsung dari April sampai dengan September 2021.

Riset ini bersifat penelitian lapangan dengan menggali data dari para informan dan pengamatan langsung sepanjang dapat dilakukan terkait dengan berbagai praktik adat yang bernuansa moderasi beragama di berbagai daerah yang merupakan lokasi penelitian, juga dari berbagai literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi langsung terhadap even-even lokal yang diperkenankan untuk diikuti secara langsung. Observasi ini tentu akan menjadi Teknik yang paling handal dalam penelitian lapangan. Peneliti akan memperoleh pengalaman langsung yang bersifat personal yang acapkali tidak diperoleh melalui Teknik wawancara. (Sugiyono, 2008). Melalui observasi partisipatif peneliti akan memperoleh gambaran yang utuh tentang objek dan subjek penelitian, dan dapat menangkap makna terdalam dari peristiwa yang diikuti.

Teknik observasi kemudian dipadukan dengan wawancara karena tidak setiap data yang dibutuhkan dapat dijangkau melalui observasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan terlebih dahulu menyiapkan panduan wawancara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk penggalian data. Pelaksanakannya tentu dilakukan secara fleksibel agar wawancara berlangsung mengalir sehingga informan dapat menyampaikan jawaban secara spontan agar data yang didapatkan lengkap dan valid. Berdasarkan jawaban informan pertanyaan akan berkembang tetapi tetap dalam kerangka melengkapi kebutuhan data, tidak keluar dari tema dan focus penelitian..

Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang ditanyakan pada informan. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang masalah penelitian, maka peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih terarah pada tujuan penelitian.

Wawancara terutama akan digunakan untuk menggali seara mendalam nilai-nilai kearifan lokal bernuansa moderasi beragama yang terdapat pada setiap lokasi penelitian. Sehubungan dengan Teknik wawancara ini penetapan informan dilakukan dengan Teknik *purposive sampling*. Informan dalam wawancara ini adalah para tokoh masyarakat baik tokoh adat maupun tokoh agama di daerah yang terpilih sebagai lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilengkapi dengan Teknik dokumentasi Teknik ini terutama untuk mendapatkan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Metode ini juga tentu sangat handal untuk mendapatkan data-data tertulis dari berbagai literatur yang relevan. Teknik dokumentasi ini penting karena data tertulis bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan, dan jika terjadi kekeliruan dalam pengutipan dapat diperbaiki Kembali sesuai data aslinya (Soeharsimi, 2006). Dokumentasi ini juga lebih menjamin didapatkannya data yang lebih otentik tentang adat sepanjang memang dituliskan dibanding melalui wawancara, karena wawancara dengan tokoh adat kemungkinan akan menghasilkan data tentang adat yang mereka pahami saat ini yang sudah mengalami perubahan.

E. Rencana Pembahasan

Pembahasan disusun dengan mengikuti sistematika berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Bagian ini menunjukkan bagaimana masalah penelitian muncul dan penting untuk diteliti. Kemudian diikuti oleh rumusan masalah yang berfungsi untuk menjadi pedoman kerja, sehingga kerja-kerja penelitian terfokus untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan penelitian dibuat untuk memastikan penelitian ini

berjalan terarah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menyusul kemudian penelitian terdahulu untuk melihat kedudukan penelitian ini diantara penelitian yang sudah dilakukan dengan tema sejenis, ini juga berguna untuk memberi bukti bahwa penelitian yang sama persis belum pernah dilakukan. Selanjutnya disajikan teori atau konsep yang relevan untuk menjadi pisau analisis bagi data yang telah dikumpulkan. Seterusnya diikuti oleh metode dan Teknik penggalan data untuk meyakinkan bahwa data dapat terkumpul dengan metode yang tepat. Bagian ini akan diakhiri dengan rencana pembahasan serta Pustaka acuan.

Pada bab kedua akan diulas kondisi sosiodemografi dan adat istiadat lokasi penelitian di berbagai daerah nusantara, yaitu Ambon, Poso, Yogyakarta, dan Tapanuli. Setelah pendahuluan, bab ini berguna untuk memahami terlebih dahulu lokasi yang terpilih untuk diteliti. Bab ini terdiri dari sejarah dan keadaan geografis, selanjutnya kondisi sosiodemografi masyarakat dan tradisi yang dijalankan pada masyarakat tersebut.

Pada bab ketiga akan disajikan teori secara lebih lengkap. Setelah menjadi hasil penelitian, bagian teori pada pendahuluan akan dipindahkan ke bagian ini dan diuraikan secara lebih terperinci. Bab ini akan mengulas dengan lengkap teori moderasi beragama, mulai dari pengertian dan konsep moderasi beragama pada berbagai agama terkait. Setelah itu disajikan pula teori kearifan lokal dengan sub bab pembahasan yang terdiri dari pengertian kearifan lokal, peran dan fungsi kearifan lokal nusantara.

Temuan penelitian akan tersaji pada bab IV. Pada bagian ini hasil penelitian akan dideskripsikan sekaligus dianalisis, yang terdiri dari nilai dan praktik moderasi beragama berbasis kearifan lokal di Ambon, Poso, Yogyakarta, dan Tapanuli. Akhir dari pembahasan akan disampaikan pada Bab V yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB 2

KAJIAN TEORITIS

A. Term Moderasi Versus *Wasathiyah*

Secara bahasa *wasathiyah* (moderasi) berasal dari akar kata – وسط و سطة – *وسط* memiliki beragam makna antara lain di tengah-tengah, berada di antara dua ujung, adil, yang tengah-tengah atau yang sederhana atau biasa-biasa saja.¹ Kata *wasath* juga berarti menjaga dari bersikap *ifrath* dan *tafrith*². Dalam kitab *Mu'jam al-Wasith* kata *wasathan* bermakna “*adulan*” dan “*khiyaran*”, yaitu sederhana dan terpilih.³ Makna yang sama juga dikeluarkan oleh Ibnu ‘Asyur bahwa kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua ujung dengan ukuran masing-masing sebanding. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang menyebut kata *wasath* dan derivasinya, antara lain dalam surah al-Baqarah ayat 143 dan 238, surah Al-Qalam ayat 48, dan surah Al-Isra’ ayat 78.

1 Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Wasithiyah al-Islamiyah wa Al-Tajdid* (Mesir: Markaz al-Tiba’ah Li al-Qardhawi, 2009), hlm. 19.

2 Al-Raghib al-Asfahany, *Mufradat al-Fadz al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Qalam, 2009), hlm. 869.

3 Dzul Faqqar Ali, *Mu'jam al-Wasith* (Kairo: ZIB, 1973), hlm. 1031.

Dalam Ensiklopedia al-Qur'an kata *wasatha* berarti posisi menengah di antara dua posisi yang berlawanan, seperti kata "berani" berada pada posisi ceroboh dan takut, kata "dermawan" antara boros dan kikir. Pada dasarnya penggunaan kata *wasath* dalam ayat-ayat tersebut mengarah kepada makna tengah, 'adil, dan pilihan.⁴

Adapun makna wasathiyah secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Kalimat "*ummatan wasatha*" dalam surah al-Baqarah ayat 143 bermakna umat yang adil dan terpilih/pilihan, artinya umat Islam adalah umat yang sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya, ummat yang sempurna dan adil yang menjadi saksi bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti.⁵ Ummat anwasathan adalah umat pilihan yang adil, terbaik, dan memiliki visi *hanif* (meluruskan).⁶ Karenanya umat Islam yang memiliki sifat wasathiyah tidak suka hal-hal ekstrim baik kanan maupun kiri, tidak hanya menghiraukan materialisme dan meninggalkan spiritualisme, tidak mengabaikan kehidupan rohani dan meninggalkan jasmani. Tidak hanya mementingkan kepentingan individu dan melupakan kepentingan sosial, itulah sejatinya Islam wasathiyah.⁷

Istilah wasathiyah juga memiliki pemahaman lain yang sangat banyak, karena memang al-Qur'an menyebut kata tersebut atau yang seakar dengannya berkali-kali. Antara lain bermakna *adl* (keadilan), keadilan menjadi salah satu sifat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, khususnya apabila dikaitkan dengan persaksian satu hukum atau perkara, tanpa kehadiran saksi yang adil, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, keadilan seorang saksi dan keadilan hukum menjadi harapan besar masyarakat. Pemaknaan istilah wasathiyah dengan adil sebagaimana Rasulullah SAW menafsirkan surat al-Baqarah ayat 143 dengan makna adil.⁸

4 M. Quraish Shihab, (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: PSQ & Yayasan Paguyuban, 2007), hlm. 1071.

5 Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa Al-Tanwir* Jilid II (Tunis: al-Dar Tunisiyah, 1984), hlm. 18.

6 Jabir al-Jazairy, *Aysir al-Tafasir li al-Kalam al-'Aly al-Kabir*, Jilid 1 (Jeddah: Rasm Advertising, 1990), hlm. 125.

7 Maimun Muhammad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2019), hlm. 1-162

8 Lihat Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Buhory dari sanad said al-Khudri.

Adil adalah berada pada posisi antara pihak-pihak yang bertikai dengan menjauhi condong kepada salah satu pihak. Memberikan hak-hak kedua belah pihak secara seimbang, tidak berat sebelah dan tidak meminati salah satu pihak.

Wasatiyah juga bermakna *istiqamah* (lurus), adalah artian lurus dalam manhaj berfikir dan bertindak (*shirath al-mustaqim*), jalan yang benar yang terletak di tengah jalan yang lurus dan jauh dari maksud yang tidak benar. Karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa meminta agar supaya senantiasa berada pada jalan yang lurus. Jalan yang terhindar dari jalurnya orang-orang yang dimurkahi Allah SWT yaitu orang-orang Yahudi dan bukan pula jalur orang-orang yang berbuat sesat atau Nasrani.

Kata washiyah juga bermakna kebaikan atau yang terbaik, Islam washiyah adalah Islam yang terbaik. Kalimat seperti ini sering digunakan orang Arab untuk memuji seseorang sebagai yang memiliki nasab terbaik di sukunya. Untuk menyebutkan bahwa seseorang tersebut tidak berlebihan dalam keberagamaan, atau tidak mengurangi ajaran agama.⁹ Kata Wasath adakalanya menjadi sifat bagi umat manusia secara *ummah* (kolektif) dan menjadi sifat bagi individu. *Washiyatulummah* adalah predikat terbaik, adil dan kedamaian yang dimiliki umat Islam. Sedangkan washiyatul fardi adalah seseorang yang berdiri pada posisi di tengah dalam segala urusan dengan mengambil yang paling utama, paling baik dan dan seimbang.

B. Prinsip Dasar Moderasi

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.¹⁰

9 Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Washiyah Fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Maktabahal-Tabi'in, 2001), hlm. 18.

10 Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), hlm. 15-63.

Maka inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “adil” diartikan:

1. Tidak berat sebelah/ tidak memihak
2. Berpihak kepada kebenaran
3. Sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.

Kata *wasit* yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Sedangkan prinsip keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Mohammad Hashim Kamali,¹¹ menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan atau *balance* dan *justice* (adil) dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Mohammad Hashim Kamali, *wasathiyah* (moderasi) merupakan aspek penting dalam Islam yang seringkali terlupakan ummat Islam, padahal *wasathiyah* itu adalah merupakan esensi ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, akan tetapi diajarkan juga oleh agama-agama yang lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.

¹¹ Mohammad Hasyim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 7.

Kedua nilai ini yaitu adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk apabila seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya yaitu:

1. *Wisdom* (kebijaksanaan)
1. *Purity* (ketulusan)
1. *Courage* (keberanian)

Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: 1) memiliki pengetahuan yang luas; 2) mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas; 3) dan selalu berhati-hati. Apabila disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus; berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Apabila dielaborasi lebih lanjut, maka dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap *enteng* (memudahkan-mudahkan) sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Sebagai contoh, beberapa waktu lalu pernah marak penolakan imunisasi vaksin Measles Rubella (MR) dari kelompok beragama karena adanya kegamangan terkait hukumnya, padahal vaksin tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran penyakit campak dan rubela. Selain itu diperkuat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) Produk dari Serum Intitute Of India (SII) Untuk Imunisasi yang menyatakan kebolehan atau mubah dan didasarkan atas kondisi darurat syar'iyah, keterangan ahli yang kompeten, dan belum ditemukan adanya vaksin Measles Rubella yang halal dan suci hingga saat ini. Untuk dapat memoderasi kepentingan kesehatan dengan pertimbangan keagamaan ini tentu membutuhkan pengetahuan komprehensif yang berasal dari beragam pendapat tokoh agama.

Melalui bekal pengetahuan keagamaan yang memenuhi kriteria di atas, maka seorang pemeluk agama akan dengan mudah memiliki sifat terbuka khususnya dalam menyikapi keragaman dan perbedaan. Dan, inilah sesungguhnya salah satu hakikat dari moderasi beragama. Bagi masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia, cara pandang moderasi beragama menjadi sangat penting agar masing-masing dapat mendialogkan keragaman, baik ragam agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, hingga ragam tradisi dan adat istiadat lokal.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak *eksklusif* (tertutup), melainkan *inklusif* (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI

sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara dan bangsa.

Sarjana Muslim, Ismail Raji al-Faruqi mengelaborasi makna *tawazun* (berimbang) atau “*the golden mean*” sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrem yang tidak menguntungkan, seraya berusaha mencari titik temu menggabungkannya. Sikap berimbang berarti menghindarkan diri dari mementingkan diri sendiri secara absolut di satu sisi, dan mementingkan orang lain secara absolut di sisi lain, mengejar kebahagiaan pribadi di satu sisi, dan menjaga kebahagiaan bersama di sisi lain. Demikian seterusnya, selalu mengambil jalan tengah yang berimbang.¹²

Dalam era disrupsi teknologi dan informasi seperti sekarang ini, saat di mana setiap individu mengalami banjir informasi, prinsip adil dan berimbang dalam moderasi beragama sejatinya juga dapat dijadikan sebagai *value* (nilai) yang bermanfaat untuk mengelola informasi serta meminimalisir berita *hoax* (bohong), moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau kelompok saja, tanpa mempertimbangkan pandangan keagamaan orang atau kelompok lainnya.

C. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama

Semua agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama.

¹² Mohammad Hasyim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*. (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 31.

Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini, bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman bangsa Indonesia. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Apabila ini dapat diwujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya. Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/ zalim, atau mengajarkan sikap berlebihan.

Ajaran wasathiyah, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: pertama bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik. Contoh yang mudah dicerna dalam kehidupan sehari-hari adalah kata "*wasit*". Ia merupakan profesi seseorang yang menengahi sebuah permainan, yang dituntut untuk selalu berbuat adil dan memutuskan yang terbaik bagi para pihak.

Contoh lain, kedermawanan itu baik, karena ia berada di tengah-tengah di antara keborosan dan kekikiran. Keberanian juga baik karena ia berada di tengah-tengah di antara rasa takut dan sikap nekad. Demikian seterusnya.

Dari sejumlah tafsiran, istilah “*wasatha*” berarti yang dipilih, yang terbaik, bersikap adil, rendah hati, moderat, istiqamah, mengikuti ajaran, tidak ekstrem, baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi atau akhirat, juga tidak ekstrem dalam urusan spiritual atau jasmani, melainkan tetap seimbang di antara keduanya. Secara lebih terperinci, *wasathiyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua kutub ekstrem. Oleh karena itu, ketika konsep *wasathiyah* dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak akan memiliki sikap ekstrem.

Dalam berbagai kajian, ‘*wasathiyat Islam*’, sering diterjemahkan sebagai ‘*justly-balanced Islam*’, ‘*the middle path*’ atau ‘*the middle way*’ Islam, di mana Islam berfungsi memediasi dan sebagai penyeimbang. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah untuk tidak terjebak pada ekstremitas dalam beragama. Selama ini konsep *wasathiyat* juga dipahami dengan merefleksikan prinsip *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), dan *i`tidal* (adil). Dengan demikian, istilah ummatan *wasathan* sering juga disebut sebagai ‘*a just people*’ atau ‘*a just community*’ yaitu masyarakat atau komunitas yang adil.

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Apabila dikatakan, “ia adalah orang yang *wasath*”, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai ummatan *wasathan* itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat, Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam dua sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an yang salah satu ayat NYA yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Qs. al-Baqarah/ 2: 143).

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa atribut wasathiyah yang dilekatkan kepada komunitas Muslim harus ditempatkan dalam konteks hubungan kemasyarakatan dengan komunitas lain. Seseorang, atau sebuah komunitas Muslim baru dapat disebut sebagai *syahidan* (saksi) manakala ia memiliki komitmen terhadap moderasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Karenanya, apabila kata wasath dipahami dalam konteks moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, guna menjadi teladan bagi umat lain, dan pada saat yang sama mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan yang diteladani sebagai saksi pembenaran dari seluruh aktivitasnya.

Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi sesungguhnya juga menandai sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin seseorang moderat dan berimbang, semakin terbuka peluang ia berbuat adil. Sebaliknya, semakin ia tidak moderat dan ekstrem berat sebelah, semakin besar kemungkinan ia berbuat tidak adil. Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Rasulullah SAW sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.

Di Indonesia, diskursus wasathiyah atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni:

1. Moderasi pemikiran
2. Moderasi gerakan
3. Moderasi perbuatan.

Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks. Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan. Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan Kristen juga mengalami penyesuaian dengan atmosfer kebangsaan Keindonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia. Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing.

Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Dalam tradisi Kristen, moderasi beragama menjadi cara pandang untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Salah satu kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama. Dalam Alkitab sebagaimana menjadi keyakinan bagi umat Kristiani telah banyak diceritakan betapa Yesus adalah sang juru damai. Bahkan dalam Alkitab bisa dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang untuk membuat kerusakan, kekerasan apalagi peperangan. Dalam Alkitab tidak sedikit ayat yang mengajarkan cita-cita untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini. Kata kunci yang digunakan dalam Alkitab ketika berbicara tentang konteks kedamaian di antaranya menggunakan kata kebebasan, hak, hukum, kedamaian, memaafkan/ mengampuni, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif Gereja Katolik. Gereja menyebut diri “persekutuan iman, harapan dan cinta kasih”. Ketiga keutamaan ini, yang pada dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. Iman yang menggerakkan hidup, memberi dasar kepada harapan dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tetapi tidak seluruhnya sama. Gereja universal telah merancang perspektif baru dalam membangun relasi dengan agama-agama lain melalui momentum Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II menjadi salah satu momen penting kebangkitan semangat beragama inklusif dalam membangun persaudaraan universal dalam abad modern. Dekrit penting dalam Konsili Vatikan II yang menandai sikap Gereja terhadap

agama-agama lain di dunia adalah *Nostrae Aetate*. Dekrit ini secara khusus berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Gereja dalam dekrit *Nostra Aetate* menandatangani bahwa

“Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci”

Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang. Melalui dekrit *Nostra Aetate* (NA) Gereja telah menggagas babak baru sejarah pengakuan realitas pluralisme religius dan ingin membuka diri terhadap kebenaran yang terdapat dalam agama-agama non Kristen. Dalam konteks Gereja Indonesia, hal yang paling mendesak adalah bagaimana membangun jembatan yang kokoh untuk menghubungkan “perbedaan” antar agama menuju persaudaraan nasional yang kokoh. Salah satu gagasan paling relevan adalah melalui dialog antarumat beragama. Melalui dialog ini kiranya dapat bermanfaat bagi pemulihan dan perwujudan hubungan antar agama yang kerap kali dilanda oleh berbagai konflik.

Peta agama-agama di Indonesia menunjukkan adanya perjumpaan antara aneka bentuk keagamaan. Semua hidup bersama dalam harmoni toleransi dan dialog dan semua dalam bentuk bagaimana pun mengalami pengaruh satu dari yang lain. Agama-agama di Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan (kadang-kadang dalam konfrontasi) satu dengan yang lain. Pengaruh itu biasanya tidak langsung, melainkan berjalan melalui bahasa dan kebudayaan yang sama. Dengan demikian, banyak istilah dan rumusan dari agama yang satu juga dipakai dalam agama yang lain, tetapi sering dengan arti yang berbeda. Oleh karena itu, perlu saling mengenal dan mengetahui agama-agama yang lain itu, bukan hanya demi dialog dan hubungan baik antaragama, tetapi juga supaya dengan lebih tepat mengetahui dan menyadari kekhasan dan jati diri agamanya sendiri.

Oleh Konsili Vatikan II, dialog antara Gereja Katolik dan agama-agama lain sangat didorong dan dimajukan. Umat Katolik dinasihati “supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka” (NA.2). Konsili mengharapkan supaya “dialog yang terbuka mengajak semua untuk dengan setia menyambut dorongan-dorongan Roh serta mematuhiinya dengan gembira” (GS.92). Oleh karena itu, sesudah Konsili Vatikan II dialog antaragama diadakan di mana-mana.

Dalam sebuah dokumen resmi tahun 1991, dialog dan pewartaan, malah ditegaskan bahwa:

“Konsili Vatikan II dengan jelas mengakui nilai-nilai positif, tidak hanya dalam hidup religius orang beriman pribadi, yang menganut tradisi keagamaan yang lain, tetapi juga dalam tradisi religius itu sendiri”.

Dengan tegas Konsili Vatikan II mengatakan bahwa:

“di luar Persekutuan Gereja pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran”

Maka dialog tidak hanya berarti hubungan baik antar agama. Dalam dialog semua orang, baik yang Kristiani maupun yang lain, diajak agar memperdalam sikap iman di hadapan Allah. Dalam pertemuan dengan agama lain, justru karena berbeda, orang digugah dari kelesuan rutin supaya menemukan arah yang sesungguhnya dari iman dan kepercayaan. Dalam Gereja Katolik istilah “moderat” tidak biasa. Yang dipakai adalah “terbuka” terhadap “fundamentalis” dan “tradisionalis” (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik). Hal yang paling penting dalam Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II (1962-65; pertemuan semua – hampir 3.000 – uskup di Vatikan). Konsili itu mengesahkan perjalanan panjang Gereja Katolik ke pengertian diri dan kekristenan yang lebih terbuka, atau yang lebih moderat.

Adapun dalam tradisi Hindu, akar ruh moderasi beragama, atau jalan tengah, dapat ditelusuri hingga ribuan tahun ke belakang. Periode itu terdiri dari gabungan empat yuga yang dimulai dari

Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Dalam setiap Yuga umat Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi. Untuk mengatasi kemelut zaman dan menyesuaikan irama ajaran agama dengan watak zaman, moderasi tidak bisa dihindari dan menjadi keharusan sejarah. Praktik agama yang dilaksanakan umat Hindu Indonesia pada zaman modern seperti sekarang ini adalah Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Keduanya menjadi poros utama pembangunan peradaban Hindu Indonesia sejak terbentuknya Parisadha di tahun 1960-an. Praktik kedua teologi ini berkelindan dengan banyak praktik agama Hindu lain. Seni dan ritual menjadi penunjang yang menyemarakkan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah.

Dalam Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah, Tuhan menjadi objek tertinggi pemujaan. Demikian juga, pemujaan kepada leluhur tetap dipertahankan sejak zaman prasejarah. Dewa-dewa utama dan spirit alam tidak bisa dikesampingkan dalam tradisi pemujaan umat Hindu Indonesia. Sebelum era Parisadha, yang menonjol dalam pemujaan Hindu adalah leluhur, setelah era parisadha, rupanya pencarian kebenaran menemukan kembali Tuhan sebagai objek pemujaan. Tetapi pemujaan kepada leluhur pengamalan ajaran agama di kalangan umat Hindu, terutama dalam mengatasi zaman modern. Pada waktu itu digagas model pembinaan Sa Dharma atau enam Dharma yang meliputi: Dharma Tula, Dharma Sadhana, Dharma Yatra, Dharma Gita, dan Dharma Shanti. Bahkan, Dharma Gita menjadi salah satu model pembinaan umat Hindu Indonesia.

Moderasi beragama di kalangan umat Hindu diarahkan untuk memperkuat kesadaran individu dalam mempraktikkan ajaran agama. Selama ini, umat Hindu lebih banyak melaksanakan ajaran agama secara *komunal* (kebersamaan). Baik individual maupun komunal keduanya diperlukan dalam praktik keagamaan. Manusia pada zaman modern menghadapi masalah yang kompleks. Agama harus memberi solusi terhadap masalah sosial yang dihadapi manusia. Harus ada penguatan praktik agama secara individual karena manusia mengalami kesepian dan keterasingan sosial di tengah-tengah masyarakat modern. Bertapa dengan mengucapkan nama suci Tuhan merupakan praktik keagamaan yang patut diperluas karena berbanding lurus dengan kebutuhan individu.

Praktik-praktik agama secara individu biasanya mengarusutamakan pelaksanaan ajaran agama yang lebih kontemplatif. Pada zaman Kali, yang identik dengan zaman modern, segala sifat yang tidak baik telah bercokol dalam diri manusia secara individual. Karena itu, pada zaman ini, orang pada umumnya tidak tertarik pada agama, melainkan lebih tertarik pada kekayaan, kekuasaan, dan wanita. Sesuai dengan *watak* (sifat) zaman Kali, mereka yang *introvert* (tertutup) akan memilih praktik keagamaan yang kontemplatif. Sedangkan bagi umat yang *extrovert* (terbuka) sudah disediakan praktik keagamaan yang komunal. Semua jalan ini sama-sama memberi kepuasan batin yang maha luas.

Praktik agama sudah berkali-kali mengalami moderasi sejak zaman Satya Yuga. Parisadha nampaknya belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang dilaksanakan di akar rumput, atau belum puas dengan pelaksanaan ajaran agama yang terakumulasi sejak pelaksanaan Puja Tri Sandhya dan Panca Sembah. Dibuatlah program baru “grand design” sebagai usaha untuk mempersiapkan umat Hindu menghadapi dinamika sosial masyarakat di masa depan. Di dalamnya terdapat program moderasi. Tentu saja, moderasi yang digagas dalam grand design lebih kompleks dibanding waktu sebelumnya. Moderasi itu mengikuti kerangka pembangunan peradaban Hindu dengan aspek pembangunan politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Moderasi ini lebih kompleks karena mengaplikasikan pelaksanaan ajaran agama dengan modernitas. Sayang sekali, tidak ada agenda politik Hindu ke depan, sebab moderasi menuntut keterlibatan politik. Seperti Mahatma Ghandi menyebut politik dan agama merupakan satu kesatuan.

Berkaitan dengan moderasi beragama, ajaran agama Hindu yang terpenting adalah susila, yaitu bagaimana menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, yang menjadi salah satu dari tiga penyebab kesejahteraan. Kasih sayang adalah hal yang utama dalam moderasi di semua agama. Kasih sayang bisa kita wujudkan dalam segala hal/aspek. Pada intinya, umat Hindu mendukung penuh empat pilar kebangsaan yaitu pancasila, bhineka tunggal ika, NKRI, dan UUD 1945 yang telah menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia (MPR RI).

Dalam tradisi agama Buddha., terdapat juga Pencerahan Sang Buddha berasal dari Sidharta Gautama. Ia adalah seorang guru dan pendiri agama Buddha. Ia merupakan anak seorang raja. Sidharta Gautama mengikrarkan empat prasetya, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna. Tuhan dalam agama Buddha dipanggil dengan sejumlah nama, yaitu Tathagatagarba versi aliran Mahayana, Thian versi aliran Tridarma, Nam-myoho-rengе-kyo versi aliran Nichiren, dan Sang Hyang Adi Buddha versi Mahayana aliran Aisvarika nama yang biasa dipanggil para penganut Buddha di Indonesia. Tuhan dalam agama Buddha adalah sebuah kekosongan yang sempurna. Adapun yang memberikan rezeki, mengatur alam, dan tugas lainnya dilakukan para dewa dan Bodhisattava. Para dewa ini adalah manusia biasa yang juga mengalami kesengsaraan tapi mereka memiliki kesaktian, dan berumur panjang meskipun tetap tidak abadi.¹³

Kemajuan teknologi yang tidak terhentikan ini harus dimaknai sebagai hikmah yang hadir untuk menunjang peningkatan kebahagiaan seluruh umat manusia, seperti cita-cita agama Buddha yang menyatakan, *isyo jobutsu* dan *kosenrufu*, yakni kebahagiaan seluruh makhluk dan membahagiakan seluruh makhluk. Maka berbagai kemajuan ini bukanlah suatu tujuan, melainkan hanya alat atau media yang harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kebahagiaan umat manusia bahkan alam semesta.

Risalah Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah Metta, sebuah ajaran yang berpegang teguh pada cinta kasih tanpa pilih kasih yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan: toleransi, solidaritas, kesetaraan dan tanpa kekerasan. Kehidupan para Buddhis berjalan di atas nilai kemanusiaan yang dijabarkan pada kasih sayang, toleran dan kesetaraan. Buddhadharma merupakan 'jalan tengah' yang merupakan aspek penting dari spiritualitas umat Buddha yang sangat menghindari dari dua kutub ekstrem

13 Tim Penyusun, Mengenal Lebih Dekat Ragam Agama dan Kepercayaan di Indonesia, (Jakarta: Ensklopedia,2018), hlm. 40.

penyiksaan diri (*attakilamathanuyoga*) dan pemanjaan (*kamalasukhalikanuyoga*). Buddhadharmma adalah jalan spiritualitas untuk menuju kesucian yang bermuara pada kebahagiaan sejati dan kebijaksanaan. Jalan tengah Buddhadharmma merupakan sebuah cara untuk melenyapkan dukkha yang bertumpu pada hawa nafsu dan egoisme untuk mencapai tujuan hidup akhir kebahagiaan sejati Nirvana. Konsep ahimsa yang merupakan spirit keagamaan Hindu yang mengajarkan seperti yang terus dijadikan pijakan perjuangan Mahatma Gandhi (1869-1948) prinsip tanpa menggunakan kekerasan. Pada titik inilah, semua risalah ajaran agama bermuara pada satu titik: jalan tengah atau moderat.

Moderasi beragama juga mengakar dalam tradisi agama Khonghucu. Umat Khonghucu yang *junzi* (beriman dan luhur budi) memandang kehidupan ini dalam kaca mata yin yang, karena yin yang adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam dao.¹⁴ Yin yang adalah sikap tengah, bukan sikap ekstrem. Sesuatu yang kurang sama buruknya dengan suatu yang berlebihan.

Tengah disini bukanlah sikap tanpa prinsip, tapi sikap tengah adalah ajeg dalam prinsipnya. Prinsip yang berpihak pada cinta kasih - kemanusiaan (*ren*) dan keadilan - kebenaran (*yi*) bukan yang lainnya. Dalam keberpihakan pada prinsip tersebut, manusia beriman dan luhur budi senantiasa bertindak susila (*li*) dan bijaksana (*zhi*) sehingga menjadi manusia yang dapat dipercaya (*xin*) dan berani (*yong*). Mengzi berkata, “Seorang yang dapat bersikap tengah, hendaklah membimbing orang yang tidak dapat bersikap tengah. Yang pandai hendaklah membimbing orang yang tidak pandai. Demikianlah orang akan merasa bahagia mempunyai ayah atau kakak yang bijaksana. Kalau yang dapat bersikap tengah menyia-nyiakan yang tidak dapat bersikap tengah, yang pandai menyia-nyiakan yang tidak pandai, maka antara yang bijaksana dan yang tidak bijaksana sesungguhnya tiada bedanya walau satu inci pun.

14 UungSendana, *Tian dan Sheng dalam Penafsiran Roha-niawan dan Cendekiawan Matakini dan Pengamat Budaya Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Gerbang Kebajikan Ru, 2018), hlm. 129-132.

Sikap tengah dalam agama Khonghucu merupakan sikap tengah yang telah diajarkan dan diteladankan oleh para raja suci, nabi purba dan tokoh-tokoh suci lain, yang kemudian disempurnakan oleh Nabi Kongzi. Sikap tengah bukan sikap hanya memegang satu haluan saja, namun perlu kemampuan mempertimbangkan keadaan.

Dialog dan kerja sama terbangun karena orang-orang yang terlibat di dalamnya mau bersikap tengah, tidak ekstrem. Dalam dialog dan kerja sama senantiasa dibutuhkan jalan tengah. Jalan tengah itu bukan berarti selalu terjadi kesepakatan, sepakat untuk tidak sepakat pun adalah jalan tengah. Jalan tengah dibangun dengan sikap tengah. Sikap tengah dibangun karena kemampuan kita untuk terus berusaha menerima perbedaan, mengedepankan kebajikan, mengendalikan nafsu, ego, sikap kukuh dan keinginan mengalahkan atau menguasai yang lain.

“Gembira, marah, sedih, senang/ suka, sebelum timbul, dinamai Tengah; setelah timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamai Harmonis; Tengah itulah pokok besar dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh Dao (Jalan Suci) di dunia.” (Zhong Yong Bab Utama: 4).

Sebagai manusia, bukanlah sekadar makhluk individu akan tetapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia bukanlah sekadar makhluk biologis tetapi juga makhluk spiritual. Manusia mempunyai batasan waktu untuk berbuat sesuatu karena manusia bukanlah makhluk yang abadi, dibatasi oleh umur. Manusia juga dibatasi oleh tempat dan lingkungannya. Manusia bukanlah sekadar makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional. Manusia tidak dapat terlepas dari hukum *yinyang*, karena *yin* yang adalah hukum Tuhan. Sebagai manusia perlu tahu batas karena manusia mempunyai batas-batas, kesadaran akan keterbatasan yang akan mengantarkan pada kerja sama yang saling membangun. Maka untuk menguasai manusia yang lain bukanlah satu sikap yang mencerminkan kemanusiaan, itu melebihi batas-batas kemanusiaan. Selaras dengan hukum Tuhan, sebagai manusia, wajib menjaga agar terus berada dalam batas tengah, karena dengan tetap ada dalam batas tengah bisa harmonis. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh *dao* (jalan suci) di dunia. Dengan demikian pada akhirnya kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara.

“Apabila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka ke sejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara.” (Zhong Yong Bab Utama: 5).

Peperangan, penjajahan, climate change, ekstremisme, bom bunuh diri, perang dagang, keserakahan, keinginan menguasai orang dan bangsa lain, banjir, tertutupnya dialog, menghujat, hate speech, menegasikan dan membenci orang lain, merasa diri benar dan orang lain tidak benar, hoaks, tidak tahu kebaikan pada apa yang dibenci dan tidak tahu keburukan dari apa yang disukai serta banyak lagi adalah dampak kegagalan untuk bersikap tengah dan harmonis serta mengambil jalan tengah yang menjauhkan seseorang dari keadilan sosial atau kesejahteraan, keharmonisan dan perdamaian dunia.

Mengetahui pangkal dan ujung, awal dan akhir serta mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian adalah satu sikap yang menunjukkan telah dekat dengan *dao*.

“Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, tiap perkara mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan dao (jalan suci).”

(Zhong Yong Bab Utama: 3)

Sikap tengah adalah wujud sikap tersebut. Berusaha mengerti dan memahami keinginan orang lain tentu saja memerlukan pengorbanan yang terkadang tidak kecil, tetapi pengorbanan memang sesuatu yang harus dilakukan demi terjalinnya hubungan yang harmonis. Nabi Kongzi bersabda:

“Yang dapat diajak belajar bersama belum tentu dapat diajak bersama menempuh dao (jalan suci), yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh, dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian paham.” {Lunyu. IX: 30}.

Dalam tradisi Khonghucu, harmoni dapat dihasilkan karena adanya perbedaan-perbedaan. Tetapi untuk bisa harmonis, masing-masing hal yang berbeda itu harus hadir persis dalam proporsinya yang tepat/*pas* (proporsional). Zhong atau tengah itu adalah segala sesuatu yang *pas/ tepat*, baik jumlah, waktu, suhu, jarak, kecepatan dan sebagainya.

Zhong juga dapat diartikan sesuatu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar (waktu), tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit (jumlah), tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (posisi), tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat (jarak), tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis (bentuk), tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin (suhu) dan seterusnya. Jadi Zhong diartikan sebagai segala sesuatu yang pas/ tepat atau segala sesuatu yang berada pada waktu, tempat, dan ukuran yang pas/ tepat. Oleh karena itu Zhong sangat terkait dengan faktor waktu, tempat, dan ukuran, atau dalam suatu istilah disebutkan “di tengah waktu yang tepat.” Maka Zhong berfungsi untuk mencapai harmoni, atau Zhong berfungsi mengharmonikan apa yang bertentangan karena perbedaan-perbedaan.

Demikianlah landasan moderasi dalam tradisi agama-agama yang ada di Indonesia. Pada titik ini, Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama. Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat dan juga memiliki modal sosial sebagai landasan moderasi beragama.

D. Moderasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an merupakan petunjuk ke jalan yang paling benar, mencakup keseluruhan syariat Islam, inti ajaran agama, cahaya kebenaran, dan barang siapa yang mau menyelaminya dan memahami maksudnya secara mendalam, niscaya ia harus menjadikannya sebagai teman dan kekasihnya, menjadi teman duduk dan teman belajarnya setiap hari dan malam, dengan membaca dan mengamalkannya.¹⁵ Di antara ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang tema moderasi adalah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

¹⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 144.

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusiadan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Qs. Al-Baqarah/ 2: 143).

Kata *wasath* pada ayat tersebut mengandung makna yang beragam di kalangan ulama’ tafsir, yaitu makna *khairiyah* (terbaik), *al-adalah* (adil), *al-qasd* (niat), dan *al-tawassuth* (tengah-tengah). Oleh karena banyak makna maka para mufassir berbeda pendapat dalam memaknai kata *wasath* sebagaimana pada ayat diatas. Al-Thabari menafsirkan kata *wasath* dengan makna satu posisi yang berada diantara dua kutub, dimana umat Islam memiliki sifat tidak berlebihan dan tidak enggan dalam suatu perkara, namun berada pada posisi tengah.¹⁶ al-Mawardi menafsirkan kata *wasath* dengan tiga takwil, yaitu bermakna *khiyaran* (umat terbaik), bermakna berposisi di tengah-tengah dalam suatu perkara sebagaimana umat Islam melakukannya, dan bermakna adil dalam artian tidak berlebihan dan dan tidak terlalu menyedikitkan dalam suatu perkara.¹⁷ ketiga kata di atas meskipun beda hakikat makna secara bahasa, namun saling melengkapi satu sama lain, karena logikanya umat terbaik itu pasti berlaku adil, dan untuk menuju pada tindakan adil diperlukan posisi yang berimbang, yaitu ditengah dua kutub yang saling bertentangan. Demikian para mufassir yang lain seperti Ibn Katsir juga menafsirkan ummat wasat ha dengan makna yang hampir sama. Ayat lain yang terkait dengan makna *wasath* terdapat dalam surat al-An’am ayat 153 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرُقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمُ وَصِيَّتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

16 Al-Thabari, Jami’ul Bayan Fi Ta’wil Ayat al_Qur’an, Jilid 3, (t.tp: Maktabah Syamilah, t.th). hlm. 132

17 Abu al-Hasan Ali bin Muahmmad Al-Mawardi, Al-Nukat wa Al-‘Uyun, Jilid. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,), hlm. 198.

Artinya: “Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus,Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yanglain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa”.
(Qs. al-An’am :153)

Pada satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan tentang makna *Shirati Mustaqiman* sebagai makna yang sepadan dengan wasath yaitu berada ditengah-tengah antara kesesatan-kesesatan, seberkas cahaya diantara beberapa kegelapan, dan petunjuk yang nyata di antara ketidakpastian.¹⁸

Beberapa hadits Rasulullah SAW yang mengisyaratkan ajaran *wasathiyah* (moderasi) dalam berbagai aspek kehidupan Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah SAW juga tidak sedikit. Salah satunya adalah hadits tentang larangan Rasulullah SAW atas tindakan membujang salah seorang sahabat:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: رَدَّرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتَالَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَمِينَا.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad,dari Ibn Sihab ia mendengar said al-Musayyab berkata: “saya mendengar Saad bin Abi Waqash berkata; Rasulullah SAW pernah melarang Usman bin Mazh’un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri.
(HR. Muslim)

18 Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al-Wasthiyyah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1996), hlm. 11.

Keinginan membujang dan mengebiri diri sendiri merupakan perbuatan yang tidak terpuji meski dilakukan untuk tujuan ibadah yang lain kepada Allah SWT, yaitu perbuatan tidak seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, dimana saat itu kebutuhan untuk memperbanyak keturunan sangat dianjurkan untuk menambah pengikut umat Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW malah mengingatkan kepada umatnya agar tidak berlebihan dalam menjalankan agama, Rasulullah SAW bersabda:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إياكم و الغلو في الدين ، فإنما
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين (رواه النسائي)

*Artinya : Nabi SAW bersabda: “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap ghuluw (berlebihan) dalam agama”.
(HR. Nasai).*

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه
وسلم، قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،
فسددوا زقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء
من الدلجة (رواه البخاري)

*Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW Bersabda:
“sesungguhnya agama itu mudah, Tidak ada seorang pun yang mempersulit
agama melainkan dia akan dikalahkannya. Maka luruslah dalam beramal,
dekatilah (tingkat kesempurnaan), dan bergembiralah, dan mintalah
pertolongan kepada Allâh Azza wa Jalla pada pagi, sore, dan akhir
malam.” (HR. Bukhori).*

Demikianlah perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah SAW mengenai perilaku *wasath* (moderasi) mengambil jalan tengah dalam beberapa urusan dunia maupun urusan beragama, dan tentu masih banyak lagi hadits lain yang mencerminkan ajaran Islam tentang

keberagaman secara standar tanpa memperberat namun juga tidak menyepelekan atau mengentengkannya, karena keduanya sama-sama perbuatan yang tercela. Poinnya adalah sebaik-baiknya perkara yang tengah-tengah.

E. Karakteristik Moderasi dalam Islam

Pada satu buku yang berjudul *Bulughul Amal fi Tahqiq al-Wasthiyah*,¹⁹ Al-Sudais menjelaskan secara panjang lebar mengenai karakteristik moderasi dalam Islam, yaitu:

1. Berasaskan Ketuhanan (*Rububiyah*)

Moderasi yang dibangun oleh Islam adalah moderasi yang bersumber dari wahyu Tuhan yang ditetapkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu maksud dan tujuan syariah Islam yang paling urgen. Karena itu sudah pasti karakteristik moderasi tidak lepas dari karakteristik Tuhan yang menurunkan ajaran-ajaran kesederhanaan dimaksud. Tuhan yang bijaksana, adil, sempurna, maha mengetahui segala perkara baik yang tanpa tersembunyi. Disinilah letak keistimewaan moderasi Islam yang berlandaskan kepada pondasi ketuhanan.

2. Berlandaskan Petunjuk Kenabian

Hampir dalam segala tindakan Rasulullah SAW mengisyaratkan ajaran moderasi ajaran Islam. Kesederhanaan dalam hidup dalam artian tidak terlalu berorientasi duniawi namun tidak meninggalkannya sama sekali, adalah tauladan yang pernah dipraktekkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Rasulullah SAW adalah insan yang paling baik dan paling takwa, namun tidak pernah berlebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Melaksanakan puasa tapi tidak meninggalkan berbuka apabila telah tiba waktu berbuka.

Bangun malam shalat Tahajud namun tidak meninggalkan tidur, dan masih banyak lagi perbuatan, perkataan, maupun iqrar yang pernah beliau perlihatkan kepada para sahabat yang mencerminkan sifat *tengah-tengah* (sederhana) baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah.

¹⁹ Abdurrahman Bin Abdul Aziz Al-Sudais, *Bulughul Amal fi Tahqiq al-Wasthiyah wa al-I'tidal*, (Riyadh: Madar al-Wathan li al-Nasyar, 2017), hlm. 53.

3. Kompatibel dengan Fitrah Manusia

Salah satu watak *wasathiyah* dalam Islam adalah selalu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi yang dibawa manusia sejak lahir. Sebagian ulama menyebutnya sebagai insting. Fitrah atau tabiat yang tertanam ke dalam diri manusia adalah potensi kuat penerimaan terhadap agama yang benar yang sudah diciptakan oleh Allah SWT sejak manusia masih dalam kandungan ibunya. Ketika manusia memiliki *potensi kuat* (fitrah) untuk menerima agama yang benar, maka secara otomatis juga berpotensi untuk mengikuti konsep moderat dalam beragama, karena pada dasarnya salah satu tujuan syariat agama adalah menegakkan konsep moderasi dan keadilan. Disinilah letak hubungan antara potensi yang sudah ada pada diri setian insan dengan kemudahan untuk menerima konsep moderasi dalam Islam.

4. Terhindar dari Pertentangan

Konsep moderasi dalam Islam merupakan ajaran yang selaras dengan fitrah beragama manusia, maka tidak ada lagi alasan untuk menentangnya, apalagi untuk mempertentangkan dengan konsep yang terkait keberagamaan. Karena konsep moderasi dalam Islam memang ajaran Allah SWT yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Ini menunjukkan bahwa konsep moderasi Islam merupakan konsep yang sangat sempurna, terhindar dari kekurangan dan aib karena konsep ini bersumber dari syariat Islam yang sempurna.

5. Ajek dan Konsisten

Di samping sulit ditentang dengan akal sehat, konsep moerasi Islam juga merupakan konsep yang ajek dan konsisten, dalam artian menjadi ajaran yang akan tetap kekal dan relevan dalam setiap waktu dan tempat, sebagaimana syariat Islam memiliki karakter yang sama. Imam Syatibi²⁰ menyatakan bahwa salah satu karakter syariat Islam adalah ajek dan tetap tanpa perubahan dan penghapusan, hal demikian tentunya setelah masa kesempurnaan dari syariat Islam. Menurutnya, setelah masa kesempurnaan syariat Islam

20 Al-Syatibi, al-Muwafaqat, Jilid 1., hlm. 110.

maka tidak ada lagi *nasakh*, tidak ada *takhsis* untuk yang berlaku umum dan sebaliknya, tidak ada lagi *illat* sesuai dengan tempat dan waktu, tidak ada berlaku karena keumuman lafadz atau sebab, dan sebagainya. Oleh karena salah satu tujuan syariat adalah implementasi konsep moderasi dan keadilan maka otomatis karakter kekal dan tetap tanpa adanya perubahan juga menjadi karakternya.

6. Bermuatan Universal dan Konprehensif

Konsep moderasi Islam adalah mencakup segala aspek kehidupan, baik keduniaan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya tanpa kurang sedikitpun. Relevan disetiap zaman dan tempat. Terhindar dari cacat dan kekurangan. Moderasi Islam juga mencakup aspek aqidah, ibadah, mu'amalah, *manhaj* (metodologi), pemikiran, dan akhlak.

7. Bijaksana, Seimbang dan Bebas dari Tindakan Berlebihan

Salah satu karakter moderasi Islam adalah adanya sifat bijaksana dan seimbang dalam menjalankan aspek-aspek kehidupan. Seimbang dalam mencari bekal antara kehidupan dunia dan akhirat, seimbang dalam bermuamalah dengan sesama masyarakat di muka bumi, seimbang dalam memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani, dan seimbang dalam segala hal. Ajaran Islam juga hadir untuk kebahagiaan hidup umat manusia, untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan cara sederhana, yaitu tidak berlebihan dan tidak melalaikan.

F. Ciri-Ciri Pengamalan Moderasi

Di tengah berkecamuknya pemahaman dan pola perilaku yang berlebihan baik yang cenderung rigid dan dokmatis maupun yang cenderung lalai karena terlalu menekankan hal *substantive* (liberal), maka bagian ini sangat perlu diuraikan terkait dengan ciri-ciri pola pikir *manhaj al-Fikir* maupun *amaliyah individu* maupun kelompok yang memiliki karakter *ummatan wasatha* (umat moderat). Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Tawasuth* (mengambil jalan tengah), *Tawazun* (seimbang), dan *I'tidal* (tegas dan lurus).

Yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (abai atas ajaran agama). *Tawazun* dalam semua aspek kehidupan, misal antara duniawi dan ukhrawi, dan *I'tidal* dalam memenuhi kewajiban dan hak secara proporsional. Tiga kata tersebut memiliki makna yang hampir sama (*mutaradif*). Satu sikap mengambil jalan tengah-tengah secara tegas demi menghasilkan keseimbangan di antara dua kutub yang berlawanan. Misalkan antara sifat ketuhanan dan kemanusiaan, antara aspek jasmani dan rohani, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara wahyu dan akal, antara sejarah masa lampau dan cita-cita masa depan, antara idealitas dan realitas, antara kepentingan individu dan kelompok, antara hak dan kewajiban, antara yang kekal dan yang *profan* (berubah), antara statis dan dinamis, antara nash dan ijtihad, dan lain sebagainya.²¹

Dalam ajaran Islam dan keberagamaan umat Islam ada sikap-sikap yang ditengarai telah menjadi faktor kemunduran umat Islam sendiri yang terindikasikan karena tidak mengamalkan sikap *tawassuth*, *ta'adul*, dan *tawazun* diatas. Umat Islam banyak yang berubah dari gerakan horisontal menuju gerakan vertikal yang keluar dari kehidupan dunia, dan menghabiskan waktunya ketikadia masih hidup di dunia untuk kepetingan akhirat semata, sungguh suatu amalan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moderasi, karena mementingkan satu sisi kehidupan dari sisi yang lain yang juga sama pentingnya. Dan biasanya perbuatan yang demikian akan menjauhkan diri dari dunia demi menyelamatkan diri sendiri tanpa yang lain. Padahal menyelamatkan diri tanpa yang lain adalah perbuatan destruktif dan naif.²²

Amalan dan ritual yang dikembangkan kaum sufi dipandang telah menjadi senjata makan tuan, seperti *faqr* (kemiskinan), *khauf* (ketakutan), dan *al-Ju'* (kelaparan) yang menjadi perilaku kaum sufi telah menjadikan umat Islam benar-benar mengalami kemiskinan, ketakutan, dan kelaparan. Kesabaran telah menjadikan umat Islam diam atas segala hal yang menyimpannya.

21 Al-Qardhawi, *Fiqh al-Washthiyyah al-Islamiyah wa Al-Tajdid*, (Mesir: Markaz al-Tiba'ah Li al-Qardhawi, 2009), hlm. 23-24.

22 Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam, Antara Modernisme dan Postmodernisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 128.

Tawakkal telah membuat umat Islam abai untuk mengantisipasi masa depan, dan cita-cita menyatu dengan Tuhan (*ittihad*) dan ekstase (*al-Fana*) telah menenggelamkan umat Islam dalam ilusi berkepanjangan. Sehingga umat Islam tidak sempat untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai untuk menerima predikat sebagai ummat terbaik (*khaira ummah*).²³

2. *Tasamuh* (Toleran)

Islam sebagai agama samawi membawa ajaran tauhid, sebagaimana juga agama-agama sebelumnya membawa ajaran yang sama. Jika dilihat secara lebih tajam, agama sebenarnya merupakan respon atas kondisi masyarakat yang menyimpang dari sisi-sisi kemanusiaan, sebagai akibat dari kebodohan manusia itu sendiri yang tidak mampu menolak ajakan hawa nafsunya, keluar dari jalan Tuhan, dan lebih memilih jalan setan. Selanjutnya agama juga terlibat dalam tuntutan dan kebutuhan pemeluknya, dengan kata lain agama berinteraksi dengan hubungan antar manusia, kebutuhan ekonomi, kebutuhan atas keadilan dan lain sebagainya.²⁴

Agama juga bersifat universal, karena agama merupakan pengetahuan yang juga bersifat universal. Karena agama universal, maka sebenarnya para pemeluk semua agama adalah satu komunitas yang oleh al-Qur'an disebut sebagai ummah wahidah, setidaknya satu komunitas dalam aspek-aspek kemanusiaan yang selalu harus dibangun antar sesama pengikut agama. Berdasarkan fundamental universalitas agama tersebut maka dalam agama Islam dilarang untuk memaksakan keimanan kepada siapapun, tidak seorang pun berhak untuk memaksakan kepercayaannya kepada orang lain.²⁵ Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam rangka memperingatkan Rasulullah SAW agar tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada seseorang, yang firman-Nya adalah:

23 *Ibid.*, 129.

24 Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas Pluralisme Terorisme*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm. 37.

25 Hasan Hanafi, at all, *Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 30.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
 انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. al-Baqarah/ 2: 256)

Dalam surah lain Allah SWT juga berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
 تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : “dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orangyang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. Yunus: 99)

Kedua ayat di atas, secara eksplisit menggambarkan adanya suatu larangan kepada Rasulullah SAW meskipun dia sebagai Rasul, agar tidak memaksakan satu keyakinan atau agama tertentu tanpa terkecuali agama Islam kepada seseorang maupun kelompok masyarakat. Seorang utusan hanya berkewajiban menyampaikan apa yang menjadi ajaran agamanya, dan tidak melekat padanya kewenangan untuk memaksa umatnya untuk mengikuti ajaran agama yang disampaikan.

Secara normatif bahwa ajaran Islam itu juga tidak menghendaki adanya pemaksaan dalam memeluk suatu agama, maka bagaimana mungkin pemeluk agama baik secara personal maupun secara kolektif

tidak mau melakukan upaya agar semua pemeluk agama-agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan tidak saling mengganggu satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, dan saling menghormati hak kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sungguh kalau semua itu tidak terjadi merupakan suatu pelanggaran terhadap ajaran agamanya, yang memang diturunkan oleh Tuhan untuk kemaslahatan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat, *syari'at* (ajaran agama) tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebahagiaan hakiki para hamba-Nya.²⁶

Di samping kedua ayat di atas, secara teologis dalam beberapa ayat al-Qur'an, Islam menganjurkan agar umatnya senantiasa menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan umat pemeluk agama lain, hal tersebut karena semua kebenaran (agama) berasal dari Tuhan yang sama yaitu Allah SWT. Misalnya dapat disimak disini bunyi surat al-Kahfi ayat 29 sebagai berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ^{صَلِّ} فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

Artinya : dan katakanlah: “Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu: Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia Kafir”. (Qs. Al-Kahfi: 29)

Dari beberapa ayat yang sudah dijelaskandi atas, jelas mengisyaratkan kepada umat Islam bahwa sumber utama ajaran Islam sudah sejak awal menyangsikan bahwa hanya ada satu agama bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dengan kata lain bahwa pluralitas agama dipandang lebih realistis ketimbang satu agama, karena menyangkut umat yang terdiri dari berbagai suku dan kultur yang berbeda.

26 Maimun Nawawi, *Reformasi Pemikiran Hukum Islam*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 132.

Syahrin memberikan ulasan penafsiran atas surat Yunus ayat 99 di atas, bahwa orang-orang beriman seharusnya tidak marah ketika berhadapan dengan orang tidak beriman, dan hendaknya menahan diri dari tindakan kekerasan, memaksakan keyakinan kepada orang lain dengan berbagai cara, karena iman yang dipaksakan adalah iman yang dibuat-buat dan itu bukanlah iman.²⁷

Larangan atas pemaksaan agama dan keyakinan kepada individu maupun kelompok tertentu tidak saja ada dalam ajaran agama Islam, melainkan juga pernah terjadi di dalam agama lain. Semisal apa yang pernah direkomendasikan oleh negara bagian di India, di mana menyerukan agar para misionaris Kristen yang bertugas merekrut para pengikut untuk menganut agama Kristen diperintahkan untuk ditarik agar tidak lagi menjalankan tugasnya. Begitu juga dilarang melakukan usaha dengan kekerasan atau penipuan, dengan ancaman atau cara-cara haram lainnya seperti bantuan keuangan untuk mengubah hati dan keyakinan mereka.²⁸

Penjelasan terhadap ayat di atas relevan dalam kehidupan saat ini di mana hitrogenitas penduduk di suatu wilayah tertentu tidak dapat dielakkan. Dan dalam kondisi yang seperti itu umat membutuhkan banyak masukan dan arahan agar senantiasa berfikir rasional terutama menyangkut pandangannya tentang perbedaan atau persamaan agama-agama di muka bumi. Bahwa antara satu agama dengan yang lain ada perbedaan dalam satusisi, itu sudah pasti. Namun jangan sampai melupakan sisi-sisi persamaan antar agama.

Masih tentang kerukunan antarumat beragama, Islam juga memiliki sejarah yang manis dalam mengkonstruksi, menjaga dan memelihara kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda. Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyatukan umat manusia yang berbeda suku, ras dan agama di Madinah melalui konsep ummah, yang kemudian diabadikan dalam bentuk Piagam Madinah.

27 Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan*, (Jakarta : Prenada, 2011), hlm. 16.

28 Wilfred Cantwell Smith, "*Orang Kristen di Tengah Pluralitas Agama*", *Dalam Agama Untuk Manusia*, Ed. Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), hlm. 48.

Dari itu semua mengindikasikan secara jelas bahwa terkait dengan bagaimana menciptakan kerukunan di antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama yang lain, Islam tidak hanya memiliki konsepsi teoritik yang terakumulasi dalam nalar teologisnya, tetapi juga memberikan contoh konkret dalam kehidupan yang sebenarnya sesuai dengan seting sosial masyarakatnya. Dengan demikian menjadi lebih nyata bahwa sebenarnya Islam sangat membenci kekerasan dan disharmoni yang mengatasnamakan agama, dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) yang terwujud dalam pemeliharaan kerukunan antar umat beragama.

Jika dilihat dalam setting sosial yang lebih sempit semisal di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, dapat digambarkan di sini betapa berbagai upaya yang dilakukan para tokoh agama untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman, damai, dan rukun antarumat beragama, betapa menghadapi rintangan yang sangat berat, meskipun para tokoh agama seperti almarhum KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak henti-hentinya mengupayakan dengan berbagai cara rasional, sehingga menjadikannya menerima gelar pahlawan nasional, dijadikan icon pluralisme termasuk oleh lawan politiknya.²⁹

Karena kegigihannya dalam memperjuangkan hak-hak minoritas itulah Gus Dur tak henti-hentinya dikenang oleh umat berbagai agama yang diakui secara sah di Indonesia. Bahkan dalam kesempatan memimpin negara Indonesia sebagai Presiden yang masa jabatannya relatif singkat, Gus Dur berhasil mengesahkan satu agama untuk dapat dihargai dan dihormati di Indonesia, yaitu agama Konghucu.

Menurut Gus Dur, terjadinya berbagai kerusuhan dan kekerasan yang tidak bertanggung jawab dan bernuansa agama di berbagai tempat, merupakan akibat dari sikap eksklusif dalam beragama.³⁰ Karenanya ia menyarankan agar siapa pun umat beragama lebih mengedepankan keterbukaan dalam mencari kebenaran di dalam agama masing-masing.³¹

29 Amien Rais, *Gus Dur Ikon Pluralisme*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 73-74.

30 Abdurrahman Wahid, *Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 52.

31 Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: LapPenas, 1981), hlm. 3.

Begitu juga Zainuddin,³² mengatakan bahwa dalam hal teologis masing-masing pemeluk agama yang berbeda tidak dapat melakukan kompromi, karenadalam persoalan yang sama seperti tentang kitab suci, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka yang harus ditempuh adalah jalan *agree in disagreement* untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan jalan tersebut masing-masing pemeluk agama harus meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar, dan pada sisi yang sama juga harus membiarkan orang lain untuk meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.

3. *Musawah (Egaliter) tidak diskriminatif*

Karakter ini dalam ajaran Islam sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW yang berhasil menciptakan satu ikatan perjanjian di antara masyarakat di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam beberapa pasal di Piagam Madinah, misalkan pasal 1, 12, 15, 16, dan sebagainya terkandung prinsip-prinsip persamaan dan keadilan. Pasal-pasal tersebut mengikat antar sesama bahwa semua masyarakat Madinah waktuitu berstatus sama di mata hukum. Sama dalam perolehan hak-hak dan kewajiban, dan yang terpenting memiliki persamaan derajat sebagai masyarakat yang merdeka.

Piagam Madinah telah mencontohkan kepada umat sekarang bahwa setiap manusia posisinya sama di depan Tuhan, tidak membedakan jenis suku dan komunitas, agama, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Perjanjian seperti itu yang termaktub dalam Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas di dalam msayakat.³³

G. Aktualisasi Konsep Moderasi dalam Islam

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa konsep moderasi Islam teraktualisasi ke dalam segala bidang kehidupan umat Islam, mulai dari bidang aqidah, ibadah, *mu'amalah*, ekonomi, dan sebagainya. Secara lebih detailnya dijelaskan sebagai berikut:

32 Zainuddin, *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 49.

33 Ayang Utriza Yakin, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 13.

1. Bidang Aqidah

Ajaran Islam melalui risalah al-Qur'an datang dengan membawa kepastian tentang konsep moderasi dalam bidang *aqidah* (keyakinan). Hal itu karena *aqidah* merupakan asas utama keberagamaan dan seluruh aktivitas keberagamaan seseorang dibangun berdasarkan *aqidah* yang kokoh. Umat Islam meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan pencipta alam semesta dengan 99 sifat-Nya yang dikenal dengan *asma'ul husna*. Tuhan yang tidak melahirkan anak dan tidak pula dilahirkan, yang paling awal keberadaan-Nya dan tidak ada yang mendahului keberadaan-Nya. Tuhan yang terhindar dari sifat-sifat lemah, hina, kekurangan, dan tidak pula ada serupa bagi-Nya.³⁴

Begitu juga, umat Islam meyakini adanya para malaikat secara moderat sebagaimana ajaran Islam menyebutkannya dan memberikan nama-nama para malaikat yang wajib diyakini. Tidak menambah dan tidak mengurangi, sebagaimana umat lain sebelumnya. Dalam keyakinan umat Islam, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang suci yang diciptakan-Nya dari cahaya Ketuhanan. Karena itu malaikat menjadi makhluk Tuhan yang paling taat dalam menjalankan perintah Allah SWT dan tidak pernah melanggar larangan-Nya.

Keyakinan tentang adanya para Nabi dan utusan (Rasul) bagi umat Islam merupakan bagian dari aplikasi nilai-nilai keimanan, dalam hal ini, kaum Muslimin juga berbeda dengan umat sebelumnya. Umat Islam tidak pernah mengingkari keberadaan Nabi dan rasul, juga tidak melebihkan keberadaannya, keyakinan umat Islam tentang adanya kenabian juga secara wajar tidak mengurangi dan tidak menambah. Nabi adalah manusia biasa yang punya isteri, sebagian mereka mempunyai anak, makan dan minum, bedanya dengan manusia kebanyakan mereka diberi wahyu oleh Allah SWT.³⁵ Umat Islam adalah umat yang paling mencintai para Nabi, itu karena para Nabi merupakan orang-orang terpilih dan terbaik sebagai utusan Tuhan. Lebih-lebih kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup.

34 Abdurrahman Bin Abdul Aziz Al-Sudais, *Bulughul Amal fi Tahqiqal-Washiyah wa al-I'tidal*, (Riyadh: Madar al-Wathanli al-Nasyar, 2017), hlm. 99.

35 Al-Qardhawi, *Fiqh al-Washiyah.*, hlm. 34.

Meskipun umat Islam sangat mencintai para Nabi, namun dalam keyakinan ini, umat Islam menjauhi sifat berlebihan dan abai terhadap Nabi, tidak menyanjungnya di atas *derajat* (maqam) mereka secara berlebihan dan tidak menempatkan mereka padaposisi yang rendah. Makanya umat Islam mengimani sifat-sifat Nabi sesuai dengan sifat-sifat yang diberikan Allah SWT kepada para Nabi, dan tidak lebih dari itu. Seperti memposisikan Nabi Esa sebagai hamba dan utusan Allah SWT, bukan sebagai anak. Nabi Musa sebagai *Kalim* (lawan bicara) Allah SWT, Ibrahim, Ishaq, Ismail, Ya'qub dan Nabi yang lain diyakini umat Islam sebagai hamba Allah SWT dan utusan-Nya. Tidak terkecuali Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diperlakukan lebih atau kurang dari predikat sebagai hamba dan utusan Allah SWT.

2. Bidang metode (*manhaj*) berfikir

Dalam bidang *manhaj* berfikir, umat Islam juga mengambil jalan yang moderat, yang menyeimbangkan antara nalar dan *naql*. Oleh karenanya telah disusun berbagai buku usul dan kaidah-kaidah serta ketentuan dalam merumuskan konsep aqidah, ibadah, *mu'malah*, akhlaq, dan hukum dengan konsep yang moderat sesuai dengan jalan yang benar (*al-thariq al-mustaqim*). Ajaran Islam menempatkan ajaran konsep ajaran yang lurus pada surat pembuka (*al-Fatihah*) dengan istilah *shirath al-mustaqim*. Paramufassir sepakat menafsirkan secara bahasa bahwa *shirath al-mustaqim* adalah jalan yang jelas dan lurus yang tidak ada bengkoknya.³⁶ Jalan yang jelas dan lurus ini adalah metode yang moderat (jalan tengah) antara metode orang-orang yang dibenci karena *Tafrith* dan orang-orang yang sesat kerana *Ifrath*. Salah satu contoh yang paling konkrit tentang *manhaj* moderat yang dilakukan umat Islam adalah tindakan memadukan antara ilmu dengan amal, tidak menjunjung setinggi langit keutamaan ilmu tanpa amal, begitu juga sebaliknya, tidak berkerja tanpa ilmu, karena ilmu tanpa amal akan sia-sia, amal tanpa ilmu akan tersesat.

3. Bidang Ibadah

Dalam bidang ibadah, umat Muslim juga menjaga keseimbangan dan keadilan. Memelihara harmoni yang indahantara tuntutan kebutuhan jasmani dan rohani. Selaras dengan fitrah manusia yang dibawanya sejak lahir. Al-Qur'an menjelaskan hal ini dalam salah satu ayat:

36 Al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayat Al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 170.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَإِحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Qs. Al-Qashas: 77).

Ayat di atas, merupakan anjuran kepada umat Islam agar hidup di dunia sebagai hamba yang senantiasa seimbang dalam bertindak, termasuk dalam hal menjalankan kewajiban kepada Allah SWT. Bekerja keras untuk menghimpun bekal hari akhirat, dan jangan sampai melupakan kepentingan dunia yang sekarang sedang dihadapinya.

Rasulullah SAW sering melarang sahabat yang melaksanakan ibadah dengan cara berlebihan dan mempersulit jiwa dan raganya. Sebagaimana salah seorang sahabat bernama Usman bin Madh'un dilarang untuk membujang selamanya demi untuk memaksimalkan beribadah kepada Allah SWT. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa kawin (bersetubuh dengan istrinya) dapat mendapat pahala, sampai sahabat menanyakan, masak orang memenuhi syahwat seksualnya saja dapat pahala?, Rasulullah SAW menjawab “Iya”. Riwayat tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan ibadah dalam Islam sangat memperhatikan nilai moderasi dan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Tidak berlebihan dan tidak pula diabaikan, dalam ajaran Islam, kehidupan dunia merupakan jalan dan bekal menuju kehidupan akhirat.³⁷

Ajaran Islam tidak menuntut (taklif) para hambanya dengan

³⁷ Abdurrahman Bin Abdul Aziz Al-Sudais, *Bulughul Amal.*, hlm. 121.

kewajiban yang melampaui kemampuannya, dapat dilihat misalnya kewajiban shalat lima waktu dalam sehari, kewajiban shalat Jum'at seminggu sekali, kewajiban puasa setahun sekali, dan kewajiban haji sekali dalam seumur hidupnya. hal demikian dapat diartikan bahwa di satu sisi ajaran moderat Islam dalam aspek ibadah dengan menjaga keseimbangan antara hubungan hamba dengan tuhan nya tetap terjaga, di sisi yang lain hubungan antara sesama manusia tetap diberi peluang untuk dipenuhi. Dengan menjadi pedagang, pegawai, petani, dan profesi-profesi lainnya tanpa terbebani oleh kewajiban-kewajiban ibadah yang memberatkan, di sinilah letak moderasi ajaran Islam.³⁸

4. Bidang Syariat dan Hukum

Sifat moderasi syariat dan hukum dalam Islam dapat dilihat dalam berbagai persoalan, antara lain mengambil jalan tengah-tengah antara sifat-sifat hukum yang *Ilahiyah* di satu sisi, dan sifat hukum yang *insaniyah* di sisi yang lain. Artinya bahwa umat Islam sepakat hanya Allah SWT sebagai *al-Hakim* (pembuat hukum) satu-satunya, hanya Allah SWT yang memiliki otoritas mensyariatkan. Menentukan halal dan haram, wajib dan sunnah, mubah dan makruh kepada umat-Nya. Manusia hanya sebagai individu atau kelompok yang mengerahkan segala *ijtihad* (kemampuan) untuk memahami titah Tuhan yang termaktub dalam wahyu sehingga menjadi ajaran yang praktis dan mudah diamalkan.³⁹ Di sinilah letak sifat keilahiyahan hukum Islam.

Namun di sisi yang lain hukum Islam tidak lepas dari sifat *insaniyah* (kemanusiaan). Karena bagaimanapun yang akan melaksanakan hukum Islam adalah manusia, hukum Islam disyariatkan bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia, maka sifat-sifat kemanusiaan sudah semestinyadiperhitungkan dalam menentukan hukum. Karenanya, apabila diperhatikan hukum Islam berlaku dengan mempertimbangkan dua aspek idealitas normatifnya dengan tidak menafikan realitas empiriknya. Menjaga keseimbangan antara *tahlil* (pembolehan) sesuatu perkara dan *tahrim* (pelarangan) berdsarkan petunjuk Sang pembuat hukum.⁴⁰

38 Al-Qardhawi, *Fiqh al-Wasthiyyah*. hlm, 3.

39 Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jiid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),hlm. 115.

40 Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat, Kajian Metodologis*(Situbondo: Tanwirul afkar, 2018), hlm. 17-18.

Tentang poligami misalnya, Islam berposisi secara moderat antara memberi peluang untuk diamalkan, namun sisi lain memberikan persyaratan yang ketat agar tidak sembarang orang melakukannya.

5. Bidang Mu'amalah

Dalam bidang mu'amalah, ajaran Islam dibangun berdasarkan dasar dan batasan-batasan syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan individu dan masyarakat. Karena itu dalam mu'amalah, tidak diperkenankan transaksi yang mengandung unsur riba dan segala bentuknya, baik dilakukan oleh individu Muslim maupun masyarakat secara umum, baik dalam bermu'amalah dengan sesama Muslim maupun dengan saudara-saudara non Muslim yang lainnya. Bermu'amalah dalam ajaran Islam dibangun dari empat sendi utama, yaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap moderat (pertengahan).⁴¹

Islam menghormati hak individu dan masyarakat dalam bertransaksi ekonomi secara adil dan seimbang (moderat) khususnya tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, antara cita-cita dan kenyataan, Islam jika bersikap tengah-tengah (moderat) antara iman dan kekuasaan. Karena itu ekonomi yang moderat tentu transaksi (*akad*) yang tidak merugikan salah satu pihak, tidak menzalimi hak-hak masyarakat baik yang lemah maupun yang kaya, tidak seperti sistem ekonomi kaum kapitalis yang menzalimi hak-hak masyarakat, tidak juga seperti sistem ekonomi kaum sosialis-komunis yang menzalimi hak-hak individu, tapi Islam membangun hubungan *mu'amalah* secara berkeadilan dan bijaksana (hikmah) serta berada pada posisi tengah-tengah antara kedua sistem di atas.⁴²

6. Bidang Politik (*Siyasah Syar'iyah*)

Seperti telah disinggung di awal, Islam telah memperkenalkan sistem bernegara (politik) sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dengan satu hasil rumusan perjanjian Madinah. Pada waktu itu sudah terbentuk kesatuan hidup politik di tengah masyarakat Madinah yang majemuk. Memang kala itu belum ada suatu konsep politik yang secara menyeluruh mengatur prihal pemerintahan.

41 Yusuf al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, terjemah: Setiawan Budi, (Jakarta: BI, 2001), hlm. 30.

42 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 50.

Akan tetapi Rasulullah SAW hanya mengaplikasikan potensi dan etika politik yang dijamin oleh wahyu disertai dengan ijtihad-ijtihad Rasulullah SAW sendiri dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Praktek politik seperti itu kemudian dilanjutkan oleh para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada masa klasik Islam sebelum munculnya konsep-konsep politik secara tertulis, telah muncul berbagai pandangan politik, pemikiran politik shi'ah, ahlu sunnah, dan Khawarij. Persoalan yang menjadi polemik berkepanjangan bahkan tanpa akhir pada masa itu adalah masalah kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah SAW yang mana masing-masing kelompok bertahan pada pendapatnya.

Gagasan konsepsi politik secara tertulis selanjutnya muncul pada masa pemerintahan Mu'tasim khilafah Abbasiyah ke delapan (833-842) yang ditulis oleh seorang yang hidup di Baghdad, bernama Syihabuddin Ahmad Ibn Rabi,⁴³ baru setelah itu muncul pemikir dan penulis politik Islam seperti al-Farabi, al-Mawardi, Imam Ghazali, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun, yang kemudian mereka dikenal sebagai pemikir dan penulis Muslim dalam persoalan politik Islam masa klasik.

Dalam konsep dan teori politik yang ditulis dalam buku-bukumereka banyak hal yang bisa diinventarisasi, antara lain misalnya asal mula tumbuhnya kota atau Negara, sistem pemerintahan, sistem pemilihan dan pemberhentian kepala Negara (khalifah), sampai pada persoalan *syura* (musyawarah) dan sebagainya.⁴⁴

Baru setelah itu muncul pemikiran politik Islam kontemporer⁴⁵ menjelang akhir abad ke-19, antara lain misalnya 'Ali 'Abd al-Raziq adalah anggota dari keluarga yang dikenal karena keterlibatan mereka dalam politik dan perannya dalam kepemimpinan dari salah satu aliran yang paling terkenal pada masa itu.

43 Syaraf Muhammad Jalal dan Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, (Iskandariyah: Dar al-Jami'ah al-Misriyah, 1978), hlm. 97.

44 Ahmad Sukardja, "*Fikih Siyasah*" dalam *Ensklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ihtiar baru van Hoeve, 2002), hlm. 221.

45 Para Pemikir politik Islam kontemporer dapat dicontohkan misalnya Jamaluddin al-Afghani (Pakistan, Mohammad Abduh (Mesir), Mohamad Rasyid Ridha (Mesir), Ali Abd. Riziq (Mesir), Abul A'la al-Maududi (India) Muhammad Husain Haikal (Mesir), dan Politikus Asal Indonesia Muhammad Natsir

yakni aliran yang mengupayakan modernisasi kehidupan politik, tanpa jatuh di dalam eksek nasionalisme populis.⁴⁶ Menurut Munawir Sjadzali munculnya pemikiran politik dikalangan ulama' Islam kontemporer tersebut karena dilatarbelakangi oleh:

- a. Kemunduran dan kerapuhan dunia Islam dikarenakan faktor internal
- b. Rongrongan dunia Barat terhadap kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam
- c. Keunggulan dunia barat terhadap dunia Islam dalam bidang ilmu, teknologi, dan organisasi.⁴⁷

7. Moderat dalam Pembaruan dan Ijtihad

Konsep moderasi Islam dalam pembaharuan dan ijtihad terlihat pada metode berfikir para ulama yang tetap mempertahankan hasil pemikiran ulama terdahulu sebagaimana terangkum dalam kaidah *al-Muhafadhatuh ala al-qadim al-shalih wa al-Ahdu bilJadid al-aslah* (memelihara hazanah lama yang baik sembari mengupayakan sesuatu yang baru yang lebih baik). Kaidah ini, memberikan peluang kepada umat Islam untuk melakukan pembaruan hukum terutama terhadap permasalahan kontemporer yang belum disentuh oleh ulama terdahulu.

Di sisi lain sifat moderat Islam dalam pembaruan menolak untuk terpisah dengan masa sekarang. Bagaimanapun struktur kehidupan masyarakat senantiasa dinamis, dan pasti mengalami perubahan, jika ajaran Islam menolaknya maka bukan tidak mungkin akan ajaran Islam akan kehilangan sifat akseptanilitasnya. Sebenarnya pembaruan dalam Islam telah memiliki mekanismenya sendiri, bahkan sudah menjadi *built in sistem*, karena Rasulullah SAW dan para sahabat telah melakukannya sesuai dengan kebutuhan dizama itu.⁴⁸

Pembaruan dan *Tajdid* dalam Islam yang dibangun melalui dasar-dasar yang kuat, mengakar ke pangkal syariat, terinspirasi dari khazanah keilmuan masa lampau, menggali sejarah, terkoneksi antara masa kini dan masa lampau, tidak menafikan pendapat ulama' salaf.

46 Abdou Filali-Ansary, *Pembaruan Islam, Dari Man Dan Hendak Kemana?*, Terj. Machasin, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 115.

47 Ahmad Sukardja, *Fikih Siyasah" dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm. 221.

48 Maimun Nawawi, *Reformasi Pemikiran Hukum Islam*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 18.

Bahkan seharusnya menjadikannya sumber dan mengembangkan ilmu-ilmu dan peradaban mereka, mengambil apa yang baik dari mereka dan membuang jauh-jauh yang tidak baik, sebagaimana ulama salaf mengatakan:

“ambillah yang jernih dan buanglah yang keruh dan memelihara pandangan lama yang masih baik, dan mengupayakan sesuatu yang lebih baik” (yahtafidhbikulli Qadim rasyid, wa yurahhib bikulli Jadid al-Shalih).⁴⁹

8. Bidang akhlak dan Perilaku

Ajaran Islam dalam akhlak dan perilaku juga menjunjung tinggi nilai-nilai moderat dalam pelaksanaannya. Dalam bidang ini ajaran Islam berada tengah-tengah antara paham idealis (*mitsaliyyin*) yang berkhayal terlalu tinggi bahwa manusia adalah malaikat atau sebangsanya, karena itu aliran ini menetapkan kaidah-kaidah akhlak dan perilaku yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Dan diantara aliran reliastis (*waqiiyyin*) yang memandang manusia sebagai hewan atau sebangsanya, sehingga aliran ini berkahlak dan berperilaku yang tidak pantas dilakukan oleh manusia, tapi lebih mirip dengan perilaku hewan.⁵⁰

Ajaran Islam memandang manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang tidak saja dikarunia akal namun juga syahwat. Pada diri manusia tersimpan dua jenis potensi, yaitu instink hewan dan bayangan malaikat. Karenanya manusia berpotensi untuk menjadi baik dan buruk secara seimbang. Karena memang penciptaannya dikaruniai potensi *fujur* (jahat) dan potensi *takwa* (baik), hanya upaya-upaya yang mampu mengarahkan kepada manusia ke jalan yang benar.⁵¹

H. Sumber Moderasi Beragama di Indonesia

Ketika Adam hidup di surga dengan segala anugerah dan fasilitas yang ada. Namun dia tetap merindukan kehadiran sosok yang dapat mendampinginya menjalani tapak kehidupan dan beribadah kepada Allah SWT., Diciptakanlah Hawa sebagai ibu ummat manusia.

49 Al-Qardhawi, *Fiqh al-Washthiyyah*, hlm. 148.

50 *Ibid.*, hlm. 36.

51 Lihat surah Al-Syams ayat 10.

Mereka dipersatukan dalam talian pernikahan disaksikan oleh para malaikat ketika itu, meskipun pada akhirnya mereka berdua harus diturunkan ke bumi karena melakukan tindakan yang melampaui batas. Surga sebagai interpretasi fasilitas atau sarana dan prasarana yang dapat memenuhi semua kebutuhannya, namun pada akhirnya manusia harus bersimpuh bahwa siapapun tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Laki-laki membutuhkan wanita. Murid membutuhkan bimbingan guru, bahkan para sarjana yang memiliki kedalaman ilmupun dapat merengkuh berbagai kesuksesan sebab didukung oleh kehadiran orang lain. Hikmah diturunkannya Adam AS dan Siti Hawa menjadi awal menyebarnya keturunan umat manusia di muka bumi, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

Jauh sebelum datangnya penyebaran agama dari luar Indonesia, masyarakat telah berinteraksi dengan sebuah sistem kepercayaan yang dipandang sebagai sistem kepercayaan prasejarah. Kepercayaan ini meskipun dari segi jumlah penyebar tidak ada data riil, namun penganutnya pada masa awal keberadaan manusia telah tersebar pada berbagai wilayah di dunia. Aliran kepercayaan yang dimaksud di sini adalah Suatu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari wahyu Tuhan (*samawi*), namun bersumber pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spriritual kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa dan daya karsa dan hasil karya manusia.⁵² Kepercayaan ini terdiri dari percaya kepada potensi manfaat dan mudharat roh (*animisme*), percaya kepada adanya potensi manfaat dan mudharat pada benda, makhluk (*dinamisme*) serta kepercayaan bahwa makhluk diluar manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan dan memiliki kemampuan tersendiri namun manusia tidak memilikinya (*totemisme*)⁵³

52 Nandan Iskandar, Amelya Gustina, dkk, *Penguatan Peran Intelijen dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Kagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) demi Ketertiban dan Ketentraman Umum*, hlm.22.

53 Webster memberikan definisi totemism, *belief in kinship with or a mystical relationship between a group or an individual and a totem <~ ... derives whole tribes or families from an animal or plant -- International Encyclopedia <with the idea of the powerful animal ~ is closely connected.* (Totemism adalah kepercayaan adanya hubungan mistik antar kelompok atau individu, totem juga berarti jenis suku tumbuhan dan hewan). Praktik totem ini menjadikan spesies flora dan fauna tertentu sebagai makhluk sakral, memiliki kekuatan yang dapat dinisbahkan kepada manusia, sehingga tidak boleh ditebang, dimakan atau menggunakan tenaganya membantu manusia.

Meskipun keberadaan tiga kepercayaan tersebut berkembang pada zaman prasejarah namun praktek dan penganutnya masih ada sampai sekarang. Hal ini pula yang menjadi dasar sehingga transmisi agama setelah periode prasejarah berakhir, telah memiliki ruang pondasi “benih-benih ketuhanan” dalam masyarakat. Hal ini akan kontras, jika menyampaikan moderasi beragama pada masyarakat yang tidak meyakini adanya “Tuhan” sama sekali.

hampir semua umat manusia mempercayai adanya Tuhan yang mengatur alam raya ini. Orang-orang Yunani kuno menganut paham politeisme (keyakinan banyak Tuhan): Bintang adalah Tuhan (Dewa), Venus adalah (Tuhan) Dewa Kecantikan, Mars adalah Dewa Peperangan, Minerva adalah Dewa Kekayaan, sedangkan Tuhan tertinggi adalah Apollo atau Dewa Matahari. Orang-orang Hindu masa lampau juga mempunyai banyak dewa, yang diyakini sebagai Tuhan-Tuhan. Keyakinan itu tercermin antara lain dalam Hikayat Mahabarata.⁵⁴

Secara garis besar pola keyakinan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa terbagi dua yakni agama dan aliran kebatinan. Agama dalam negara telah mendapat status dan identitas spesifik. Sehingga nama, tempat ibadah dan seluruh aktivitas umatnya dapat dilembagakan dengan baik. Hal ini belum terjadi pada dimensi aliran kebatinan. Terdapat beberapa faktor, sehingga tidak mudah memberi identitas spesifik dalam undang-undang tentang aliran kebatinan. Faktor tersebut antara lain jumlah aliran kebatinan berpariasi demikian pula dengan jumlah penganutnya. Meskipun demikian, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penjabarannya ada dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan Pancasila, tetap memberikan ruang aktivitas bagi penganut aliran kebatinan. Dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965, selain 6 agama resmi terdapat juga ruang untuk badan/ aliran kebatinan. Terhadap badan/ aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan karah Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁵

54 Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu’I*, hlm. 14 .

55 Lihat Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.

Hal ini menjadi nilai lebih sikap moderasi beragama masyarakat Indonesia. Penggunaan idiom, badan/ aliran kebatinan secara adalah bahasa yang bersifat umum untuk mengakomodir berbagai faham yang masih ada di masyarakat. Penting pula diketahui bahwa di luar 6 agama yang tercantum dalam undang-undang, masih terdapat agama dari nusantara, meskipun jumlah penganutnya masih relatif, kepercayaan lokal dan aliran kebatinan tetap ada. Berdasarkan artikel dari Tirto.id.⁵⁶ Pada tahun 2013 Indonesia, masih terdapat 400 ribu orang penganut agama nusantara, dan 25% diantaranya beragama Buhun. Berikut agama dan faham yang ajarannya masih ada sampai sekarang:

1. Sumatera, ada Parmalim dan Mulajadi Nabolon
2. Kenekes Banten ada Sunda Wiwitan
3. Kuningan Jawa Barat, Agama Jawa
4. Jawa Barat ada, agama Buhun
5. Jawa Tengah Jawa Timur Kejawen, Pirwoduksino, dan Budi Luhur
6. Bali. Hindu Bali atau Hindu Dharma
7. Lombok, Wetu Telu
8. Pulau Sumba, Merapu
9. Kalimantan ada Kaharingan
10. Sulawesi Selatan ada Tolotang dan Aluk Todolo
11. Sulawesi Utara, Pahkampetan
12. Minahasa Sulawesi Utara, Tonaas Walian
13. Pulau Seram Maluku, Naurus

Nama agama di atas belum termasuk, cabang-cabang aliran yang terkandung di dalam setiap ajarannya. Berangkat dari hal ini Indonesia masih memiliki dan menjadi bukti bahwa khazanah agama dan budaya Indonesia sangat beragam. Keberadaan aliran agama/ kepercayaan meskipun tidak terperinci secara detail nama dan identitas mereka dalam undang-undang, namun pemerintah tetap memberikan ruang untuk aliran agama/ kepercayaan tersebut.

⁵⁶ Tirto.id. dengan motto “Jernih, mengalir, mencerahkan bersama” merupakan lembaga online yang memiliki lisensi dari Dewan Pers Indonesia yang beranggotakan dari berbagai profesi. Terbuka untuk semua golongan dan tidak bekerja untuk kepentingan politik.

Melaksanakan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan kepercayaan mereka.⁵⁷ Pada tahun 1953 Departemen Agama menyampaikan laporan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/ kepercayaan.⁵⁸ Seiring perputaran waktu, aliran agama/ penganut kepercayaan mengalami penyusutan jumlah karena berbagai faktor alamiah dan ilmiah namun, pengamalan ajaran tersebut menunjukkan bahwa sikap moderasi beragama telah lebih awal mereka implementasikan jauh hari sebelum tema “moderasi agama” menjadi tema diskusi, seminar dikemudian hari. Dengan memperhatikan berbagai fakta diatas maka dapat dibuat sebuah deskripsi bahwa moderasi beragama di Indonesia bersumber dari tiga bagian yakni budaya, aliran kepercayaan, dan agama.

Budaya, aliran kepercayaan, dan agama, terintegrasi dalam masyarakat Indonesia, sehingga antara satu dengan bagian lainnya memiliki keterkaitan. Ketika membicarakan moderasi beragama di Indonesia maka dapat dilihat pada sisi budaya, aliran kepercayaan dan agama. Ketiga sisi ini telah menjiwai sikap moderasi beragama masyarakat di Indonesia. Keberadaan budaya, aliran kepercayaan, dan agama di masyarakat sampai saat ini masih sangat kental, pembauran ketiganya mudah ditemukan. Pada acara formal maupun non formal, unsur budaya seperti tari-tarian, pakaian adat, senantiasa dihadirkan. Demikian pula pada kegiatan pembersihan senjata pusaka kerajaan, peletakan batu pertama pada bangunan baru, membangun jembatan baru, meresmikan kendaraan atau rumah baru maka unsur agama dan aliran kepercayaan akan hadir pula didalamnya.

Meskipun Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan tahun 2019 sebagai tahun moderasi, namun secara fakta masyarakat Indonesia telah lebih awal mengamalkan moderasi beragama dengan melalui tiga sumber dalam diagram tersebut diatas. Ketiga unsur tersebut senantiasa saling mengakomodasi dan memperoleh tempat yang sama. Keistimewaan pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia karena masih memiliki masyarakat dengan latar beragam.

57 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.

58 Nandan Iskandar, Amelya Gustina, dkk, Penguatan Peran Intelijen dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Kagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) demi Ketertiban dan Ketentraman Umum, hlm. 27.

Agama yang tersebut dalam undang-undang ada 6 buah, aliran kepercayaan/ kebatinan masih ada juga puluhan belum lagi cakupan ragam budaya yang melimpah. Ketiganya memiliki kontribusi dalam membangun moderasi beragama.

Agama sebagai bagian dari moderasi beragama, dalam prespektif pendidikan Islam menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Meskipun kaum orientalis berpendapat bahwa al-Qur'an adalah hasil akumulasi keunggulan tutur lisan dari bangsa Arab dan bagian dari budaya yang telah diwariskan secara turun temurun, namun al-Qur'an sendirilah yang mengungkapkan kemukjizatannya yang diwahyukan melalui Rasulullah SAW. Melaksanakan moderasi beragama dengan baik harus bersumber dari ajaran, atau pedoman yang berisi kebenaran. Air yang jernih yang dapat mencukupi kedahagaan mahluk, senantiasa berhulu dari mata air yang bersih pula dan al-Qur'an menjadi sumber dari segala kebenaran tersebut. Tidak ada pertentangan kandungan, baik dikaji dari sudut faktual maupun gugusan berfikir secara rasional.

Agama menjadikan kitab suci sebagai dasar dalam beragama, sehingga umat tidak perlu membuat gerakan tambahan ajaran moderasi beragama mengikuti pergerakan permintaan zaman. Lebih tepatnya adalah sumber moderasi beragama di Indonesia memiliki penyesuaian untuk diserap ke dalam kehidupan modern. Jika ada sumber atau pedoman yang sejak kemunculannya mengalami perubahan narasi secara periodik karena perubahan zaman atau memiliki beberapa versi maka "kebenaran yang otentik" kandungannya akan sangat menarik untuk didiskusikan. Rahmat Kurnia dalam bukunya, *Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif* mengungkapkan, Bahwa secara faktual al-Qur'an adalah kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW. dan berbahasa Arab, maka secara rasional hanya ada tiga kemungkinan asal al-Qur'an. Pertama karangan bangsa Arab, kedua karangan Rasulullah SAW dan ketiga berasal dari Allah SWT.⁵⁹

59 M. Rahmat Kurnia dkk. *Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif*, Cet.I, (Bogor: AlAzhar Press, 2004), hlm. 63.

Lebih lanjut diuraikan dalam tulisan tersebut menyatakan, jika al-Quran adalah karangan bangsa Arab dengan argumen bahasanya menggunakan bahasa Arab dan awal penyebarannya secara bertahap kepada suku-suku di Arab Mekkah maka hal alasan ini tidak memiliki landasan yang kuat. Sebab jika hal tersebut benar, maka orang Arab yang terkenal dengan kemampuannya bersyair dapat menyusun satu surah atau satu ayat saja yang mampu bersanding dengan teks dan kandungan al-Qur'an. Namun sepanjang sejarah, negeri para penyair ini tidak ada satupun yang dapat membuat kalimat semisal ayat dalam al-Qur'an. Pasca wafatnya Rasulullah SAW., Musailamah al-Kadzab mengklaim diri sebagai Nabi, dan telah memperoleh wahyu dan menyampaikan kepada kaumnya. Suatu ketika Amru bin Ash berdialog dengan Musailamah, tentang Surah Al-Ashr yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Musailamah pun kemudian menyampaikan kepada Amru bin Ash bahwa dia telah menerima surah yang sejenis.

Musailamah meminta pandangan Amru bin Ash tentang surah tersebut, Amru bin Ash menyatakan, Demi Allah SWT, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalau kamu berdusta.”

Argumen kedua, al-Qur'an adalah karangan Nabi Muhammad SAW. hal ini juga tidak rasional. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad SAW adalah seorang yang *ummi* (tidak memahami baca tulis) meskipun demikian beliau memiliki hati yang bercahaya. Pada era awal kenabian Rasulullah SAW. wahyu dicatat bukan oleh beliau sendiri namun didampingi oleh para sahabat. Komparasi narasi dan arti dua sumber utama ajaran Islam yakni al-Qur'an dan sunnah, maka akan didapatkan keduanya memiliki gaya bahasa tersendiri. Posisi hadis pun adalah sebagai penjelas hal yang bersifat operasional kandungan al-Qur'an. Jadi alasan kedua juga ini tidak faktual dan rasional.

Argumen ketiga, al-Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT, dan hal ini menjadi pondasi keimanan umat Muslim yang terangkum dalam indikator keimanan umat Islam yakni rukun Imam. Beberapa fakta yang menguraikan kemukjizatan al-Qur'an adalah dari segi teks dan isi tetap konsisten dari sejak diwahyukan sampai saat ini. Al-Qur'an mengandung hal-hal yang misterius pada dikemudian hari satu persatu

terbukti melalui riset dan ilmu pengetahuan. Pembahasan masalah reproduksi dan asal muasal manusia dari sel telur, menjadi segumpal darah, daging, ditopang tulang pada masa itu (1400 Tahun yang silam) adalah pembahasan yang tidak pernah terpikirkan, namun al-Qur'an telah mengulasnya secara detail dan rinci. Fakta selanjutnya adalah al-Qur'an dapat dibacakan dalam semua kondisi. Beda dengan teks yang lain. Jika isinya menyerukan tentang cinta dan kebahagiaan maka tidak tepat jika disampaikan pada saat orang dalam keadaan berduka. Jika narasinya adalah tentang duka dan kemalangan maka tidak patut dibacakan pada kondisi orang sementara bergembira seperti pernikahan atau menyambut kelahiran anak. al-Qur'an tidak demikian. Pada kondisi bahagia atau kondisi duka, sendiri atau berjamaah, laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, kondisi cuaca cerah atau mendung, masa perang atau masa damai al-Qur'an tetap dapat dihadirkan sebagai bacaan yang bernilai ibadah, memberi manfaat bagi pembacanya dan yang mendengarkannya. Menyentuh mushaf dan membacanya harus dalam kondisi suci. Kokohnya al-Qur'an dalam segala dimensi sehingga kitab tersebut menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan dan sumber sikap moderasi beragama umat Islam. Meskipun al-Qur'an adalah kitab bagi umat Islam namun tetap berisi ajaran untuk tetap membangun relasi yang baik dengan manusia secara keseluruhan baik yang sesama maupun lintas agama. Sumber moderasi beragama selain kitab suci adalah dari aliran kepercayaan yang sampai saat ini masih terawat dengan baik.

Berbagai hasil penelitian memberikan informasi tentang pengamalan sikap moderasi beragama yang dilakukan oleh aliran agama/penganut kepercayaan. Hasse J, dkk dalam artikelnya, Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia Studi atas Persolan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi menulis, La Gugu (50 tahun) yang telah menyelesaikan pemasangan atap masjid al Mujahidin Bola Bulu. Menurutnya, panitia pembangunan masjid yang langsung menghubunginya. Lanjut dia, permintaan tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan kapasitasnya sebagai penganut Towani Tolotang⁶⁰

60 owani Tolotang adalah agama lokal yang berkembang di Kelurahan Amparita Lama, Kecamatan Tellu Limpue, Kabupaten Sidenreng Rappaang, Sulawesi Selatan. Towani Tolotoang mengakui adanya Tuhan yakni "Dewata Sewwae" yang disebut "Patotoe" dan mempercayai kehadiran La Panaungi sebagai penerima wahyu dari Dewata Sewwae. Lihat Jamaluddin Iskandar, "Kepercayaan Komunitas Tolotang" al-Tadabbur, Volume V No. 1 (Juni 2019): hlm.87-88.

Dalam hubungan yang bersifat professional yakni profesinya sebagai tukang kayu yang bisa memasang atap seperti yang sedang dibutuhkan oleh panitia pembangunan masjid.⁶¹ Lebih lanjut dalam tulisan tersebut disebutkan Launga Setti, dari kecil, generasi Towani Tolotang memang telah ditanamkan sikap-sikap seperti itu (persatuan di internal kelompok) yang tidak hanya terbatas pada persoalan keagamaan, tetapi juga sosial kemasyarakatan. Ini menunjukkan bahwa, pihak luar pun (Muslim) mengakui soliditas dan solidaritas internal Towani Tolotang.⁶² Asep Lukman Hakim dalam Politik Identitas Agama Lokal, menulis tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan (AKP) sebagai suatu ajaran yang berbasiskan agama warisan leluhur (karuhun) di masyarakat Sunda Lebak Banten (Sunda Wiwitan). Ajaran AKP sebagaimana yang tertuang dalam Dasa Wasita menunjukkan sikap penghayat kepercayaan yang toleran, terbuka dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jati diri dan kepribadiannya tersebut berbasis pada Sunda Wiwitan.⁶³ Asep lukman hakim juga menyampaikan bahwa AKP hidup berbaaur dengan masyarakat sekitarnya. Towani Tolotang dan Sunda Wiwitan adalah beberapa bagian dari agama nusantara yang penganutnya masih ada sampai saat ini.

Bidang lektur Khazanah Keagamaan Balai Litbang Makassar dalam Laporan Tahunan 2019 Hal Moderasi Beragama dalam Tradisi Lisan Masyarakat suku Bajau Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, menulis sebuah artikel tentang Akbaruga. Tradisi Akbaruga adalah tradisi lisan semacam yang dilaksanakan setiap bulan Sya'ban. Proses akbaruga terdapat sastra lisan berupa aruk, sumpah, dan tarian. Posisi moderasi beragama dalam tradisi ini adalah ujaran dalam teks yang mengajak seluruh elemen pesta untuk saling menjalin keutuhan dan kebulatan bersama, namun tetap menjunjung tinggi musyawarah, dalam prinsip kebijaksanaan hidup berdampingan antara warga, raja, dan penganut kepercayaan yang berbeda, untuk senantiasa saling menghargai satu

61 Hasse J, dkk., "Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi" Kawistara, Volume 1 No (2 Agustus 2011): hlm. 183.

62 Hasse J, dkk., "Diskriminasi Negara terhadap Agama di Indonesia Studi atas Persoalan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi, hlm. 183.

63 Asep Lukman Hamid, "Politik Identitas Agama Lokal Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung" al-Afkar, Volume 1 No.2 (July 2018), hlm. 120.

sama lain.⁶⁴ Potensi agama, aliran dan kepercayaan ini diintegrasikan kedalam sebuah media negara yang menjadi pedoman utuh yang berlaku dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara dan menjadi dasar negara yakni Pancasila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala hukum, dan perjanjian luhur masyarakat Indonesia.

Pancasila formal mempunyai akar yang dalam pada sejarah, peradaban, agama, hidup, ketatanegaraan, kegotongroyongan, struktur sosial, dari masyarakat Indonesia yang diciptakan oleh kebudayaan dan aliran pemikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.⁶⁵

Pada daerah lainpun masih terhampar banyak jumlah kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Dari berbagai sumber dan realitas yang ada, dapat dirajut sebuah benang merah bahwa Indonesia memiliki khazanah moderasi beragama yang bersumber dari ajaran agama, aliran kebatinan dan kearifan lokal. Sebuah sinergitas yang perlu dirawat dan diberikan apresiasi melalui riset ilmiah dan mengangkatnya ke ranah publik.

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang membentang dari wilayah Timur sampai Barat. Potensi darat, air, dan udara di Indonesia terbilang di atas dibanding dengan tempat dan negara lain. Satwa Indonesia juga tergolong endemik⁶⁶ dan beberapa diantaranya langka. Faktor keanekaragaman hayati menyebabkan kondisi lingkungan dan kepercayaan antara satu tempat dengan tempat lainnya beragam pula. Masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan mempercayai bahwa gunung dapat diajak berdialog sehingga sebelum terjadi bencana seperti gunung meletus, atau longsor maka penjaga gunung akan mendapat pesan “wangsit” agar persembahan segera digelar. Demikian pula dengan mahluk khusus memiliki tempat tersendiri dalam kepercayaan masyarakat.

64 Laporan Tahunan 2019 Hal Moderasi Beragama dalam Tradisi Lisan Masyarakat, Bidang lektur Khazanah Keagamaan Balai Litbang Makassar, hlm. 3-4.

65 Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Cet.9, (Yogyakarta: Kanisius, :2009), hlm.17.

66 Endemik adalah flora dan fauna yang hanya ada dan ditemukan pada satu wilayah tertentu saja. Seperti, Beo Nias di Sumatera, Beruk Mentawai di Mentawai, Komodo di Rinca Pulau Flores, Anoa di Sulawesi, Burung Bidadari Halmahera di Halmahera Maluku Utara.

Jika diperhatikan pada rumah kuno atau kompleks rumah adat akan dilihat berbagai lukisan atau ukiran yang menampilkan berbagai makhluk atau hewan yang dianggap sakral. Diantara makhluk tersebut adalah burung garuda.

Korelasi Moderasi beragama dengan Pancasila seperti hubungan mata air dengan tumbuhan. Pancasila adalah mata airnya dan moderasi beragama adalah beragam tumbuhan yang hidup karena “berkah” air tersebut. Pancasila lahir dari airmurni budaya religius Indonesia dengan menggunakan burung elang jenis garuda sebagai lambangnya dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* berbeda namun tetap satu dalam pita yang tercengkram kuat dikakinya.

Pada negara lain, burung elang juga menjadi bagian lambang negara atau bendera seperti negara Yaman, Mesir, Yordania, Irak, Jerman, Kirgistan, Namibia, Amerika Serikat, Austria, Armenia, Albania, Thailand dan lain-lain. Namun Garuda Pancasila di Indonesia memiliki kekhasan sebab telah menunjukkan kesaktiannya dengan menyatukan berbagai latar suku, agama, ras dan kepercayaan kedalam satu kesadaran nasional yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghadapi goncangan-goncangan nasional sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini. Langkah yang sangat tepat jika sila dalam Pancasila senantiasa dikumandangkan pada saat upacara, dari lembaga pendidikan tingkat dasar sampai tingkat lembaga negara. Korelasi Pancasila dengan moderasi beragama ada pada setiap jiwa Pancasila. Ulasannya dapat diperhatikan sebagai berikut:

1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menjadi pembuka yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara beragama yang percaya kepada Tuhan. Negara berdasarkan kepada Tuhan Yang Esa demikian yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Termaktub dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 bahwa Agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Cu (Confusius).⁶⁷

⁶⁷ Lihat Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama

Pondasi inilah yang mengakibatkan faham-faham bersebrangan dan tidak mempercayai Tuhan, tidak diberi ruang bernafas sama sekali, atau kesempatan tumbuh walau hanya barang sekejap di wilayah Indonesia. Keyakinan dan beragama bukan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, namun telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Benih-benih kepercayaan kuno animism, dinamisme, totemisme, prakteknya masih dapat ditemukan sampai saat ini. Tempat keramat, pohon keramat, keris keramat sampai pada cincin keramat menjadi khazanah tersendiri dalam studi kepercayaan dan budaya Indonesia.

Masyarakat sangat menyadari peranan agama dalam kehidupan. Sehingga materi agama dan dasar ideologi kepercayaan kepada Tuhan telah mulai ditanamkan dan diajarkan kepada keluarga sejak kecil, diajarkan di sekolah serta disemarakkan di masyarakat. Kalender resmi pemerintah tiap tahun menerbitkan surat keputusan bersama menteri untuk mengakomodir berbagai perayaan hari raya keagamaan atau tahun suci keagamaan. Surat ini dituangkan dalam hari libur cuti bersama yang ditandatangani oleh Tiga Menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Agama dan Menteri ketenagakerjaan. Sila ini, menggunakan bintang dengan warna emas sebagai isyarat bahwa Yang Maha Esa dalam segala manifestasinya mendapat posisi yang tertinggi dalam kehidupan masyarakat.

2. Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan, keadilan dan adab merupakan bagian inti dari moderasi beragama. Moderasi beragama senantiasa menghadirkan manusia dengan sikap yang adil baik kapasitasnya sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin dalam negara. Semua latarbelakang mendapat perlakuan yang istimewa baik dalam pelayanan di sarana publik atau perlakuan di wilayah yang sifatnya privasi. Keadilan juga berarti bahwa seluruh aktivitas ibadah dan aliran kepercayaan mendapat tempat yang sama di dalam landasan konstitusi. Hal ini merupakan pemaknaan dari lambang sila kedua yakni rantai emas (tersusun dari gelang yang berbentuk lingkaran dan segi empat). Bahwa kemanusiaan merupakan mata rantai yang dapat menyatukan masyarakat yang memiliki latar keragaman dan keberagaman.

Pengimplementasian moderasi beragama pada sila kedua, Keadilan Sosial bagi seluruh Masyarakat Indonesia dapat dilakukan bersikap sopan dan santun kepada semua orang, saling melengkapi dalam kekurangan, saling membenahi di dalam kecukupan. Aktif dalam kegiatan amal serta donasi kepada mereka yang membutuhkan.

Pemerintah dan masyarakat diuar agama/ aliran kepercayaan tersebut, memberikan sikap kooperatif dan toleransi keberadaan mereka. Tolotang dan Aluk todolotetap dapat hidup harmonis dengan penduduk agaam di Sulawesi Selatan, demikian pula dengan faham dan kepercayaan di wilayah lainnya. Respon kehidupan harmonis dan berdampingan ini, akan sangat berbeda jika dalam masyarakat ada diantara masyarakat yang beragama dengan faham/ aliran anti agama. Jika Jika hal ini, lebih diangkat lagi pada forum ilmiah Internasional, maka Indonesia merupakan destinasi utama, riset budaya dan agama.

3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Sila ini, menggunakan gambar pohon beringin sebagai lambang persatuan Indonesia. Pohon Beringin merupakan jenis pohon dari family moraceae keluarga pohon nangka. Deskripsi fisik pohon beringin memiliki dahan yang kokoh dan daun yang rindang. Hal memberi kesan bahwa kerindangan pohon merupakan tempat berbagai faham, dan aliran yang ada dalam masyarakat dapat sama-sama berteduh atau hidup harmonis. Karakter fisik yang lainnya adalah memiliki akar yang terhujam jauh di didalam tanah dan menjadi pohon yang dapat menyimpan air dan menahan erosi. Hal ini memberikan isyarat bahwa persatuan berakar dari keragaman budaya Indonesia yang menjadi modal memajukan bangsa. Nasionalisme atau kebangsaan adalah paham yang meyakini kebenaran fikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu padu dalam komunitas politik⁶⁸ Kemerdekaan yang diperoleh setiap negara termasuk Indonesia setelah berada dalam cengkraman penjajah, menjadi fakta bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat perjuangan, persatuan dan semangat memiliki (*sense of belonging*).

68 Ali Machsan Moesa, *Nasionalisme Kiai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, Cet. I, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 32.

Konteks Semangat memiliki Indonesia pada masa sekarang bukan lagi memanggul senjata dimedan perang, namun bersatu berjuang melawan keterbelakangan, kemiskinan dan ancaman disintegrasi bangsa.

Persatuan adalah kekuatan. Masyarakat bersatu karena mereka memiliki latar berbeda namun satu keinginan hidup yang pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan dan turut mencipatakan perdamaian dunia. Tanpa persatuan maka faham-faham sesat akan tumbuh liar satu persatu dan pada kondisi akut mangancam generasi bangsa. Terdapat momentum bersejarah dalam membangun persatuan Indonesia yakni ikrar Sumpah Pemuda yang diperingati sebagai hari besar kenegaraan yang diperingari setiap tanggal 28 Oktober setiap tahun dengan harapan semangat persatuan dan kebangsaan tetap terpatri. Sokearni menyatakan, mari kita perhatikan bagaimana, jiwa moderasi yang dibangun kelompok pemuda dan pelajar dalam kegiatan Kongres Pemuda Indonesia. Selain Organisasi terdiri dari pemuda-pemuda dengan berbagai latar belakang, suku, agama, tradisi dari wilayah timur, tengah dan barat. Jong Java, Jong Ambon, jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatera nen Bond, adalah beberapa perhimpunan pemuda yang hadir dalam kongres Pemuda I pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928.

Kebangkitan Islam indonesia sejak permulaan abad ke-20 merupakan bagian dari kebangkitan nasional. Jadi sejak semula orang-orang Muhammadiyah dan NU tidak hanya merasa Muslim, melainkan juga indonesia. begitu pula, bahwa Kristianitas, protestan dan Katolik, diterima begitu baik di pangkuan bangsa tanpa dipersoalkan kaitannya dengan penjajah itu sama saja karenamereka sejak tahun 1920-an aktif terlibat dalam gerakan kemerdekaan.⁶⁹

Hal ini dapat diperhatikan dengan penegasan mereka di teks sumpah pemuda yang mejadi hari besar kenegaraan yang diperingati tiap 28 Oktober.

69 Franz Magnis Suseno,SJ,dkk. *Agama, Keterbukaan dam Demokrasi Harapan dan Tantangan*, Cet.I (Jakarta Selatan: Paramadina, 2015), hlm. 15.

Teks sumpah pemuda awalnya menggunakan ejaan van ophuysen yang dominan menjadikan huruf vocal “u” tertulis “oe” seperti kata soempah menjadi sumpah, pemoeda untuk pemuda, poetra dan poetri menjadi putra dan putri, kemudian menyesuaikan dengan ejaan baru.

Sumpah Pemuda

Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia

Terdapat fakta menarik, Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 memberikan keterangan bahwa jumlah suku di Indonesia berjumlah 1331 suku. Tiap-tiap suku memiliki sub-suku atau anak dari suku besar yang ada. Jumlah suku tersebut memiliki bahasa tersendiri yang memerlukan translator atau ilmu bahasa setempat sebagai sarana komunikasi. Berkah kehadiran berbagai pemuda pada kongres pemuda ke-9 di Solo, kita dapat saling menyapa menggunakan salah media pemersatu yakni bahasa persatuan. Kongres pemuda ke-9 di Solo tanggal 27-31 Desember 1926 semakin memperkuat semangat kemerdekaan dengan memutuskan pedoman besar besar Jong Java agar bahasa Melayu lebih banyak dipergunakan yang kemudian dinamakan bahasa Indonesia.⁷⁰

Membangun persatuan melalui bahasa Indonesia merupakan media strategis untuk lebih mengharmoniskan lagi berbagai agama dan faham yang ada di masyarakat. Soekarno menyatakan, “Jangan mewarisi abu sumpah pemuda, tapi warisilah api sumpah pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, tapi ini bukan tujuan akhir.”

⁷⁰ Sri Surdaniyatun, *Makna Sumpah Pemuda*, Cet.I, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2012), hlm. 3.

Sikap moderasi beragama yang tercermin dari sila ketiga persatuan dapat dilakukan dengan tetap berinteraksi dengan berbagai latar beragama dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, menghormati rumah peribadatan, dan menghindari hal-hal yang dapat menyulut penodaan atas nama agama.

4. Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan bahwa melalui permusyawaratan akan diperoleh hikmah dan kebijaksanaan. Permusyawaratan dalam hal ini bermakna luas mulai dialog, diskusi, audiens, sharingsession, kongres, muktamar sampai sidang istimewa. Permusyawaratan merupakan media ampuh dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi. Keputusan yang diambil dari musyawarah melahirkan kesepakatan atau mufakat dan manfaatnya dapat dirasakan bersama. Semakin banyak masukan yang berkualitas maka semakin utuh pula hasil mufakat yang diperoleh.

Penggunaan kepala banteng menjadi lambang sila ini dengan maksud bahwa banten merupakan makhluk yang senantiasa hidup berkelompok dan bersosialisasi, memiliki kekuatan sebagai simbol potensi masyarakat dan wilayah. Pelaksanaan permusyawaratan dalam sila ini menegaskan kehadiran berbagai perwakilan atau latar menjadi jalan untuk memperoleh hikmah dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada masyarakat tradisional, musyawarah pun menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dalam berbagai hal. Turun ke sawah, membuka lahan baru, pernikahan, acara adat, semuanya senantiasa diawali dengan musyawarah. Meskipun jauh dari kesan formal seperti spanduk, pembacaan tata tertib, moderator, narasumber serta panitia pelaksana, kegiatan musyawarah tetap terlaksana dengan khidmat dan suasana sederhana. Kaum laki-laki yang berusia belia akan mempersilahkan duduk kepada kaum yang lebih sepuh umurnya. Sedangkan kaum wanita ada yang duduk dalam musyawarah, sebagian yang lain mempersiapkan konsumsi tradisional sebagai fasilitas musyawarah. Hal ini merupakan realitas bahwa masyarakat Indonesia, sejak awal telah memiliki sebuah wadah pengambilan keputusan (*decision making*) berupa musyawarah.

5. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Terdapat dua kata keadilan dalam Pancasila yakni termaktub pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil memiliki persamaan arti dengan moderat yakni tidak berada di kiri tidak di kanan, seimbang, posisi di tengah-tengah. Sehingga dengan demikian para pendiri Pancasila sangat memahami kondisi keragaman masyarakat, masa depan Indonesia dengan senantiasa menjunjung sikap moderat dalam menetapkan teks sila Pancasila. Diantara tujuan berbangsa dan bernegara menciptakan keadilan sosial.⁷¹ Penggunaan padi dan kapas dalam sila ke lima tersirat kekuatan pangan dan ekonomi. Sehingga masyarakat Indonesia bukan hanya mapan dari segi pangan namun memiliki pula Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.

Kekuatan narasi dan makna batin yang ada dalam sila Pancasila, telah menjadi ruh kehidupan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjung tinggi nilai kemanusiaan, adab, membangun persatuan dan kesatuan, senantiasa bermusyawarah, dan berkeadilan sosial inilah wajah bangsa Indonesia. Kata kemanusiaan, keadilan, musyawarah memiliki arti bahwa dalam menjaga kesatuan dan bangsa ini senantiasa memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan, keadilan sosial yang ditetapkan dalam musyawarah. Keadilan merupakan salah satu sifat mulia Tuhan yang terkandung dalam sila pertama yakni ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap manusia mengharapkan keadilan sosial menjadi kondisi yang mewarnai kehidupan. Keadilan sosial dalam memperoleh pendidikan yang layak, fasilitas perawatan kesehatan yang memadai, sampai keadilan sosial dalam melaksanakan peribadatan. Tersedianya bahan bacaan dengan berbagai tema tentang kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia pada sekolah dasar merupakan wujud perhatian pemerintah agar keadilan sosial telah diperkenalkan sejak dini kepada peserta didik.

71 Lihat Preambule Undang-undang Dasar 1945.

Bangsa Indonesia membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama, karena keragaman dalam beragama itu niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya tiga alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama:

Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawamisi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas, menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebihan. Jadi dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragama, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh

kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka, konflik pun tidak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan, jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang.

Selain dari tiga poin besar di atas, bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, dan tidak berlebih-lebihan, merupakan sikap beragama

yang paling ideal. Kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi yang mendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al Azhar, Syekh Ahmad el-Tayyeb, pada 4 Februari 2019 lalu. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*), yang di antara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut (*fanatic extremism*), hasrat saling memusnahkan (*destruction*), perang (*war*), intoleransi (*intolerance*), serta rasa benci (*hateful attitudes*) di antara sesama umat manusia, yang semuanya mengatasnamakan agama. Sejumlah peristiwa kekerasan di berbagai negara menegaskan betapa ekstremisme dan terorisme bukan monopoli satu agama dan tidak mendapatkan tempat dalam agama mana pun. Ancaman teror dan kekerasan sering lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan esktrm seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan, dapat muncul dari siapa saja, tanpa melihat afiliasi agamanya. Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Itu mengapa perlu moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan.

Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Moderasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kelompok beragama yang ultra-konservatif dan liberal, untuk sama-sama mencari persamaan dan titik temu di tengah, menjadi umat yang moderat.

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam menyusun norma-norma sosial kemasyarakatan. Agama di satu sisi menuntut penganutnya untuk bersikap eksklusif. Tapi pada sisi lain, agama juga mengajarkan sikap inklusif atau terbuka. Agama hadir dalam upaya menjaga, melindungi hak hidup masyarakat, serta untuk melindungi hajat hidup manusia. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan bidang agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional, melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional, yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur.”

Dibanding negara-negara lain, Indonesia sangat beruntung memiliki sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan harmoni dan demokrasi. Hal ini telah mendapat pengakuan luas dari masyarakat global, khususnya dari negara-negara yang juga plural dan multikultural tapi tidak memiliki ormas keagamaan seperti di Indonesia. Tokoh-tokoh demokrasi, tokoh agama, dan para cendekiawan di Indonesia pun meyakini bahwa ormas keagamaan di Indonesia telah memberikan sumbangsi tidak terhingga terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan beragama.

Ditinjau dari sudut pandang setiap agama yang ada di Indonesia, pancasila memang seirama dan selaras dengan tujuan diturunkannya ajaran agama. Hal itu tercermin dalam sila pertama yang di dalamnya menyimpan semangat untuk mewujudkan kemaslahatan publik (*common good*) dengan bertumpu pada nilai agama, sila kedua menegaskan perlindungan nyawa yang merupakan hal mendasar bagi manusia, dalam sila ketiga ada jaminan untuk keturunan, sila keempat adalah cerminan dari perlindungan terhadap akal/ kebijaksanaan dan sila kelima jaminan untuk pengamanan harta.

Selain memiliki porsi yang sangat penting, agama juga menempati posisi yang unik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam suatu rumusan terkenal antara hubungan antara agama dan negara di Indonesia bahwa “Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara sekuler.” Rumusan ini berarti bahwa tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-

agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bangsa dan negara.

Indonesia adalah negeri paling majemuk di dunia. Keragaman yang sangat tinggi ini menyimpan potensi disintegrasi yang juga sangat tinggi. Kemajemukan merupakan potensi positif apabila dijaga dan dikelola dengan benar. Namun sebaliknya, ia dapat menjadi sumber konflik jika tidak disertai dengan kuatnya pemahaman budaya serta komitmen untuk menjaga kebinekaan. Sejauh ini, masyarakat Indonesia telah banyak menunjukkan kearifan lokalnya (*local wisdom*) untuk menjaga persatuan dan keutuhan. Dan, kearifan lokal semacam itu adalah modal sosial yang sangat berharga untuk membangun cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat.

Salah satu modal sosial yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia adalah budaya gotong royong yang sejak lama telah melekat pada setiap lapisan masyarakat. Gotong mempunyai arti angkat atau pikul, dan royong berarti bersamasama. Gotong royong secara harfiah berarti mengangkat atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong-royong adalah perwujudan nyata dari semangat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sikap ini mempunyai nilai moral yang tinggi, seperti kebersamaan, rasa empati, saling membantu, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Sikap ini dapat dijumpai pada aktivitas keseharian masyarakat Indonesia seperti kegiatan perayaan, bakti sosial, aktivitas pertanian, peristiwa bencana atau kematian, bahkan sosial keagamaan. Sikap ini menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia lebih mengedepankan kemanusiaan dan persamaan daripada perbedaan.

Saat itu, upacara kebaktian tutup peti untuk seorang warga beragama Kristen yang meninggal terpaksa dilakukan di pelataran Masjid Darussalam, dipimpin pendeta, serta dihadiri keluarga dan warga Kristiani sekitar masjid. Aktifitas itu dilakukan setelah pihak keluarga meminta izin Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) agar dapat menggunakan halaman masjid untuk kegiatan kebaktian tutup peti. Alasannya, gang menuju rumah duka terlalu sempit sehingga menyulitkan peti jenazah masuk-keluar menuju rumah duka.

Pengurus DKM Darussalam mempersilakan halaman masjid digunakan untuk kegiatan peribadatan tersebut dengan niat berbuat baik saling membantu sesama, tidak terkecuali terhadap pemeluk agama lain. Atas peristiwa tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan apresiasi dan menjelaskan bahwa mungkin bagi pengurus masjid dan warga setempat, peristiwa itu adalah hal biasa, bagian dari gotong royong kewargaan. Namun bagi masyarakat luas dan mata dunia ia menjadi contoh dan bukti bahwa toleransi antarumat beragama di Indonesia sangat tinggi karena masing-masing umat beragama meyakini bahwa pada hakikatnya agama diturunkan untuk senantiasa menebarkan damai dan rahmat bagi sesama.

Selain itu, modal sosial lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah budaya bermusyawarah yang telah diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia sangatlah sadar pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara ini menjadi wadah bagi semua orang untuk dapat saling memberikan dan mendengarkan pendapat. Di dalam bermusyawarah, tidak ada orang atau kelompok yang dapat mendominasi dan memaksakan kehendaknya. Budaya ini dipraktikkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai suatu kesepakatan bersama (*mufakat*) dalam mewujudkan kebaikan bersama.

Toleransi bukan hanya berhenti sebagai sekadar nasihat melainkan menjadi praktik. Praktik kemudian menjadi adat, dan adat kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga yang menjadi sebab suasana tahun baru selalu semarak di Kampung Sawah, warga saling bersalaman, keliling, dan membaur.

Modern terkadang diidentikkan dengan penampilan fisik padahal hakikatnya modern bukan hanya pakaian apa yang anda pakai, laptop merek apa yang gunakan, namun modern adalah instalasi cara pikir dan sikap. Orang yang berpikir bijak dan sikap baik adalah orang modern. Sedangkan orang yang berpikir kaku dan bersikap statis, sering dikalungi gelar kurang gaul, tidak modern, jaman dulu, serta sebagai istilah yang megarah pada ketinggalan zaman. Modern juga bukan hanya berbicara waktu karena ilmuan-ilmuan Muslim mengalami kemajuan pada abad 8M sampai dengan ke 12 M sebelum kemajuan

pengetahuan di Eropa pada abad ke 15. Ada manusia yang hidup pada zaman sekarang namun mereka lebih memilih jauh dari hirukpikuk manusia, dan menjalani hidup secara tradisional. Jika terdapat sebuah komunitas masyarakat yang hidup damai sejahtera maka hal ini adalah diantara indikator modern. Jika pada masa kebangkitan ilmu pengetahuan disebabkan sarjana Eropa banyak ke Andalusia, Spanyol menimba ilmu pengetahuan Islam, maka sarjana Muslim pun pada zaman modern ini harus mengambil iktibar untuk mengembalikan warisan ilmu pengetahuan tersebut untuk membangun peradaban Islam.

Sebuah perspektif menerjemahkan manusia modern ditandai dengan manusia yang hidup pada munculnya renaissance. Sebuah masa dimana kekaguman terhadap kebudayaan-kebudayaan, baik sastra maupun seni mendapat tempat yang seharusnya. Menggantikan otoritas gereja yang menjadi pengatur norma masyarakat yang menjadikan tema rohani, ilahi dan sekitar “*dunia sana*” menjadi tema yang populer diperbincangkan pada era itu.⁷² Gagasan tentang toleransi agama adalah prestasi lain yang disumbangkan oleh humanisme pencerahan Eropa abad ke-18 kepada peradaban modern.⁷³

Hal ini didasari pula sebab zaman sebelum renaissance para ilmuwan tidak memiliki peluang untuk mempublikasikan hasil riset atau teori-teori pengetahuan karena berhadapan dengan otoritas gereja sebagai penentu. Diantara ilmuwan yang diganjar hukuman sampai meninggal karena melawan otoritas gereja adalah bapak ilmu fisika modern, Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah ilmuwan yang lahir pada abad ke-15 meninggal dalam lingkungan terisolasi, karena mendukung teori copernicus bahwa matahari adalah pusat tata surya.

Sejatinya institusi-institusi masyarakat menjadi media memperkuat ilmu pengetahuan dan aktivitas masyarakat agar dapat terbentuk kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Ketika semua aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan benar dalam konteks agama, maka hal inilah merupakan realisasi dari makna modern.

72 Henry S. Sabari, *Dostoevsky Menggugat Manusia Modern*, Cet.5, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm.31.

73 F. Budi Hardiman, *Humanime dan Sesudahnya*, Cet.I, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm.3.

Akram Dhiyaudddin Umari dalam bukunya *Masyarakat Madani* memaparkan bahwa peradaban yang besar adalah peradaban yang menciptakan lingkungan yang cocok secara politik, sosial, ekonomi, kultural dan material dan mengantarkan seseorang mengamalkan perintah-perintah Tuhan dalam seluruh aktivitasnya tanpa dirintangi oleh institusi-institusi masyarakat. Institusi tersebut tidak boleh menyebabkan adanya kontradiksi antara keyakinan beragama dan perbuatan, atau menekan seseorang untuk menyimpang dari kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT, Tuhan sekalian alam.⁷⁴

Ketika Barat ditutupi oleh “kabut pemikiran” karena campurtangan otoritas lembaga keagamaan masuk dalam setiap sendi kehidupan, justeru jauh di kawasan semenanjung Arabia bagian Asia Barat telah terbentuk peradaban yang sangat maju dan berhasil menelorkan ilmuwan dalam segala bidang. Tempat yang dimaksud adalah Irak, Mesir dan Spanyol pada era pemerintahan khalifah Islam.

Manusia modern dalam perspektif Islam adalah manusia yang hidup dalam tatanan agama Islam dan mengamalkannya secara kaffah itulah manusia modern. Ketika ingin mengetahui kapan fajar modern mulai terbit, maka jawabannya akan bersifat tentatif, Tergantung paradigma yang dibangun dalam memaknai arti modern. Jika modern adalah keseimbangan antara tumbuh dan kokohnya postur intelektual-spiritual maka Islam yang dirisalahkan kepada Rasulullah SAW memenuhi kriteria arti modern. Kehadiran Islam mencerahkan budaya Arab jahiliyah yang sarat dengan kemusyrikan dan kesesatan serta menjadi *rahmatan lil'alam*. Hal ini dibuktikan pula dengan telah terciptanya komunitas masyarakat modern pada era itu yakni Masyarakat Madani/Madinah. Penulis menjadikan ajaran Islam sebagai dasar indikator modern karena ajaran Islam bukan hanya merisalahkan tentang relasi kepada Tuhan namun mengatur pula relasi kepada sesama makhluk baik didunia maupun di akhirat. Adab bertamu, menyuguhkan hidangan, adab di kamar mandi sampai yang paling sederhana seperti posisi saat tidur ada dijelaskan dalam al-Qur'an.

74 Akram Dhiyaudddin Umar, *Madinah Society at The Time of The prophet: Its Characteristics and Organization*, Terj. Mun'im A. Sirry, *Masyarakat Madani*, Cet.II, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm..33.

Bukan hanya dimensi lahir atau hal-hal teknis kehidupan seperti cara makan yang baik, namun sampai pula hal-hal transenden, mengapa dilarang melakukan aktivitas makan dan minum dalam keadaan berdiri, mengapa harus berwudhu sebelum shalat dan membuka mushaf al-Qur'an, mengapa menyatukan laki-laki dan wanita harus hidup dalam ikatan pernikahan dan lain-lain. Sederet pertanyaan ini jawabannya akan ditemukan dalam Islam dan riset ilmiah masa kini satu persatu telah membuktikan komderenan dari ajaran Islam. Dalam kehidupan masa sekarang, modern ini lebih didominasi dengan hal bercorak sains dan teknologi serta berbagai paradigma berfikir yang maju dengan bersanding dengan agama namun dalam posisi duduk berjarak di masyarakat. Kalau hal ini menjadi kriteria modern maka kemajuan riset dan teknologi lebih pesat di negara-negara Barat, masuk dalam kriteria arti "modern". Maka tidak heran, apabila kendala-kendala penanaman konsep moderasi adalah sebagai berikut:

1. Kebodohan

Yaitu tidak memiliki ilmu tentang sesuatu hal, khususnya tentang ilmu agama. apalagi kebodohan kuadrat kebodohan diatas kebodohan (*al-Jahlul Murakkab*). Yaitu posisi tidakmengetahui bahwa dia adalah tidak punya ilmu. Dalam al-Qur'anbanyak celaan yang ditujukan kepada kebodohan, bahkankebodohan diidentikkan dengan golongan Kafir. Sifat bodohmerupakan sifat yang paling hina, sehingga tidak seorangpun maudiberi sifat bodoh meski orang bodoh sekalipun. Karena kebodohanmerupakan musibah yang paling besar di antara musibah yanglain. Penyebab kebodohan antara lain karena berpaling dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena mengikuti hawa nafsunya yangdisebabkan jauh dari jalan syariat yang benar.

Solusinya adalah berpegang teguh kepada kitab al-Qur'an dansunnah Rasulullah SAW, berpegang kepada pemahaman ulama' salaf, danilmu syariat. Ilmu merupakan obat yang paling mujarab untukmengubati sakit bodoh yang kritis sekalipun. Sehingga dikatakanilmu akan mengangkat derajat pemiliknya dengan kemulyaan, dan akan menjadikan pemiliknya sampai kepada derajat tertinggi (raja).

Seorang yang berilmu lebih ditakuti oleh Iblis dari pada seribu ahli ibadah.⁷⁵

2. Fanatisme Golongan (*Ta'asub*)

Fanatik adalah sifat atau perilaku yang memandang dirinya kelompoknya saja yang paling benar, sedangkan individu atau kelompok yang lain diposisikan sebagai bukan termasuk golongannya. Fanatisme ini bisa saja terjadi atas pendapat seseorang yang disanjungnya, baik itu mengenai pemikiran mazhab pemikiran, aqidah, fiqh, atau atas kelompok-kelompok tertentu. Fanatisme bagi umat Islam bukan sesuatu yang baru, melainkan telah terjadi dalam beberapa generasi sejak awal Islam dan mengalami puncaknya pada kemunculan imaman mazhab sunni yang kemudian pengikut masing-masing hanya menganggap benar pendapat mazhab yang diusung kelompoknya, sampai-sampai diantara mereka mengeluarkan fatwa haram hukumnya kawin antara pengikut Hanafi dan Syafi'i karena perbedaan kedua mazhab tersebut dalam topik keimanan.⁷⁶ Padahal jika menurut sejarah, sikap fanatik terhadap sesuatu itu merupakan warisan kaum Jahiliyah.

Sikap fanatik yang berlebihan menjadi kendala terbesar dalam pengembangan konsep Islam moderat di manapun. Fanatisme juga menjadi penyebab hancurnya suatu kaum di masa-masa yang lampau, hingga nabi sendiri telah memerintahkan agar menjauhi sikap fanatisme yang berlebihan, karena bahayanya tidak hanya kepada individu namun juga kepada kelompok dan bahkan generasi selanjutnya.

Penyebab munculnya sikap fanatik yang berlebihan salah satunya adalah karena minimnya pengetahuan yang dimiliki dalam memandang satu persoalan. Oleh karena minim pengetahuan, kebanyakan tindakannya terinspirasi dari hawa nafsu dan amarah, sehingga berujung kepada tidak menemukan logika yang dapat diterima dan dalil yang benar kecuali yang keluar dari hawa nafsunya sendiri. Sikap fanatik berlebihan akan menjadi sangat kuat jika terjadi pembiaran oleh orang-orang yang paham mengenai masalah yang terjadi.

⁷⁵ Abdurrahman Bin Abdul Aziz Al-Sudais, *Bulughul Amal*, hlm. 206.

⁷⁶ *Ibid.*,

Artinya orang-orang yang berilmu lepas tangan dan melakukan pembiaaran atas kesalahan tindakan masyarakat. Dalam hal fanatisme keagamaan, tentu yang memiliki tanggung jawab besar adalah para ulama untuk berperan menjadi pencerah bagi orang-orang yang fanatik.

3. Sikap Berlebih-Lebihan

Yang dimaksud di sini adalah dalam masalah keagamaan, padahal berlebihan dalam menjalankan keberagamaan merupakan kesesatan. Sifat berlebihan dalam keberagamaan antara lain disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang agama itu sendiri, terutama tentang ajaran Islam yang bersifat umum dan khusus pada masing-masing aspeknya, baik aspek ajaran aqidah, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sering juga disebabkan karena pola pikir yang tidak konsisten atau sebaliknya pola fikir yang kaku, sehingga tidak ada kata lain selain selalu menemukan istilah-istilah yang negatif dalam keberagamaan, seperti bahasa haram, tidak boleh, Kafir, syirik, sesat, karena mengira bahwa semakin tinggi kekakuan pola pikir mengenai keagamaan seseorang, semakin tinggi pula nilai-nilai ketakwaannya, dan merasa lebih dekat kepada Allah SWT, padahal yang demikian itu menunjukkan satu kondisi ketidakpahaman yang sebenarnya tentang hakikat Islam.⁷⁷

Sebab sikap berlebihan lainnya adalah karena jauh dari orang-orang alim yang mendalam ilmu al-Qur'an dan Ilmu tentang sunnah yang mampu memberikan pemahaman tentang kebijaksanaan dan hukum-hukum agama. Sebaliknya sering berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengedepankan rasionalitas dalam keberagamaannya, khususnya dalam bidang aqidah. Orang-orang seperti ini pada akhirnya akan menjauh dari aqidah ulama ahlu sunnah wal jama'ah. Penyebab-penyebab di atas semakin komplis dengan hadirnya media sosial dan media informasi yang sangat mudah didapat dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi yang diinginkannya termasuk hasil pemikiran yang negatif. Salah satu implikasi negatif dari pola keberagamaan yang muncul dari pikiran yang berlebihan adalah mudahnya menyebut orang lain Kafir, sesat, haram, tidak boleh, dan bahasa-bahasa negatif lainnya, sebagai akibat dari mengedepankan hawa nafsu dalam menjalankan ajaran agama.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 214.



BAB 3

POTRET SOSIAL KUTURAL MASYARAKAT SUMATERA UTARA

A. Profil Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara (SUMUT) sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Utara pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981,23 km². Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2020 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.136.522 jiwa, dengan kepadatan penduduk 207,40 jiwa/ km².

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatera* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan.

Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat RI Nomor 22/ Pem/ PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat RI pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/ Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

1. Pesisir Timur
2. Pegunungan Bukit Barisan
3. Pesisir Barat
4. Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk *residentie Sumatera's Oostkust* bersama provinsi Riau.

Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir Barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Adapun batas wilayah provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Batas wilayah Sumatera Utara

Utara	Provinsi Aceh dan Selat Malaka
Timur	Selat Malaka
Selatan	Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia
Barat	Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia

Terdapat 419 pulau di propinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau *Simuk* (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatera (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar diantaranya Sibulasi, Pini, Tanah bala dan Tanah masa. Pusat pemerintahan di Pulau Telo di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak ditenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara diantaranya Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara *de jure* saja. Sebab secara *de facto*, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi. Daerah provinsi Sumatera Utara beriklim tropis. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan. Sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat akibat intensitas udara yang lembap.

Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks karesidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota (dahulu kotamadya), 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/ desa.

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,10 persen. Sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/ km² dan tahun 2021 berjumlah 15.136.522 jiwa. Kadar Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tidak tetap. Pada tahun 2000 TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen. Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, Siladang, Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara,

pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Di pesisir pantai timur seperti Langkat dan Deli Serdang terdapat etnis Banjar yang sudah ada sejak abad ke-19. Ada juga etnis India (terutama Tamil) dan Arab yang beradu nasib di Sumatera Utara.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 dari 12.930.319 jiwa penduduk yang tercatat, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah orang Batak yakni 44,75%, sudah termasuk semua sub suku Batak, yakni Batak Toba, Karo, Angkola, Simalungun, Mandailing, dan Pakpak. emudian Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, dan lain-lain.

Tabel 3.2 Beberapa suku di Indonesia

No	Suku	Jumlah 2010	%
1	Batak	5.785.716	44,75%
2	Jawa	4.319.719	33,41%
3	Nias	911.820	7,05%
4	Melayu	771.668	5,97%
5	Tionghoa	340.320	2,63%
6	Minangkabau	333.241	2,58%
7	Aceh	133.439	1,03%
8	Banjar	125.707	0,97%
9	Banten	46.640	0,36%
10	Sunda	35.500	0,27%
11	Warga Negara Asing	29.676	0,23%
12	Papua	11.254	0,09%
13	Suku Lainnya	85.619	0,66%
		12.930.319	100%

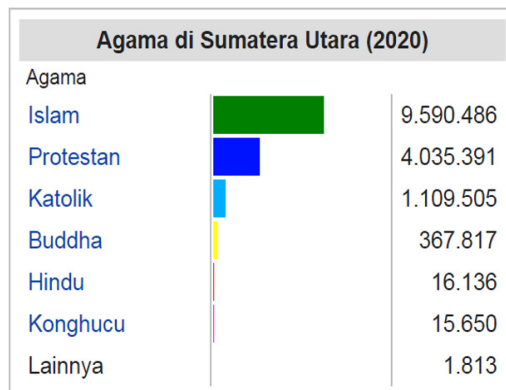
Pusat penyebaran suku-suku di Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Suku Batak Angkola: Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu, dan Kota Padangsidimpuan
2. Suku Batak Mandailing: Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Labuhanbatu
3. Suku Batak Simalungun: Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi
4. Suku Batak Toba: Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba, Dairi, Simalungun, Tapanuli Tengah, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, dan Asahan
5. Suku Batak Pakpak: Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Barat
6. Suku Karo: Kabupaten Karo, Deli Serdang, Dairi, Langkat (bagian hulu), Kota Medan, Kota Binjai
7. Suku Melayu: Pesisir Timur, terutama di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhanbatu, dan Kota Medan
8. Suku Nias: Pulau Nias, Kota Sibolga, Pesisir Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan
9. Suku Pesisir: Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga
10. Suku Minangkabau: Kota Medan, Kabupaten Asahan, Pesisir Barat
11. Suku Banjar: Kabupaten Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai
12. Suku Aceh: Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat
13. Suku Jawa: Pesisir Timur
14. Suku Tionghoa: Perkotaan Pesisir Timur & Barat.
15. Suku Arab: Kota Medan
16. Suku India: Kota Medan, Kota Binjai, Kota Sibolga, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tanjungbalai
17. Suku Siladang: Bukit Torsihite, Mandailing Natal.

Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan Bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Pesisir timur seperti wilayah Serdang Bedagai, Pangkalan Dodek, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai, memakai Bahasa Melayu dialek “o” begitu juga di Labuhan Batu dengan sedikit perbedaan ragam. Bahasa Melayu Asahan memiliki ciri khas yaitu pengucapan huruf R yang berbeda daripada Bahasa Melayu Deli contoh kata “cari” dibaca “caghi” dan kereta dibaca “kegheto”. Di Kabupaten Langkat masih menggunakan bahasa Melayu dialek “e” yang sering juga disebut Bahasa Maya-Maya. Masyarakat Jawa di daerah perkebunan, menuturkan Bahasa Jawa sebagai pengantar sehari-hari.

Di Medan, orang Tionghoa lazim menuturkan bahasa Hokkian selain bahasa Indonesia. Orang India menuturkan bahasa Tamil dan bahasa Punjab disamping bahasa Indonesia. Di pegunungan, masyarakat Batak menuturkan Bahasa Batak yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu Rumpun bahasa Batak Utara dan selatan yang dituturkan oleh masing-masing etnis. Rumpun Selatan terdiri dari Bahasa Batak Toba, Angkola, Mandailing, dan Simalungun, sedang Rumpun Utara terdiri dari Bahasa Karo dan Bahasa Pakpak. Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias. Sedangkan orang-orang di pesisir Barat, seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Natal menggunakan bahasa Pesisir.

Gambar 3.1 Agama di Provinsi Sumatera Utara



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Utara tahun 2021, mayoritas penduduk Sumatera Utara menganut agama Islam yakni 63,36%, kemudian Kristen 33,99% dimana Protestan 26,66% dan Katolik 7,33%. Kemudian Budha 2,43%, Konghucu 0,11%, Hindu 0,10% dan Parmalim 0,01%. Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 12.499 Gereja Protestan, 10.738 Masjid, 4.822 Mushola, 2.488 Gereja Katolik, 393 Vihara, 99 Klenteng dan 84 Pura. Agama utama di Sumatera Utara berdasarkan etnis adalah:

1. Islam: terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandailing, Angkola, sebagian Karo, Simalungun, Batak Pesisir dan Pakpak
2. Kristen (Protestan dan Katolik): terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias dan sebagian Batak Angkola, Tionghoa.
3. Hindu: terutama dipeluk oleh suku Tamil di perkotaan
4. Buddha: terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
5. Konghucu: terutama dipeluk oleh suku Peranakan di perkotaan
6. Parmalim: kepercayaan asli suku Batak Toba, sebelum ajaran agama Kristen berkembang. Penganut Parmalim banyak bermukim di kecamatan Uluan, kecamatan Lumban Julu, kecamatan Ajibata, dan kecamatan Bonatua Lunasi di kabupaten Toba.

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/ Pem/ PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara diiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/ Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.¹

B. Keragaman Suku di Sumatera Utara dan Integrasi Sosialnya

Sumatera Utara atau yang sering disingkat dengan Sumut merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk yang terdapat pada Provinsi Sumut sebanyak ± 6.076.440 jiwa, penduduk tersebut terbagi atas beberapa suku dan etnis yang antara lain yaitu: Batak Pak-Pak, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, Batak Angkola/ Pesisir, Nias, dan Melayu dengan ciri dan khas tersendiri yang antara lain sebagai berikut:

1. Suku Pakpak (Dairi)

Suku Pakpak dikenal dengan peninggalan sejarah megalitik berupa mejan dan patung ulu balang dan tentunya juga memiliki adat istiadat dan tari daerah dan alat musik yang khusus, serta rumah adatnya yang dibuat dari bahan kayu serta atapnya dari bahan ijuk.

1 <https://sumutprov.go.id/artikel/halaman/sejarah>

Bagian-bagian dari rumah adat Pakpak mempunyai arti tersendiri, rumah adat pakpak disebut Jerro, rumah adat ini umumnya menggunakan tangga dan tiang penyangga.

2. Batak Toba

Dikenal dengan tariannya yaitu tor-tor tarian ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dengan gerakan tari yang riang gembira yang diadakan pada saat senang maupun duka, wisata Danau Toba, adat budaya, rumah adat balai Batak Toba atau rumah adat Bolon yg membedakan rumah adat tersebut hanya ukuran dan jumlah penghuninya rumah adat ini memiliki kolong rumah yang digunakan sebagai kandang hewan peliharaan masyarakat Batak seperti babi, ayam, dan kambing, kuliner seperti arsik, naniura, lapet dan lain sebagainya serta alat-alat musiknya seperti *gonrang*, *taganing*, suling, dan lain sebagainya.

3. Karo

Terkenal dengan daerah berastaginya dengan alam yang sejuk, adat istiadat dan kulinernya seperti Babi Panggang Karo (BPK), adat budaya, rumah adat Karo yang sering disebut dengan nama rumah adat Siwaluh Jabu yang artinya sebuah rumah yang dihuni oleh delapan keluarga, dan memiliki tarian yaitu tari *piso surit* yang menggambarkan seorang gadis sedang menantikan kedatangan kekasihnya.

4. Simalungun

Terkenal dengan peninggalan sejarah berupa rumah adat yang dinamai Rumah Bolon nama rumah adatnya sama dengan rumah adat Batak Toba hanya saja yang membedakannya yaitu bentuk atapnya yang unik berbentuk limas atau sering di kenal dgn museum Lingga, adat istiadat, dan budaya tersendiri

5. Melayu

Dikenal dengan berbagai peninggalan sejarah seperti istana Maimoon, tari daerah yaitu tari Serampang Dua Belas yang mengandung pesan tentang perjalanan kisah anak muda dalam mencari jodoh, mulai dari perkenalan sampai memasuki tahap pernikahan, dan rumah adat, Rumah adat Melayu identik dengan warna kuning dan hijau, serta dindingnya dan lantainya terbuat dari papan dan atapnya menggunakan ijuk.

6. Nias

Dikenal dengan adat istiadatnya, tarian yang dinamakan tari Fataele yang tidak bisa dipisahkan dengan tradisi lompat batu karena lahirnya berbarengan dengan tradisi homo batu.

Selain itu, Provinsi Sumut ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari Melayu Tua dan Melayu Muda. Daerah Pesisir Sumut, yaitu Timur dan Barat pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing yang hampir seluruhnya beragama Islam. Sementara didaerah pegunungan banyak terdapat suku Batak yg sebagian besarnya beragama Kristen.

Etnik atau kelompok etnik merupakan golongan manusia yang kelompoknya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, umumnya dengan dasar garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain dan ciri dari kelompok itu sendiri contohnya kesamaan budaya, agama, bahasa, prilaku, serta ciri dari biologis. Pengertian etnik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.

Etnikitas ialah suatu faktor fundamental yang ada didalam kehidupan manusia yang menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Berikut contoh-contoh dari etnik:

1. Garis keturunan

Anggota sebuah suku pada dasarnya ditentukan menurut garis keturunan (*patrilineal*), seperti suku Batak, menurut garis keturunan ibu (*matrilineal*) seperti suku Minang atau seperti kebudayaan suku Jawa. Ada juga ditentukan menurut agamanya, sebutan Melayu di Malaysia untuk orang bumi putera yang Muslim dan lain sebagainya.

2. Suku campuran

Ada juga suku dengan berdasarkan percampuran ras, contohnya orang peranakan yang merupakan campuran Melayu dengan Tionghoa, orang Indonesia sebutan campuran bule dengan bangsa Melayu, orang Mestis untuk campuran Hispanik dengan bumiputra, orang Mulato campuran ras Negroid dengan ras Kaukasoid, dan yang lainnya.

Dalam etnik ada juga yang disebut dengan identitas etnik itu sendiri. Identitas Etnik adalah individu-individu yang mempunyai banyak identitas yang berkaitan dengan peranan-peranan khusus. Salah satu identitas-identitas ini berhubungan dengan latar belakang etnik mereka yang dianggap sebagai inti diri mereka. Sehingga identitas etnik suatu ciri khas yang dimiliki oleh sekelompok orang-orang yang dianggap sebagai inti dari mereka. Kelompok etnik dapat disebut sebagai suatu unit kebudayaan karena kelompok etnik mempunyai ciri utama yang penting, yaitu kemampuan untuk berbagi sifat budaya yang sama. Dengan asumsi bahwa tiap kelompok etnik mempunyai ciri budayanya sendiri.

Ada dua hal pokok yang dapat dikaji dalam rangkai mengamati kelompok-kelompok etnik dengan ciri-ciri unit budayanya, yaitu: kelanggengan unit-unit budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya unit budaya tersebut. Ada beberapa implikasi ketika melihat kelompok etnik sebagai unit kebudayaan, yaitu: Pertama, klasifikasi individu atau kelompok tertentu dinyatakan sebagai anggota suatu kelompok etnik tertentu tergantung dari kemampuannya untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok etnik tersebut. Kedua, bentuk-bentuk budaya yang tampak menunjukkan adanya pengaruh ekologi, tetapi bukan berarti ini menunjukkan bahwa semua itu hanya merupakan bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan semata-mata. Namun lebih tepatnya, bahwa bentuk budaya merupakan hasil penyesuaian para anggota kelompok etnik ketika berhadapan dengan berbagai faktor luar. Seperti ketika suatu kelompok etnik yang tinggal tersebar di daerah yang mempunyai lingkungan ekologi bervariasi, akan memperlihatkan perilaku yang berbeda sesuai dengan daerah tinggalnya, tetapi tidak mencerminkan orientasi nilai budaya yang berbeda. Keberagaman atau keragaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat dimana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku, ras, agama, ideologi, dan budayanya “masyarakat majemuk”. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat.

Keragaman etnik dan budaya masyarakat Sumatera Utara merupakan masyarakat yang memiliki suku dan budaya yang beragam. Suku sering juga disebut etnik. Suku berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya

tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal.

Keragaman etnik dan budaya masyarakat Sumatera Utara terbentuk oleh jumlah suku yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial atau budaya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa di Sumatera Utara terdapat banyak suku dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia.

Masyarakat Sumatera Utara sangat beragam, keragaman tersebut dipengaruhi faktor lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian, sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan memengaruhi masyarakatnya untuk mempunyai mata pencarian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan.

Keragaman masyarakat Sumatera Utara tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah, misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam hasil karya, setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Keanekaragaman budaya Sumatera Utara merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan, sebab ada sebagian masyarakat Sumatera Utara yang tidak mengetahui ragam budaya daerahnya.

Kondisi masyarakat yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Dalam kondisi masyarakat tersebut, termasuk di seluruh wilayah Indonesia,

wacana tentang pendidikan multikultural menjadi penting untuk membekali peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, namun tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga.
2. Antara warga masyarakat terdapat semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah.
4. Terdapat kesadaran dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sikap dan keadaan seperti tersebut di atas harus dijunjung tinggi serta dilestarikan.

Sumatera Utara memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduknya terpencar-pencar di berbagai daerah. Tiap penduduk tinggal di lingkungan kebudayaan daerahnya masing-masing. Ini artinya, di Indonesia terdapat banyak ragam kebudayaan. Perbedaan tersebut antara lain dalam hal:

1. Cara berbicara
2. Cara berpakaian
3. Mata pencaharian
4. Adat istiadat

Keanekaragaman budaya tidak bisa dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam tersebut. Disamping itu, dengan mendalami kebudayaan yang beraneka ragam tersebut, akan menambah wawasan sehingga mampu menghargai kekayaan yang kita miliki, yang berupa keanekaragaman kebudayaan tersebut.

Kondisi masyarakat Sumatera Utara yang multikultural. Kondisi masyarakat yang sangat plural serta multikultural baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah Provinsi yang memiliki komposisi masyarakat yang sangat beragam baik dari keberagaman suku, agama, adat bahkan ragam kekayaan makanan khas. Website Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa keberagaman di Sumatera Utara menjadi sesuatu yang sangat menarik karena pengaruh akulturasi budaya dari berbagai etnik yang mendiami Sumatera Utara seperti yang ada didalam data Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah suku Melayu, Jawa, Karo, Toba, Simalungun, Minang, Pakpak, Tamil dan lain sebagainya.

Tiap-tiap suku di atas, disebutkan membawa budaya masing-masing yang begitu baik dan unik, yang masing menghuni daerah-daerah di Sumatera Utara termasuk keturunan India dan Tionghoa terdapat di Kota Medan bahkan sebagai salah satu kota yang memiliki populasi etnik Tionghoa terbanyak di Indonesia. Dari begitu banyaknya suku atau etnik di Sumatera Utara dari dulu tidak pernah ada terjadi yang namanya konflik antara satu etnik dengan etnik lainnya. Karena di Sumatera Utara apabila ada kejadian atau konflik kecil yang diakibatkan dari beberapa pihak, masyarakat memang dari dulu tidak akan pernah membawa masalah kedua belah pihak ini mengarah ke etnik ataupun agama sekalipun, sehingga tetap terjaga kedamaian antar masing-masing etnik yang mendiami Sumatera Utara.

Dalam hal keberagaman etnik di Sumatera Utara terdapat beberapa kegiatan dimana kegiatan tersebut mempersatukan tiap masing-masing masyarakatnya dari latar belakang etnis manapun itu. Salah satu contoh pada saat Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Setiap tahunnya diadakan kegiatan perayaan ini dimana setiap masyarakat terlepas dari etnik atau agama apapun ikut berpartisipasi dalam kegiatan perayaan, apakah itu sebagai panitia penyelenggara ataupun yang ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam setiap pertandingan yang diadakan sebagai wujud toleransi masyarakat yang tinggi.

Tidak hanya berbeda etnik atau suku, namun setiap etnik di Sumatera Utara masing-masing memiliki pakaian adat masing-masing yang tentunya mempunyai keunikan tersendiri yang antara lain sebagai berikut:

Pakaian adat suku Batak Tobasehari-harinya merupakan kain tenun atau yang lebih dikenal dengan *ulos*. *Ulos* yang dipakai laki-laki disebut dengan *hande-hande* untuk pakaian bagian atasnya. Sedangkan untuk bagian bawah dinamakan *singkot*. Selain itu *ulos* ternyata digunakan untuk menutupi kepala yang disebut juga *bulang-bulang*, atau *tali-tali*.

Pakaian adat Mandailing, sebenarnya hampir sama dengan pakaian Batak Toba mereka menggunakan *ulos* yang dipadukan dengan aksesoris lain. Saat acara pernikahan, wanita Mandailing biasanya menggunakan *bulang* di kening. *Bulang* umumnya terbuat dari bahan dasar emas, bulang daloam adat Mandailing memiliki arti sebagai lambang kemuliaan dan simbol kemasyarakatan. Pengantin pria biasanya menggunakan penutup kepala yang disebut dengan nama Ampu, pada zaman dulu ampu digunakan oleh para raja Mandailing dan Angkola. Warna hitam pada ampu memiliki fungsi magis, sedangkan untuk warna emasnya adalah simbol kebesaran.

Pakaian adat suku Nias, biasanya dominan dengan warna kuning dan emas. Kaum pria Niansnya mengenakan atasan yang terbuat dari kulit kayu. Baju merupakan baju yg memiliki bentuk seperti rompi yang tidak memiliki kancing dan hanya berwarna hitam atau coklat. Untuk pakaian adat wanita biasanya terdiri dari selebar kain yg terbuat dari kulit kayu atau blacu hitam. Dan pakian tersebut biasanya

diberikan aksesoris tambahan berupa gelang yang dibuat dari kuningan dan umumnya merek juga menggunakan anting logam yang besar yang disebut *saro delinga*.

Pakaian adat Simalungun, Pakpak, dan Karo sama halnya dengan suku-suku lainnya yang mengenakan *ulos* hanya berbeda dengan cara menyebutnya, serta dengan aksesoris yang dipakai oleh suku-suku tersebut.

Pakaian adat suku Melayu Sumatera Utara sama dengan suku Melayu di Riau yang menggunakan baju kurung serta *songket* yang dililit ke pinggang dan berwarna kuning.

Keragaman suku-suku di Sumatera Utara tidak hanya memberikan kekayaan terhadap keragaman di Sumatera Utara tetapi juga menciptakan berbagai macam makanan khas Sumatera Utara yang antara lain sebagai berikut:

1. *Arsik*
2. *Manuk napinadar*
3. *Saksang*
4. *Naniura*
5. *Lappet*
6. *Mie gomak*

Selain memperkaya kuliner Nusantara di Sumatera Utara, keragaman suku di Sumatera Utara juga turut memperkaya bahasa-bahasa lokal Nusantara, karena di Sumatera Utara terdapat beragam bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Batak, Mandailing, dan Nias. Selain memperkaya bahasa lokal keragaman suku di Sumatera Utara juga memperkaya lagu-lagu daerah yang antara lain sebagai berikut:

1. *Butet*.
2. *Anju Ahu*. Lagu ini menceritakan sepasang kekasih yang sedang dirundung masalah, itinya sepasang kekasih yang harus saling mengerti dan saling membujuk.
3. *Sinanggartulo* yang menggambarkan keluh kesah seorang perjaka yang harus menuruti perintah ibunya, yang menginginkan putranya mendapatkan kekasih dari keturunan marga ibunya. Marga dari sang ibu harus sama dengan marga calon kekasih sang perjaka dan juga merupakan *pariban*.

4. *Sittogol*. Isi lagunya mengajak untuk bergembira ria dan melepaskan diri dari rasa susah hati.
5. *Sik sik Sibatumanikam*.
6. *Piso surit* yang menggambarkan tentang rasa rindu seseorang terhadap kekasihnya yang tidak tau dimana rimbanya.

Selain lagu-lagu daerah, keragaman suku di Sumatera Utara juga menyumbangkan berbagai ragam peralatan tradisional yang antara lain sebagai berikut:

1. *Tumbuk Lada* yaitu senjata tradisional suku Karo yang digunakan dalam pertempuran jarak pendek yang dapat dipegang dengan dua jenis genggamannya yaitu dengan mata keatas ataupun mata kebawah.
2. *Piso Karo* juga merupakan senjata tradisional dari Sumatera Utara yang mempunyai panjang 31-55 cm. Pegangannya terbuat dari kayu, gading, rotan, dan sarungnya ditutupi dengan perak dan suasa.
3. *Piso Gading* yang juga termasuk salah satu senjata tradisional masyarakat Sumatera Utara yang berasal dari Toba. *Piso Gading* terbuat dari bahan kayu, gading, dan rotan yang memiliki panjang sekitar 66 cm.
4. *Lesung* yang digunakan untuk menumbuk padi, tepung, dan lainnya.
5. *Sagak* yang digunakan untuk ayam yang sedang bertelur dan mengerami telurnya.
6. *Bubuyang* digunakan untuk menangkap ikan di sungai.
7. *Pantik* yang digunakan untuk menangkap ikan lele di perairan sawah.
8. *Takar* yang merupakan ukuran beras.
9. *Tandok* tempat beras yang sering digunakan di acara adat.

Di sini terlihat, bahwa semua etnis atau suku memiliki nilai budaya masing-masing mulai dari adat istiadat, tari daerah, jenis makanan, budaya, dan pakaian adat juga memiliki bahasa daerah masing-masing. Meskipun begitu banyak etnis budaya di Provinsi Sumatera Utara tidak membuat perbedaan antara etnis dalam masyarakat karena tiap

etnis dapat berbaur satu sama lain dengan memupuk kebersamaan yang baik. Meskipun banyak orang yang berpendapat bahwa adat istiadat masyarakat Sumatera Utara terkesan kasar-kasar. Dengan kata lain banyak orang yang beranggapan bahwa orang Sumatera Utara kasar-kasar dikarenakan dari tutur bahasa yang agak sedikit keras. Sebenarnya bahasa tersebut sudah menjadi tradisi dari masyarakat Sumatera Utara dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak akan bisa berubah.

Meskipun memiliki bahasa yang terkesan keras, namun suku Batak juga mempunyai jiwa sosial dan interaksi sosial yang baik sama seperti masyarakat Indonesia lainnya. Interaksi sosial secara umum adalah proses dimana pada suatu individu melakukan komunikasi atau menjalin saling kontak terhadap orang lain atau saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya baik dari segi pikiran atau tindakan. Sebagai syarat utama terjadinya interaksi sosial adalah pengaruh timbal balik.

Interaksi merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan adanya nilai dan norma sosial yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik jika aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak ada kesadaran atas pribadi masing-masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial:

1. Kontak Sosial

Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tango* yang artinya menyentuh. Jadi, artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badaniah. Sebagai gejala sosial itu tidak perlu berarti suatu hubungan badaniah, karena orang dapat mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, seperti misalnya, dengan cara berbicara dengan pihak lain tersebut. Kontak sosial memiliki sifat-sifat berikut:

- a. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif.

Kontak sosial positif mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik.

- b. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder.

Kontak sosial primer terjadi apabila para peserta interaksi bertemu muka secara langsung. Misalnya, kontak antara guru dan murid di dalam kelas. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui perantara. Misalnya, percakapan melalui telepon.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Ada lima unsur pokok dalam komunikasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pihak lain.
- b. Komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirim pesan, pikiran, atau perasaan.
- c. Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, instruksi, dan perasaan.
- d. Media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan.
- e. Efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan, setelah mendapatkan pesan dari komunikator.

Menurut para ahli, bahwa karakteristik hubungan sosial di dalam suatu komunitas akan sangat dipengaruhi oleh besarnya kesempatan setiap individu dari anggota komunitas untuk memilih atau membentuk kelompok yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kebutuhan tersebut didasari oleh sifat manusia untuk saling memperoleh keuntungan yang timbal balik di dalam jalinan hubungan yang dibentuk. Konsep tersebut secara jelas memperlihatkan pentingnya interaksi sosial antar pemukim.

Interaksi sosial adalah bentuk umum dari proses-proses sosial yang merupakan hubungan sosial yang *dinaabsmis* yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan antar kelompok manusia ataupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia.²

Perwujudan proses interaksi sosial dalam pertemuan beberapa kelompok etnik tersebut akan membuahkan dua alternatif yaitu bersifat positif dan negatif. Hal yang bersifat positif timbul jika pertemuan itu mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat baru. Kondisi seperti ini sering disebut juga dengan integrasi yaitu proses dari penduduk pendatang untuk secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat di wilayah yang baru serta dapat menggambarkan suatu keadaan masyarakat baik pendatang maupun asli hidup dalam suasana yang relatif aman dan tentram tanpa adanya konflik sosial yang dapat mengganggu proses perkembangan secara keseluruhan dalam wilayah tersebut. Hal yang bersifat negatif dalam interaksi sosial muncul jika pertemuan beberapa golongan etnik ini menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam memandang obyek yang menyangkut kepentingan bersama. Faktor ini bisa menyebabkan hubungan antar golongan menjadi tegang dan gampang menjurus kepada konflik.³

Unsur-unsur dalam pola permukiman selanjutnya ditentukan dalam kaitannya terhadap hubungan sosial di antara penghuninya. Pola permukiman yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan antar etnik tidak hanya dilihat dari unsur fisiknya saja. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pola permukiman merupakan perpaduan antara struktur fisik dengan struktur sosial yang tercipta dari pengelompokan orang yang saling berdekatan untuk tujuan bertempat tinggal, berbudaya, berproduksi dan berkehidupan sosial.

2 Sutopo Soekanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press., 2002), hlm. 5-60

3 Kalsum Emilya. *Jurnal Model Penelitian Hubungan Pola Permukiman dan Konflik Antar Etnik*, Tanjung Pura: Program Studi Arsitektur Universitas Tanjung Pura. hlm. 79-80.

Untuk terciptanya integrasi dalam interaksi sosial harus dipenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi antara kelompok penduduk yang berlangsung secara intensif dan efektif. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi. Terjadinya kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, akan tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan arti penting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak badan atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Studi yang telah dilakukan oleh para ahli sosial terhadap interaksi sosial di dalam suatu permukiman memperlihatkan adanya pengaruh tempat (*place*) terhadap hubungan sosial penghuninya.

Selanjutnya kondisi unsur-unsur dalam permukiman dikaitkan dengan permasalahan utama dalam konflik antar etnik. Benturan yang terjadi di antara kelompok etnik adalah benturan kebudayaan dan benturan kepentingan. Masing-masing kelompok etnik memiliki kepentingan yang berbeda-beda selaras dengan tradisi atau kebudayaan mereka. Dalam memenuhi kepentingan tersebut mereka menggunakan sumber daya yang ada di sekeliling mereka. Dengan berbedanya kepentingan di antara mereka tentu saja membuat masing-masing kelompok etnik tersebut memberi perlakuan yang berbeda terhadap segala sumber daya yang ada. Perbedaan perlakuan ini pada akhirnya dapat menyebabkan benturan-benturan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu dicermati bagaimana proses suatu kelompok etnik menempati suatu kawasan permukiman dan menggunakannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kelompok etnik lain. Suatu proses penempatan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan kelompok lain, pada akhirnya dapat menimbulkan sikap tidak senang atau stereotip yang berpotensi melahirkan konflik

Benturan tersebut sebetulnya tidak menjadi persoalan jika mereka dapat saling memahami kebiasaan kelompok lain. Namun pemahaman tersebut tidak dapat berlangsung jika terdapat sikap etnosentris yang kuat pada masing-masing kelompok. Sikap etnosentris tersebut berupa keyakinan bahwa kebiasaan pada kelompoknya adalah kebiasaan yang

paling tepat. Sikap seperti ini muncul karena adanya ikatan yang kuat dalam kelompok etnik tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam suatu kehidupan yang selalu mengelompok. Pengelompokan tersebut biasanya berawal dari kondisi suatu permukiman.

Di sisi lain suatu sikap *stereotip* dan *etnosentris* antar kelompok etnik dapat dihindari jika terdapat suatu interaksi yang intensif karena adanya kontak fisik di antara pelakunya. Interaksi yang intensif ini akan pada akhirnya dapat menghasilkan suatu hubungan yang terintegrasi. Jarak, batas dan orientasi dalam permukiman dapat membentuk suatu situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhi suatu interaksi. Jika situasi dan kondisi tidak mendukung untuk terciptanya suatu hubungan maka interaksi yang terjadi adalah interaksi yang dipaksakan atau bahkan tidak terjadi interaksi sama sekali. Tidak terjadinya interaksi dapat menimbulkan sikap *stereotip* dan *etnosentris* yang melahirkan diskriminasi dan prasangka. Sikap prasangka ini dapat menyebabkan proses integrasi menjadi tidak berhasil.

Maka pola permukiman di Sumatera Utara pada dasarnya lebih bersifat kepada *integrated pluralism*. Seperti yang dikatakan para ahli, *integrated pluralism* adalah pola permukiman dimana pemukim/ migran yang berasal dari berbagai etnik bermukim pada satu wilayah tertentu dan kelompok etnik tersebut tidak dipisahkan secara geografis menurut wilayah asal, atau kesukuan. Begitu lah pola permukiman yang ada sebagaimana di beberapa daerah Sumatera Utara. Berbeda dengan pola permukiman yang ada di beberapa daerah lain Sumatera Utara yang masyarakatnya dapat dikatakan lebih majemuk yang mungkin dikarenakan luas wilayah yang lebih luas sehingga jumlah masyarakat yang cukup banyak. Sehingga berbeda dengan pola permukiman *integrated pluralism* tetapi lebih mengarah ke *segregated pluralism*. *Segregated pluralism* adalah pola permukiman dimana pemukim yang berasal dari kelompok etnik yang sama bermukim pada satu wilayah tertentu, mungkin berdasarkan mayoritas kelompok etnik saja, bukan berarti semua penduduk di salah satu wilayah di Sumatera Utara itu hanya ada satu kelompok etnik dan di daerah lainnya hanya ada satu kelompok etnik saja, melainkan pengelompokan pola permukiman yang berdasarkan mayoritas suatu kelompok etnik tertentu. Sedangkan faktor-faktor dasar terbentuknya interaksi sosial menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:⁴

4 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.2012),

1. Imitasi.

Imitasi atau meniru adalah suatu proses *kognisi* untuk melakukan tindakan maupun aksi seperti yang dilakukan oleh model dengan melibatkan alat indera sebagai penerima rangsangan dan pemasangan kemampuan persepsi untuk mengola informasi dari rangsang dengan kemampuan aksi untuk melakukan gerakan *motorik*.

2. Identifikasi.

Identifikasi adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu. Identifikasi sebenarnya merupakan suatu kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dari pada *imitasi*, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya, maupun dengan disengaja karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya.

3. Sugesti.

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Sehingga proses ini sebenarnya hampir sama dengan *imitasi*, tetapi titik tolaknya berbeda.

4. Motivasi

Motivasi merupakan suatu rangsangan pengaruh, stimulus yang diberikan antar masyarakat, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara krisis, rasional, dan penuh tanggung jawab.

5. Simpati.

Proses simpati sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.

hlm. 55-60.

6. Empati.

Empati hampir serupa dengan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Empati dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat intens.

Salah satu kunci keharmonisan dalam keragaman adalah dialog yang baik dalam keberagaman etnik. Interaksi atau komunikasi sosial yang baik antar suku yang ada di daerah Sumatera Utara sangat adalah merupakan peran dari masyarakatnya, kesadaran masyarakat Sumatera Utara perindividu untuk tetap mempertahankan komunikasi antar etnik yang tetap terjalin baik hingga sekarang ini.

Masyarakat Sumatera Utara memiliki hubungan yang baik antar etnik, mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang bisa digunakan sebagai wadah untuk mempererat keberagaman etnik di Sumatera Utara. Begitu juga dengan tanggung jawab untuk terwujudnya kerukunan antar umat agama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati antarumat beragama. Sikap tenggang rasa, saling menghargai, memiliki jiwa empati dan simpati, dan memiliki rasa toleransi antar umat beragama juga dapat menjadi bagian dari terjadinya keberagaman etnik di Sumatera Utara.

Agama juga menjadi bagian dalam menjalin keberagaman etnik di Sumatera Utara, karena setiap latarbelakang suku, ras, maupun budaya sudah pasti memiliki keyakinan atau yang biasa disebut dengan agama. Peran agama sangat berpengaruh didalam kehidupan masyarakat Indonesia, terkhususnya di Sumatera Utara. Selain itu, dikarenakan semua masyarakat di Sumatera memiliki agama ada yang beragama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Sehingga setiap kehidupan dengan komunikasi dan interaksi antar etnik yang baik juga tidak menutup kemungkinan berhubungan dengan terjalinnya hubungan antar lintas agama yang baik pula, keduanya sama-sama sejalan dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Utara sehingga mereka dituntut saling menghargai agar tidak terjadi konflik.

Untuk memepererat kerukunan beragama, maka yang harus diperhatikan adalah fungsi lembaga keagamaan yang merupakan wadah dan perwakilan dari tiap masing-masing umat beragama yang ada di Sumatera Utara. Lembaga-lembaga keagamaan ini yang mengayomi, menjembatani permasalahan-permasalahan, baik internal maupun dengan umat agama lain. Untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama diperlukan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh dan dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik dari umat beragama itu sendiri, lembaga-lembaga keagamaan yang di dalamnya ada tokoh atau pemuka agama serta tokoh masyarakat. Fungsi lembaga keagamaan pada intinya juga berfungsi sebagai alat pemersatu dalam hal *edukasi* (pemahaman dan pengalaman) keagamaan, melainkan juga sebagai pencipta harmoni antarumat beragama atau kepercayaan terhadap umat beragama lainnya pada aspek-aspek kehidupan sosial. Beberapa pihak yang sangat berperan dalam hal ini adalah:

1. Peran Tokoh Agama

Masyarakat Sumatera Utara sangat beragam-ragam latarbelakangnya baik dari berbedanya suku, agama, ras, dan budaya. Oleh karena itu, agama buat masyarakat Sumatera Utara merupakan hal yang sangat penting dalam terjalannya kehidupan masyarakat di Sumatera Utara yang sangat baik dan tetap solid dari dulu hingga sekarang.

Untuk itu, peran dari tokoh agama sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Sumatera Utara yang multikultural dan majemuk. Karena tokoh agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Sumatera Utara sangatlah dihargai dan dihormati, hal ini tentu saja wajar terjadi mengingat negara Indonesia merupakan negara yang beradat dan beragama, jadi yang diakui masyarakat di Sumatera Utara sebagai salah satu tokoh agama dari agama tertentu merupakan orang yang sangat dihormati terutama bagi penganut agama yang sama dengan tokoh agama tersebut. Dalam hal lain, peran para tokoh agama dari tiap-tiap agama yang ada di Sumatera Utara sangatlah penting mengingat untuk mencegah adanya konflik yang terjadi di masyarakat.

Tokoh agama yang dihormati bagi masyarakat sangatlah berguna dalam menyelesaikan konflik, baik masalah yang kecil hingga masalah yang besar ataupun masalah yang hanya antara pribadi dengan pribadi atau masalah yang melibatkan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Pernah suatu ketika terjadi konflik yang hampir terjadinya *chaos* (kerusuhan) di Sumatera Utara, dimana masalah yang terjadi tersebut dikarenakan tidak setujunya salah satu pihak keluarga yang merasa bahwa tanah yang sampai sekarang ada bangunan mesjidnya adalah tanah dari mereka, sehingga terjadilah konflik antara pihak keluarga dengan pihak pengurus mesjid yang saling tidak terima akan hal itu. Sebelum sampai ke tahap mediasi oleh para tokoh agama, masalah yang awalnya hanya masalah antar kedua belah pihak menjadi membesar, dikarenakan ada beberapa masyarakat yang beragama Islam ikut membantu pihak pengurus mesjid tersebut, bukan dengan tujuan melainkan hampir menjadi konflik antar kelompok, karena kebetulan yang mengaku pemilik tanah tersebut beragama Nasrani sehingga keluarga dan beberapa masyarakat Nasrani disana jadi ikutan membela pula, lama-lama menjadi marak dan hampir pecah menjadi *chaos*. Namun pihak Kelurahan langsung cepat memberi kabar ke setiap tokoh-tokoh agama yang ada di Sumatera Utara agar bisa meredam emosi dan amarah kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan atau mediasi. Akhirnya setelah beberapa lama, pihak keluarga yang mengklaim pemilik tanah dan pihak pengurus mesjid menjalani mediasi secara kekeluargaan yang dipimpin oleh tokoh agama lewat jalur hukum hingga akhirnya dimenangkan oleh pihak pengurus mesjid.

2. Peran Pendidikan Keagamaan

Untuk tetap mempertahankan kondisi Sumatera Utara yang tetap aman dan nyaman dengan segala kemajemukannya, salah satu cara yang dilakukan setiap masyarakatnya adalah dengan cara mendidik generasi muda yang akan menjadi penerus dengan didikan yang membangun dan mendidik mereka agar mencegah terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat dari segi keagamaan.

Masyarakat yang beragama Islam Sumatera Utara, setiap mesjid yang ada di kelurahan melakukan kegiatan belajar mengaji, belajar Al-Qur'an, dan juga mengikuti kegiatan amal yang dilakukan pihak

mesjid. Dalam kegiatan ini juga mereka dibekali oleh para pemuka agama untuk saling memberi, saling membagi, saling mengerti, dan saling mengasihi semua insan manusia dengan banyaknya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak dini, anak-anak, selain diajarkan ilmu tentang agama berdasarkan Al-Qur'an, juga diajarkan untuk saling peduli terhadap saudara-saudara lain yang berbeda suku, agama, dan budaya. Hal ini ditujukan agar kelak generasi muda tersebut bisa dan tetap mempertahankan keberagaman etnik di Sumatera Utara dan hubungan antar agama yang baik di Sumatera Utara seperti yang terbukti sudah dilakukan para pendahulunya dan orangtuanya, dan sekarang berlanjut ke masa abang-abang atau kakak-kakaknya yang kelak suatu hari nanti mereka yang anak-anak yang akan meneruskan karakter masyarakat Sumatera Utara yang saling menghormati dan saling menghargai dengan rasa simpati dan empati walaupun berbeda-beda latar belakangnya tersebut.

Sedangkan dalam masyarakat yang beragama Nasrani, gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara memiliki kegiatan khusus untuk anak-anaknya, yang dinamakan Sekolah Minggu dan kegiatan Misa ataupun OMK (Orang Muda Katholik) bagi yang beragama Kristen Katholik. Dimana kegiatan ini juga mendidik anak-anak mudanya untuk dapat berkreasi sesuai dengan talenta mereka

Sumatera Utara bisa saja mengalami konflik antar etnik. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya suku dan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Kemajemukan masyarakat baik dari segi agama, etnik, maupun budaya merupakan faktor potensial dalam membangkitkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebab banyak ahli mengemukakan bahwa akar permasalahan konflik adalah perbedaan sistem nilai-nilai budaya yang menjadikan masyarakat memiliki sikap yang berbeda pula dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok. Hubungan-hubungan ini umumnya menyangkut masalah agama, politik, sosial, dan ekonomi. Tidak jarang konflik yang timbul dalam satu daerah atau wilayah disebabkan oleh dua atau bahkan tiga masalah dari nilai-nilai tersebut.

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar etnik merupakan bagian usaha menciptakan kedamaian umum serta kelancaran hubungan antar manusia yang berlainan suku, ras, agama, dan budaya. Sehingga setiap kelompok etnik dapat melaksanakan bagian dari tuntutan kebudayaannya masing-masing. Keberagaman yang berpegang kepada prinsip masing-masing etnik menjadikan setiap etnik yang ada menjadi saling terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan dan menjalin komunikasi yang baik. Bila anggota dari suatu etnik telah berhubungan baik dengan kelompok etnik lainnya, akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat.

Perbedaan antar etnik satu dengan etnik lainnya juga sebagai pendorong untuk saling mengenal, saling memahami dan saling berhubungan. Ini akan mengantarkan setiap kelompok etnik itu kepada kesatuan dan kesamaan pandangan dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan rukun. Manusia dapat hidup di dunia ini bukan karena adanya kesamaan masing-masing manusia dengan manusia lainnya, melainkan karena adanya perbedaan setiap masing-masing individu manusia itu sendiri. Kenyataan hidup dapat dirasakan karena terdapatnya perbedaan hidup dalam banyak hal.

Membangun kerukunan dalam keberagaman antar etnik di Sumatera Utara tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini disebabkan karena masing-masing budaya dari tiap suku yang ada memiliki kebaikan dan keunikan tersendiri, sehingga yang namanya budaya sangatlah unik. Bila suatu kelompok etnik mengurus kepentingan etniknya pada suatu lokasi, sedangkan pada tempat tersebut salah satu kelompok etnik itu belum memerlukan fasilitas, maka hal seperti itu berarti kelompok etnik tersebut tidak mempertimbangkan pihak atau kelompok etnik yang ada pada tempat itu. Bila setiap kelompok etnik disamping mengutamakan kelompoknya sendiri, juga mempertimbangkan kelompok etnik lain serta kondisi sosial yang ada, berarti setiap kelompok etnik tersebut memelihara wibawa dan komunikasi yang baik terhadap kelompok etnik lainnya. Kewajiban ini menjadikan keberagaman etnik di Sumatera Utara saling menyegani, sehingga terbina saling menghargai dan saling menghormati. Apabila setiap suku bangsa mampu memelihara wibawa masing-masing, berarti telah memelihara eksistensi suku atau etnik masing-masing.

Keberagaman antar etnik adalah syarat mutlak agar manusia dapat hidup tentram dan damai. Jangan hanya namanya bersatu tapi perbuatannya tidak bersatu. Bila ingin hidup dalam persatuan maka di dalam perbuatan wujudkanlah persatuan itu. Di sini jelas bahwa persatuan yang harmonis itulah yang didambakan mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jikalau keluarga rukun dan bila masyarakat rukun maka negara dan bangsa juga akan rukun dan hidup damai.

Keindahan masyarakat antar etnik tercermin dalam kerjasama yang harmonis antar kelompok dalam masyarakat itu sendiri. Kerjasama merupakan konsekuensi logis dari hasil musyawarah dan mufakat. Masyarakat majemuk yang diidamkan mustahil dapat terwujud tanpa didukung dengan kerjasama dan gotong royong untuk saling membantu yang lainnya.

Keberagaman etnik provinsi Sumatera Utara tidak menjadikan masyarakatnya terpecah-belah, hal tersebut terlihat dari keberlangsungan hidup masyarakat Sumatera Utara sehari-hari. Kehidupan sosial masyarakat Sumatera Utara terlihat sangat rukun dan damai. Konsep rukun bagi masyarakat Sumatera Utara adalah tentang hidup dengan damai, tenang, dan bahagia walaupun hidup ditengah-tengah perbedaan yang ada. Cara yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan agar suasana hati tetap damai, tenang, dan bahagia yaitu dengan cara saling menghormati antar kelompok etnik dalam masyarakat ataupun antar individu masyarakat Sumatera Utara, kemudian saling menjaga perasaan, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan tidak membiasakan pikiran untuk berprasangka buruk satu sama lainnya. Dan karena salah satu hal inilah maka di Sumatera Utara jarang sekali terjadi konflik yang berhubungan dengan suatu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya ataupun suatu kelompok agama dengan agama lainnya.

Apabila setiap masing-masing kelompok etnik saling melakukan toleransi, maka kedamaian pun akan terjadi, tidak akan pernah ada yang namanya konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, keharmonisan dalam keberagaman antar etnik ataupun agama akan selalu terjaga, hidup bermasyarakat akan selalu tentram dan damai tanpa ada perasaan curiga dan was-was di dalamnya.

Keberagaman etnik yang rukun yang terjadi di Sumatera Utara dapat dilihat melalui pergaulan masyarakat baik bergaul dalam aspek kehidupan sosial maupun aspek religinya. Pergaulan dalam aspek kehidupan sosial itu termasuk dalam acara, perkawinan, kematian, seta gotong royong. Dalam acara-acara tersebut semua warga yang termasuk dalam masyarakat di Sumatera Utara, kebanyakan mengambil bagian dan berpartisipasi dalam tiap-tiap acara tersebut. Bahkan acara-acara atau event seperti peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar lainnya yang biasanya masyarakat memilik acara untuk diadakan pada saat hari besar tersebut, masyarakat tetap ikut berlomba-lomba untuk berpartisipasi di dalamnya. Makanya setiap acara-acara atau event yang diadakan di daerah Sumatera Utara selalu berjalan aman dan lancar. Begitu juga dengan pergaulan masyarakatnya dalam aspek religi atau agama, tetap saling membantu dan tolong-menolong tetap dipraktekkan dalam diri masing-masing masyarakatnya. Bahkan yang ikut selalu dalam berpartisipasi di suatu acara-acara tersebut tidak hanya dewasa saja, bahkan dimulai dari masyarakat yang berumur muda atau anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai yang sudah tua pun ikut membantu walaupun dia penganut agama lain. Karena memang dari dulu sudah ditanamkan rasa persaudaraa dalam diri masing-masing masyarakat di Sumatera Utara dan yang pastinya itu merupakan ajaran-ajaran atau warisan-warisan dari orang tua terdahulunya, sehingga sampai sekarang kebiasaan yang bisa disebut sebagai tradisi masyarakat Sumatera Utara ini tetap terjadi sampai sekarang. Bahkan juga menerus kepada generasi penerus nantinya.

Pergaulan masyarakat dalam aspek religi yang mengarah kepada kerukunan yaitu terwujud dalam acara-acara religi seperti dalam acara Maulid Nabi Muhammmad SAW bagi agama Islam, Upacara Saka bagi agama Hindu, dan acara Imlek bagi agama Buddha, juga acara Natal bagi agama Kristen dan Katholik.

Selain saling membantu antar suku dan beda agama, perkawinan juga merupakan salah satu aspek yang mendukung terjalannya keberagaman etnik di Sumatera Utara tetap terjaga baik sampai sekarang. Apabila ada masyarakat yang akan menikah jauh hari sebelumnya pihak keluarga yang akan menikah akan mengundang

semua masyarakat di sekitar rumahnya untuk datang ke acara pernikahan tersebut. bisa juga mereka yang akan melakukan pernikahan pihak keluarga mengundang saudara dan teman didaerah lain yang tidak memandang apakah tetangga tersebut suku Batak, Jawa, Tionghoa, Mandailing, Aceh, Minang, ataupun India sebagai bentuk solidaritas yang kuat di masyarakat.

Bahkan terhadap masyarakat yang berbeda agama tetap memiliki sikap solidaritas, seperti etnis Batak beragama Kristen Protestan misalnya mengadakan acara pernikahan di salah satu daerah di Sumatera Utara dan mengundang masyarakat sekitarnya termasuk etnis lain yang beragama Islam. Kemudian pada saat pernikahan itu diadakan acara memotong *jagal* atau bisa diartikan sebagai daging yang khusus dan identik dengan budaya Batak. *Jagal* tersebut merupakan daging hasil sembelihan dari hewan babi. Namun yang mengundang tetap memiliki kesadaran dalam solidaritas dan juga kesadaran saling menghargai masing-masing agama, Sehingga pada saat acara pernikahan tersebut, pihak keluarga yang menikah khusus menyediakan makanan halal untuk masyarakat yang beragama Islam. Inilah yang menjadi salah satu rahasia kenapa keberagaman etnik di Sumatera Utara maupun hubungan antar agama apapun tetap terjalin baik, karena adanya rasa saling menghargai dan saling mengerti.

Begitu juga apabila ada masyarakat dari etnik Jawa yang dalam acara pernikahannya memotong lembu atau sapi sebagai makanan dalam acara pernikahannya, namun karena adanya kesadaran pihak yang mempunyai acara terhadap saudara-saudaranya dari etnik Tamil atau juga Punjabi, maka mereka menyediakan hidangan khusus untuk masyarakat dari etnik Tamil ataupun Punjabi tersebut sebagai hidangan dalam acara pernikahan tersebut. Karena dalam kebudayaan masyarakat India keseluruhan memiliki pantangan dalam mengkonsumsi sapi atau lembu. Menghargai kebudayaan itu sehingga masyarakat beretnik Jawa yang mengadakan pernikahan tersebut juga menghidangkan daging ayam ataupun makanan yang identik dengan pecinta *vegetarian*.

Di Sumatera Utara tidak hanya terjadi pernikahan antar sesama etnik atau sesama satu agama, namun ada juga beberapa pernikahan dilatarbelakangi agama, suku, dan budaya yang berbeda. Terkadang apabila yang akan menjalani pernikahan berbeda etnik ataupun agama, maka pengantin perempuan mengikuti pengantin pria, dalam artian pindah agama sesuai agama ataupun juga budaya dari etnik penganti pria. Kebanyakan yang terjadi di Sumatera Utara seperti itu, mungkin hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Sumatera Utara menganut budaya patrilineal sehingga pengantin perempuan kebanyakan mengikuti pengantin pria . Namun bukan berarti semua terjadi seperti itu, sebab sering juga terjadi di masyarakat Sumatera Utara kebalikannya yaitu pihak pengantin pria yang justru ikut pindah ke agama pengantin perempuan ataupun mengikuti budaya etnik mempelai perempuan yang akan dinikahinya.

Kendatipun demikian, masyarakat Sumatera Utara terkait perkawinan berbeda budaya atau berbeda agama seperti ini masyarakat saling menghargai kebijakan dan keputusan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Biasanya untuk mencapai kesepakatan berbeda budaya awalnya sangatlah rumit terutama dalam memberikan pengertian kepada orang tua masing-masing. Hal ini yang biasanya membuat acara perkawinan tersebut membuat sedikit hambatan karena harus dipertimbangkan pihak keluarga secara matang, sebab perkawinan berbeda budaya seperti ini memang cukup sensitif bukan hanya pada masyarakat Sumatera Utara saja, tetapi masyarakat Indonesia.

Secara individual, hak dan kepentingan seseorang akan berbeda dengan saudaranya sekalipun itu terdiri satu kelompok etnik maupun satu rumpun ras, organisasi kesukuan, satu budaya, maupun agama, karena itu orang yang satu agama maupun budaya dengan sudaranya yang lain, belum tentu akan dapat hidup dengan rukun manakala penekanan sisi individualistik ini tidak diimbangi dengan pemenuhan rasa tanggung jawab, hal ini tentunya, apabila dikembangkan persoalannya akan lebih melebar dalam kaitan antarbudaya maupun antaragama. Hal ini tentunya disebabkan karena faktor pembeda antara kehidupan umat beragama itu akan lebih jelas kelihatan ketimbang antarmereka yang seiman. Oleh karena itu untuk

mewujudkan kerukunan di tengah-tengah perbedaan yang ada maka perlu ditanamkan kepada jiwa setiap individu akan kesadaran bersama, menghargai kemajemukan, toleransi sesama agama, komunikasi antar etnik yang terjalin baik atas dasar kesadaran diri sendiri, serta dialog antara tokoh agama dan pemerintahan.

Untuk mewujudkan suatu kerukunan di antara perbedaan yang ada seperti yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di Sumatera Utara, harus memiliki kesadaran bersama, artinya harus sadar bahwa mereka memiliki perbedaan dalam hal kepercayaan, suku dan budaya yang unik, sehingga setiap budaya ataupun kepercayaan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh tiap masing-masing kelompok masyarakat mempunyai cara pengaplikasian yang berbeda juga. Khususnya dalam masalah budaya yaitu adat istiadat masing-masing kelompok etnik, hidup dan tinggal di daerah dimana dasarnya memiliki kemajemukan dalam hal suku dan etnik sehingga memiliki perbedaan dalam hal kepercayaan dan adat istiadat atau budaya masing-masing dari masyarakatnya, jadi masyarakat yang saling memiliki perbedaan dalam hal agama dan budaya tidak bisa hanya menganggap agama atau budayanya sendiri yang benar dan budaya atau agama orang lain adalah salah. Hal seperti ini sangat penting dalam menjaga tidak terjadinya konflik di dalam masyarakat Sumatera Utara.

Sikap kesadaran bersama ini, sudah mendarah daging bagi masyarakat Sumatera Utara, karena sudah dibina sedari kecil oleh orangtua, sehingga hal tersebut sudah merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Sumatera Utara, artinya bukan hal yang sulit lagi bagi mereka untuk memiliki sikap tersebut. Sikap kesadaran bersama ini jiwa mereka yaitu untuk menjaga hubungan, baik dalam keberagaman etnik di Sumatera Utara dan hubungan lintas agama. Keberagaman etnik di Sumatera Utara yang tergambar di atas terlihat bahwa dalam kegiatan apapun hubungan masyarakat selalu terjaga dengan baik, saling mendukung satu sama lain, saling mendatangi berbagai kegiatan. Menurut masyarakat Sumatera Utara, tinggal di satu wilayah yang sama berarti memiliki tujuan yang sama agar keberlangsungan hidup tetap berjalan walaupun dalam keadaan latar belakang yang berbeda. Apapun latar belakang suku, budaya, dan agama, mereka

tetap kompak sebab mereka memiliki mempunyai tujuan yang sama yaitu mengajarkan tiap masing-masing individu membuat kebaikan dan saling menghargai saudara-saudara yang lainnya. Hal ini tergambar dari kegiatan-kegiatan masyarakat Sumatera Utara sehari-hari. Seolah-olah sadar bahwa individu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari individu lainnya, oleh karena itu masyarakat Sumatera Utara saling membantu satu sama lain, berinteraksi dengan harmonis dengan suku atau etnik yang lainnya dan begitu juga dengan agamanya yang berbeda-beda.

Kesadaran diri merupakan kondisi dari hasil proses mengenai motivasi pilihan dan kepribadian yang berpengaruh terhadap penilaian, keputusan, dan interaksi dengan orang lain, kesadaran budaya meliputi rasa saling percaya tanpa adanya kecurigaan dalam masyarakat, rasa saling menghargai, toleransi yang kuat, tidak adanya stereotipe buruk terhadap budaya dari etnik lain, dan saling membantu dalam hal apapun di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Sumatera Utara. Karena keberagaman etnik di Sumatera Utara yang baik melibatkan seluruh aspek masyarakat dan tidak peduli apapun latarbelakangnya semua tetap saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Kesadaran ini tidak terlepas dari adanya kesadaran masyarakat dari masing-masing etnik berbeda dan budaya yang berbeda untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu masyarakat atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat provokatif dan bisa merusak keberagaman etnik di Sumatera Utara. Setiap individu yang berada di Sumatera Utara secara tidak langsung dituntut untuk sadar dalam melakukan hal-hal yang bersifat baik dan mendukung budaya atau tradisi dari suatu etnik yang ada di Sumatera Utara karena hal seperti ini sangat-sangat dibutuhkan dalam mempertahankan keberagaman etnik di Sumatera Utara yang baik dalam kemajemukannya. Dari sini lah dapat tetap tercipta dan terjaga solidaritas antar etnik di Sumatera Utara.

Perbedaan budaya merupakan suatu hal yang dihasilkan masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya mengkristal atau mendarah daging. Budaya dengan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan. Karena manusia itu sendirilah yang menciptakan

budaya. Antropologi yang mengkaji masyarakat juga menjadikan budaya itu sebagai sub kajian dari masyarakat itu sendiri. Budaya yang berkembang di masyarakat sejak dulu membuat masyarakat Indonesia dan khususnya pada masyarakat di Sumatera Utara pada saat ini sadar bahwa mereka mempunyai budaya yang berbeda.

Kesadaran budaya oleh masyarakat, adalah kemampuan setiap orang masing-masing individu untuk melihat ke luar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai budaya dan kebiasaan budaya yang masuk. Selanjutnya, seseorang dapat melihat apakah hal tersebut normal dan dapat diterima pada budayanya atau mungkin tidak lazim atau tidak dapat diterima di budaya lain. Oleh karena itu, perlu untuk memahami budaya yang berbeda dari diri dirinya dan menyadari kepercayaannya dan adat istiadatnya dan mampu menghormatinya.

Cultural awareness (kesadara budaya) sebagai suatu kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap pemahaman kebutuhan untuk mempertimbangkan budaya, faktor-faktor penting dalam menghadapi situasi tertentu. Pada tingkat yang sadar, kesadaran budaya merupakan informasi, memberikan makna tentang kemanusiaan untuk mengetahui tentang budaya. Prinsip dari tugas untuk mendapatkan pemahaman tentang kesadaran budaya adalah mengumpulkan informasi tentang budaya dan mentransformasikannya melalui penambahan dalam memberikan makna secara progresif sebagai suatu pemahaman terhadap budaya.

Selanjutnya, untuk menjalin toleransi beragama tidak cukup hanya dengan sikap kesadaran berbudaya tetapi juga harus memiliki sikap saling menghormati. Berbeda-beda suku, agama, ras, maupun budaya merupakan latar belakang masyarakat yang ada di Sumatera Utara, dalam hal ini setiap masyarakat dituntut memiliki dasar untuk bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Hal seperti ini memang cukup sulit untuk tetap dijaga kerukunan dan keharmonisannya ditambah lagi setiap masyarakat dituntut untuk bisa menerima dan bisa menghargai masyarakat lain yang berbeda budaya maupun agama.

Masyarakat Sumatera Utara memang sudah lama menanamkan sikap saling toleransi dan solidaritas antar masyarakat yang berbeda etnik dan agama, hal ini dikarenakan belajar dari pengalaman yang

kelam dan tragis yang pernah terjadi di daerah-daerah di Indonesia ini yang disebabkan masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk menghargai perbedaan dan keragaman budaya dan agama di tempat tinggalnya. Bisa juga dikarenakan masyarakat yang tidak siap dengan masuknya budaya-budaya baru ke daerah mereka sehingga timbul pemikiran negatif dari masyarakat asli, dimana mereka takut budaya mereka bisa hancur atau dikuasai budaya atau agama pendatang tersebut. Tapi hal tersebut tidak menjadi stereotipe pada masyarakat di Sumatera Utara karena memiliki pemikiran yang cukup maju untuk masalah perbedaan-perbedaan seperti hal tersebut, hal ini bisa saja terjadi di Sumatera Utara termasuk Kota Medan ibu kotanya Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, yang diakui dari dulu oleh masyarakat daerah lain merupakan kota dengan tingkat toleransi dan solidaritas yang tinggi baik itu dari segi budaya dan juga agama sehingga masyarakat di Sumatera Utara yang adalah salah satu kelurahan di Kota Medan ini sudah berpengalaman untuk menerima perbedaan seperti ini dan juga paham bagaimana cara mempertahankan agar tidak terjadinya konflik, seperti tragedi Sampit yang di Kalimantan yaitu perang antar suku Dayak dengan Madura, hal seperti itu kan tidak perlu terulang lagi, makanya masyarakat di Sumatera Utara mayoritas memiliki pemikiran yang bisa menerima perbedaan, bahkan justru perbedaan itu adalah merupakan sebuah keindahan apabila rasa ini sudah terpatrit di jiwa masyarakat maka konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi akan tidak terjadi. Meskipun misalnya ada konflik yang berhubungan dengan kesukuan, budaya, atau agama paling hanya sekedar masalah pribadi saja, biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena adapun kejadian seperti itu masyarakat lain tidak ikut terpancing emosi atau sumbu pendek, tetapi masyarakat malah menasehati pihak yang bertikai tersebut baik itu karena masalah suku, budaya, atau agama yang berbeda.

Dengan kata lain, perbedaan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari dalam diri tiap masing-masing masyarakat yang ada di Sumatera Utara, sehingga masing-masing memilih untuk menjauhi terjadinya konflik antar sesama masyarakatnya. Kesadaran seperti ini lah yang membuat kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara

juga menjadi lebih indah karena adanya toleransi dan solidaritas yang kuat antar masyarakat yang memiliki masing-masing perbedaan latarbelakang tetapi tetap bersatu seperti Bhinneka Tunggal Ika.

Toleransi yang ada di Sumatera Utara beragam sifatnya baik dari segi etnis maupun keagamaan. Masyarakat sebuah etnis di Sumatera Utara yang pada umumnya kebanyakan pemeliharaan hewan ternak seperti anjing, di beberapa daerah di Sumatera Utara tidak bisa dipungkiri hanya karena hewan peliharaan ini bisa menyebabkan konflik di tengah masyarakat yang dimana notabene hewan anjing haram bagi umat Islam. Namun hal ini di Sumatera Utara bahwa hewan peliharaan ini tidak menjadi penyebab masalah apalagi konflik. Masyarakat yang memiliki hewan peliharaan, memang tidak semuanya di kandang, banyak oknum etnik tertentu yang melepaskan anjing peliharaannya begitu saja. Rata-rata anjing yang ada di Sumatera Utara memang sudah jinak atau sudah dapat mengenal mana masyarakat asli sehingga masyarakat saling memahami hal ini dan sama sekali tidak mempermasalahkannya walaupun ada beberapa masyarakat yang bergama Islam merasa terganggu dan *risih* apabila anjing peliharaan tadi menjilat-jilat penduduk yang beragama Islam dan juga gonggongan anjing juga mengganggu masyarakat terutama pada malam hari dikarenakan suaranya yang berisik, masyarakat yang berumat Islam di Sumatera Utara tidak menjadikan hal ini sebagai permasalahan karena adanya rasa toleransi dan saling menganggap wajar hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu juga dari sisi keagamaan, dalam hal beribadah toleransi masyarakat yang melekat juga menjadikan tidak adanya konflik dalam hal peribadatan, seperti halnya pada saat umat Islam beribadah menggunakan alat pengeras suara dari masjid tidak membuat masyarakat yang beragama lain terganggu akan adanya hal tersebut. Begitu juga pada saat umat beragama lain sedang mengadakan ibadah menurut keyakinan mereka, seperti umat Nasrani yang beribadah di gereja, masyarakat yang beragama Islam dan Hindu terutama ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan sampai selesainya ibadah tersebut, termasuk dalam hal menjaga kendaraan dan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan pada saat sedang beribadah. Toleransi yang terjadi dalam hal-hal seperti ini sangat lumrah terjadi di kalangan masyarakat Sumatera Utara sejak dari dulu.

Kebetulan di Sumatera Utara sendiri, setiap masyarakat dari setiap etnis dan agama sama-sama memiliki rasa toleransi atau menerima perbedaan yang ada, tidak ada semisal etnis Jawa saja yang mengalah kepada etnis lain agartidak terjadi konflik, semuanya sama-sama saling menghargai dan tidak egois dalam hal menghargai keberagaman di Sumatera Utara.

C. Keragaman Budaya Masyarakat Sumatera Utara

Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks karena mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak.

Menurut Robert Lawless, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai pola-pola perilaku dan keyakinan (dimediasi oleh simbol-simbol) yang dipelajari, rasional, terintegrasi, dimiliki bersama, dan yang secara dinamik adaptif dan yang tergantung pada interaksi sosial manusia demi eksistensi mereka sendiri. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

William A. Haviland, mengartikan inti kebudayaan (cultural core), yaitu berupa unsur-unsur kebudayaan tertentu yang menentukan berbagai bentuk kehidupan suatu masyarakat. Menurut C. Geertz menyatakan kebudayaan mampu menunjukkan konstelasi unsur-unsur penting yang paling erat kaitannya dengan penyelenggaraan atau pengaturan kehidupan dan penyusunan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan, secara empirik, pola-pola sosial, politik, dan agama diduga erat kaitannya dengan pengaturan pola-pola kehidupan dan ekonomi. Sedangkan menurut Pilgrim dan Pretty mendefinisikan kebudayaan sebagai kombinasi seperangkat praktik, jaringan institusi dan sistem makna. Sistem budaya mengatur pengetahuan, praktik, sistem

kepercayaan, pandangan duniawi (*worldviews*), nilai-nilai, norma-norma, identitas, mata pencaharian, dan organisasi sosial masyarakat manusia. Budaya yang berbeda menilai alam dengan cara yang berbeda dan demikian pula sebaliknya ia mempunyai hubungan berbeda dengan lingkungan alamnya.

Pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan memiliki tujuh unsur kebudayaan yang dapat disebut sebagai pokok dari tiap kebudayaan di dunia sebagai berikut:

1. Unsur Bahasa

Bahasa merupakan cara ucap manusia. Pengucapan yang baik dan merupakan salah satu elemen yang sudah menjadi tradisi. Terus menerus diturun temurunkan sehingga antar manusia di suatu kelompok atau daerah atau bangsa dapat melakukan komunikasi dengan cara mereka sendiri. Bahasa juga digunakan untuk mengadaptasi tradisi. Dibagi menjadi dua, yaitu bahasa ucapan dan bahasa tulisan.

1. Unsur Kepercayaan

Unsur kepercayaan ini sangat penting, karena merupakan salah satu yang dijadikan pegangan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, kepercayaan juga akan menghubungkan manusia dengan penciptanya, membuat hal – hal yang terlihat mustahil bisa diterima akal sebagai wujud keajaiban dan anugrah dari Tuhan

2. Unsur Ilmu Pengetahuan

Unsur ilmu pengetahuan ini juga sangat dibutuhkan dalam kebudayaan dimana gunanya untuk memenuhi rasa keingintahuan manusia terhadap suatu hal. Ilmu pengetahuan sendiri diketahui sangat banyak bidang dan jenisnya. Dengan adanya beragam bidang pengetahuan kehidupan manusia bisa menjadi lebih maju kedepannya. Ilmu pengetahuan sendiri terdiri dari enam jenis, yaitu: a. Pengetahuan alam b. Pengetahuan tumbuhan c. Pengetahuan binatang d. Pengetahuan tubuh manusia e. Pengetahuan sifat dan tingkah laku manusia f. Pengetahuan ruang dan waktu

3. Unsur Teknologi

Unsur teknologi ini ditujukan sebagai peralatan dan perlengkapan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan teknologi sendiri berkembang atau berganti seiring perubahan zaman.

4. Unsur Sistem Kemasyarakatan Kekkerabatan

Sistem kekerabatan ini sangat kental dalam unsur ini. Karena sistem kemasyarakatan masih digunakan manusia hingga sampai sekarang untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan.

5. Unsur Mata Pencaharian atau Sistem Ekonomi

Unsur Mata Pencaharian Atau Sistem Ekonomi merupakan suatu aktivitas manusia dimana dengan melakukan suatu aktivitas itu manusia dapat bertahan hidup. Misalnya, petani menanam padi, setelah panen padi kemudian dijual ke distributor dan sisanya bisa dipergunakan untuk makan.

6. Unsur Kesenian

Unsur kesenian ini apabila dipandang dari sudut cara kesenian sebagai ekspresi hasrat manusia akan keindahan itu dinikmati, maka ada dua lapangan besar, yaitu: (a) seni rupa, atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan mata, dan (b) seni suara, atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga. Ketujuh unsur kebudayaan diatas berkaitan erat dengan hubungan sosial antar etnik. Dimana kebudayaan merupakan suatu landasan utama yang menjelaskan tentang adanya keberagaman etnik di Sumatera Utara.

Sumatera Utara dikenal sebagai masyarakat majemuk, berbagai macam suku, agama, adat istiadat yang berbeda – beda merupakan kekayaan budaya yang di miliki Provinsi Sumatera Utara. Dari sisi historisnya, keberagaman kelompok etnik dan hubungan sosial atau interaksi sosial di Sumatera Utara telah terjalin sejak lama, bahkan bisa dikatakan bahwa Sumatera Utara berdiri dari terjalinnya hubungan sosial antara kelompok etnik dalam menghadapi penetrasi kolonial Belanda. Jauh sebelum itu, kelompok-kelompok etnik di Sumatera Utara telah terlibat dalam praktek-praktek perdagangan, baik antar kelompok etnik di Nusantara , maupun dengan etnik lainnya seperti China, Arab, India dan sebagainya. Hal ini telah memberi dampak pada keberagaman etnik dan bahkan agama. Banyaknya pedagang dari luar Sumatera Utara yang menetap di Sumatera Utara memperkaya khasanah budaya Sumatera Utara yang memang sebelumnya telah beragam. Sehingga tidak terlalu mengherankan apabila sekarang

masyarakat Sumatera Utara dikenal sebagai masyarakat majemuk dengan menerapkan simbol negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Sebab keanekaragaman etnik menjadi bagian dalam suatu kesatuan sistematika dari sebuah masyarakat yang mendiami satu wilayah. Proses interaksi sosial merupakan suatu konsep abstrak yang dapat ditetapkan pada kejadian-kejadian yang tidak dapat terhitung dalam kehidupan sehari-hari. Dimana interaksi sosial adalah salah satu proses masyarakat, saling berhubungan antara satu dan lainnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya seseorang tidak akan pernah terlepas dari hubungan sosial antara anggotanya, sebagaimana hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Dalam kenyataannya, masyarakat yang plural sekalipun selalu akan terjalin hubungan sosial antara etnik yang satu dengan yang lain. Kehidupan masyarakat majemuk sering terjadi sosial dalam berhubungan berinteraksi, karena diantara mereka mempunyai kebiasaan serta tabiat yang berbeda-beda. Namun kerja sama yang akrab akan terjadi karena sikap saling tolong menolong akan mampu menyatukan kebiasaan serta tabiat mereka tersebut.

Mengenai keberagaman etnik, Provinsi Sumatera Utara merupakan tempat yang paling populer yang memiliki salah satu kota besar yang ada di Indonesia yaitu Kota Medan. Kota Medan memiliki banyak etnik, baik etnik asli dari Sumatera Utara maupun etnik pendatang. Kelompok etnik asli Sumatera Utara yang ada di Kota Medan yaitu Melayu dan Batak dengan berbagai sub-Batak yang ada, dan yang merupakan etnik pendatang yang ada di Kota Medan adalah seperti kelompok etnik Jawa, Minang, Sunda, Aceh, Tionghoa dan lain sebagainya.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa di Provinsi Sumatera Utara dihuni oleh berbagai etnik dan agama, yang mana dari mereka memiliki kepentingan masing-masing. Hal ini membuat Kota Medan menjadi salah satu kota multikulturalistik. Di Kota Medan, masing-masing etnik mendiami wilayah tertentu, namun terkadang juga terjadi pembauran antar etnik, hal tersebut membuat masyarakat Sumatera Utara terbiasa hidup dengan kelompok etnik tertentu dan secara alamiah menerima kelompok etnik tertentu dan hidup berdampingan.

Banyaknya etnik yang ada di Sumatera Utara, menyebabkan tidak jarang masyarakat Sumatera Utara menikah dengan pasangan yang tidak satu etnik dengannya. Hal ini disebut sebagai prinsip kesesuaian (*matching principle*), namun sekarang ini, tidak jarang pasangan yang menikah tidak sesuai dengan *matching principle*, seperti pasangan yang menikah berbeda etnik.

Perkawinan antar etnik yang berbeda (campuran) merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan sosial pada masyarakat yang terdiri dari berbagai etnik, dan tersebut tidak terlepas dari adanya interaksi sosial dari masing-masing etnik. Hal ini juga yang merupakan salah satu penyebab eratnya keberagaman etnik di Sumatera Utara. Kondisi masyarakat yang sangat plural serta multikultural baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara memiliki komposisi masyarakat yang sangat beragam baik dari keberagaman suku, agama, adat bahkan ragam kekayaan makanan khas. Keberagaman tersebut menjadi sesuatu yang sangat menarik karena pengaruh akulturasi budaya dari berbagai etnik yang mendiami wilayah Sumatera Utara, seperti yang ada didalam data Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah suku Melayu, Jawa, Karo, Batak Toba, Simalungun, Minang, Pakpak, Tamil, Mandailing dan lain sebagainya. Tiap-tiap suku membawa budaya masing-masing yang menjadikan Sumatera Utara sebagai daerah keberagaman yang begitu unik. Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, sama dengan Provinsi lainnya yaitu memiliki dua bentuk masyarakat yaitu:

Pertama, masyarakat tradisonal yaitu masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosialnya. Jadi, masyarakat tradisional di dalam melangsungkan kehidupan berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Masyarakat tradisional hidup di daerah pedesaan yang secara geografis terletak di pedalaman yang jauh dari keramaian kota. Masyarakat ini

juga disebut masyarakat pedesaan atau masyarakat desa. Salah satu contoh tradisi yang masih di tekuni masyarakat samapai sekarang, salah satunya adalah *Marsialapari* yaitu tradisi gotong royong telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Tradisi ini dapat terlihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Mandailing, Sumatera Utara. Ada satu tradisi unik yang telah lama dilestarikan masyarakat Mandailing hingga kini, yaitu *marsialapari*. *Marsialapari* merupakan budaya atau tradisi di Sumatera Utara yang didalamnya mengandung aspek tolong-menolong. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur yang diteruskan dari generasi ke generasi. *Marsialapari* merupakan salah satu tradisi yang ada di masyarakat Mandailing. Tradisi ini adalah budaya masyarakat lokal dalam pengelolaan sawah mereka. Tradisi ini diisi dengan kegiatan tolong menolong dan gotong royong, yang sudah ada sejak jaman dulu dan masih dijaga oleh masyarakat Mandailing hingga kini. Masyarakat Mandailing secara sukarela dengan rasa gembira saling tolong-menolong dan membantu saudara mereka yang membutuhkan bantuan, yang biasanya dilakukan di sawah atau kebun. Tradisi *marsialapari* ini biasanya dilaksanakan pada saat *marsuaneme* (menanam padi) dan saat *manyabii* (memanen padi). Tradisi ini bisa dilakukan oleh antar saudara, kerabat, teman, maupun tetangga. Selain itu, Tradisi *marsialapari* bisa diikuti oleh laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Tentunya tradisi ini mereka lakukan secara suka rela atas kesadaran sosial yang mereka yakin masing-masing. Meski dilakukan secara sukarela, Tradisi *marsialapari* ini dilakukan secara bergantian sebagai imbalan atas bantuan dari kerabat atau tetangga yang sudah membantu mereka dalam mengelola sawah. Contohnya, apabila penggarapan sawah di tempat salah seorang masyarakat Mandailing sudah selesai, maka orang tersebut akan ikut membantu ke tempat orang yang sudah membantunya tadi, dan begitu seterusnya. Sehingga apabila ada 4 keluarga yang berpartisipasi, maka ke 4 keluarga tersebut harus saling membantu secara bergantian. Tradisi *marsialapari* ini bukanlah sekedar aktivitas dalam melakukan gotong royong semata, namun tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Mandailing. Hal ini ditunjukkan dengan adanya esensi kasih sayang (*holong*) dan persatuan (*domu*) yang hidup dalam

khazanah budaya masyarakat Mandailing selama ini. Kasih sayang dan persatuan (*holong* dan *domu*), pada masyarakat Mandailing merupakan implementasi dari adat *dalian na tolu*. Sistem sosial dari *dalian na tolu* tersebut lah yang menggiring masyarakat Mandailing untuk senantiasa memiliki rasa saling membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan suatu persoalan yang menyangkut kehidupan bersama.

Selain *marsialapari*, terdapat juga beragam tenunan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Batak. Tenunan tersebut merupakan seni kerajinan yang sangat menarik dari suku batak yang sering disebut kain *ulos*. *Ulos* merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Warna *ulos* biasanya adalah warna hitam, putih, dan warna merah yg mempunyai makna tertentu, sedangkan warna lainnya merupakan lambang dari variasi kehidupan. Untuk jenisnya *ulos* sendiri ada bermacam - macam yaitu Ulos Sitolu Tuhodifungsikan atau dipakai sebagai ikat kepala atau selendang, Ulos Ragi Hotang. *Ulos* ini diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat yang disebut dengan nama Ulos Hela, Sadum dan sebagainya. Setiap *ulos* memiliki filosofi yang berbeda. Orang Batak biasanya menjadikan *ulos* sebagai selempang atau selendang.

Kedua, masyarakat modern yaitu masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat istiadat lama. Karna mengalami perubahan dan perkembangan zaman dewasa ini. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan dari luar yang membawa kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada umumnya masyarakat modern ini disebut juga di sebut masyarakat perkotaan atau masyarakat kota. Kebanyakan kota di Sumatera Utara ini berawal dari desa atau lokasi pemukiman yang penghununya terikat dalam kehidupan pertanian, dan bergantung pada wilayah di sekelilingnya, namun seiring dalam perjalanan waktu karna keadaan topografis dan lokasinya, desa-desa tersebut berkembang menjadi kota. Masyarakat perkotaan lebih dipahami seagai kehidupan komonitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, yaitu:

1. Kehidupan keagamaan yang berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.
2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
3. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak di proleh warga kota dari pada di desa.
4. Perubahan sosial tampak nyata di kota-kotakarena lebih terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah multikultural yang berarti beraneka ragam kebudayaan. Masyarakat multikultural berarti keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat keanekaragaman budaya, termasuk di dalamnya terdapat keragaman bahasa, agama, adat istiadat, dan pola-pola sebagai tatanan perilaku anggota masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang lebih kurang dapat berdiri dan masing-masing dari subsistem tersebut akan terikat oleh ikatan primordial.⁵ Sehingga melahirkan multikulturalisme masyarakat Sumatera Utara yaitu paham asas keragaman sosial budaya atau kemajemukan yang sederajat serta setara. Artinya, tidak ada posisi *superior* dan *inferioritas* antar suku. Sebab didalam kebudayaan terdapat berbagai corak budaya. Dalam model multikulturalisme, penekanannya adalah pada kesederajatan ungkapan-ungkapan budaya yang berbeda-beda, pada pengayaan budaya melalui pengadopsian unsur-unsur budaya yang dianggap paling cocok dan berguna bagi pelaku dalam kehidupannya tanpa ada hambatan yang berkenaan dengan asal kebudayaan yang diadopsi tersebut karena adanya batas-batas suku yang bersifat primordial. Dalam konsep multikulturalisme penekanan terletak pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

Fenomena kehidupan masyarakat antar etnik di Sumatera Utara menarik untuk dikaji sebab Sumatera Utara memiliki berbagai keanekaragaman dalam suku, agama, ras, dan antar golongan sering sekali menjadi penyebab pemicu pertikaian. Dengan keberagaman

⁵ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Bandung: Kencana Prenada Media Group 2011). hlm. 552-553.

etnik beberapa kali sering muncul masalah-maslah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena provinsi Sumatera Utara bukan hanya milik satu etnik saja, sehingga diperlukan sikap toleransi dalam berinteraksi dengan masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Setiap individu memiliki tindakan yang tidak serupa ketika berinteraksi dengan umat agama lain atau kelompok etnik lain. Di Sumatera Utara sendiri merupakan wilayah dimana masyarakat didalamnya terdiri dari berbagai macam etnik yaitu Jawa, Batak, India, Tionghoa, Mandailing, Bali, Aceh, Melayu, Minang, dan etnik lainnya. Di Sumatera Utara sendiri, keserasian sosial dalam masyarakat dapat terjalin karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari sejarah dan fakta, bahwa interaksi masyarakat Sumatera Utara terjalin dengan baik tanpa memandang latar belakang etnik. Adanya peran masyarakat terdahulu dalam terbentuknya toleransi di masyarakat Sumatera Utara. Serta, adanya kegiatan dalam masyarakat baik itu secara formal (terstruktur) maupun informal (tidak terstruktur) menjadi media untuk mewujudkan keserasian sosial dalam masyarakat. Komunikasi antarbudaya mengacu pada komunikasi antar orang-orang yang memiliki pekerjaan, nilai, atau cara berperilaku yang berbeda. Secara umum, pola komunikasi dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massa.

Dalam hubungan komunikasi antarbudaya bisa saja terjadi antar etnik Tionghoa dan India, mereka lebih sering melakukan komunikasi antarpribadi dan pola komunikasi kelompok dalam interaksi sehari-hari diantara mereka. Pola komunikasi antarpribadi terjadi pada orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung baik secara verbal maupun non verbal.

Komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ada tiga karakteristik dasar dalam wilayah komunikasi antarpribadi, yaitu:

1. Keduanya memiliki hubungan yang lebih dekat yang tidak mengalami kendala jarak.
- 1.

2. Keduanya aktif dalam mengirim dan menerima pesan, yang langsung dapat melakukan koreksi jika terjadi kesalahpahaman.
3. Pesan tidak hanya bersifat verbal, tetapi melalui stimuli non-verbal yang melengkapi dan mempermudah pesan yang disampaikan, seperti ekspresi muka, lirikan mata, gerakan tangan, baju, wewangian, perhatian dan postur tubuh. Keberhasilan interaksi dan komunikasi itu menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon non-verbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat.

Secara umum, bahwa hubungan etnik Tionghoa dan Tamil dengan masyarakat pribumi di Sumatera Utara terjalin dengan sangat baik. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa konteks yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konteks Ekonomi

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu sarana terjadinya hubungan komunikasi kedua etnik yakni etnik Tionghoa dan India dengan warga pribumi, hal tersebut tidaklah aneh jika dilihat dari sejarahnya dimana salah satu faktor utama datangnya etnik Tionghoa ke Indonesia ialah faktor ekonomi.

Para etnik Tionghoa yang tinggal di Sumatera Utara kebanyakan berprofesi sebagai pedagang, dan selebihnya adalah pengusaha ataupun bekerja di kantor hal ini berlangsung sudah dari zaman dahulu. Begitu juga dengan etnik India seperti Tamil, Punjabi maupun Benggalinya mayoritas dari masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta juga dari dulu hingga sekarang.

Terkait dengan konteks ekonomi, bukan pada kegiatan jual beli saja tetapi terjadi pula hubungan kerja sama dalam bidang usaha dagang dimana masyarakat pribumi menjadi karyawan, dan menjadi pembeli sedangkan etnik Tionghoa atau India menjadi pemilik, begitu juga sebaliknya dimana etnik pribumi sebagai pemilik dan etnik Tionghoa dan India menjadi karyawannya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan sarana dalam menunjang proses terjadinya hubungan komunikasi etnik Tionghoa dan India dengan pribumi.

2. Konteks Sosial

Salah satu ciri khas masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong bisa ditemukan dalam berbagai kegiatan. Dalam komunikasi antarpribadi pada konteks sosial yang terjadi di Sumatera Utara dapat dilihat dari kegiatan kerja bakti lingkungan. Saat kegiatan kerja bakti berlangsung, disitulah masyarakat dari masing-masing kelompok etnik tersebut bisa berkomunikasi.

Komunikasi antarpribadi bukan hanya terjadi pada saat kerja bakti saja, tetapi terjadi pula saat ada masyarakat yang tertimpa musibah seperti kematian atau lainnya. Warga sukarela dengan kesadaran dari diri sendiri turun tangan untuk membantu jika ada tetangganya yang sedang kesusahan.

Komunikasi antarpribadi merupakan salah satu pendukung komunikasi kelompok yang terjadi di masyarakat. Tanpa adanya komunikasi antarpribadi tentu komunikasi antarkelompok tidak akan terjadi. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar tentang komunikasi antarbudaya bahwa dalam komunikasi atau interaksi antarbudaya terkandung isi dan relasi antarpribadi dan gaya personal komunikasi antarbudaya.

Walaupun tidak dipungkiri terkadang masyarakat etnik Tionghoa kebanyakan membatasi diri dalam pergaulan dengan masyarakat pribumi, namun hal tersebut tidak menjadi dinding pembatas. Dari masing-masing kelompok etnik saling mengontrol diri agar tidak terjadi konflik. Sedangkan kelompok etnik India hubungan komunikasinya dengan pribadi justru menjadi kebalikannya, mayoritas dari masyarakat India seperti etnik Tamil dan Punjabi, mereka memang dari dulu sangat akrab dengan masyarakat pribumi, terutama yang berasal dari etnik Tamil. Hal ini disebabkan budaya Indonesia yang tidak memakai sistem kasta-kasta atau pengelompokan masyarakat berdasarkan keturunannya itu yang membuat masyarakat etnik Tamil sangat senang berbaur dengan masyarakat pribumi, baik itu Batak,

Mandailing, Jawa, Aceh, Minang, dan lainnya. Bahkan tidak jarang ditemukan etnik Tamil ada di warung-warung minum yang menjual minuman kearifan lokal yang disebut tuak. Karena dari dulu memang masyarakat Tamil terutama nya sangat suka dengan minuman-minuman lokal ini, sehingga di kedai-kedai tuak atau disebut lapo mereka sering berbaur dengan etnik Batak ataupun Jawa.

Komunikasi kelompok yang terjadi antaretnik sering terjadi ketika mengadakan rapat sebagai sarana untuk mempererat hubungan diantara etnis serta diharapkan dapat menyelesaikan konflik apabila ada dengan mudah. Didalam komunikasi sosial, fungsi komunikasi kelompok seperti ini adalah mempersatukan perbedaan pendapat orang per orang sehingga dalam hal ini dapat ditemukan kesamaan dalam cara berpikir. Interaksi kelompok atau komunikasi kelompok seperti ini merupakan salah satu komunikasi yang digunakan etnik di Sumatera Utara sebagai sarana mempererat keberagaman etnik di Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa konteks, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Konteks Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah merupakan bagian sarana pendukung komunikasi antaretnik di daerah Sumatera Utara, hal ini dapat dilihat dari ketidak adanya pembatas pergaulan yang disebabkan perbedaan etnik dalam mengikuti kegiatan pendidikan formal maupun non formal mulai jenjang pendidikan Pendidikan Anau Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi tidak ada perbedaan perlakuan atau pembatasan terhadap etnik tertentu untuk masuk dan mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian sekolah juga melalui kegiatan pendidikan dapat membentuk pola komunikasi serta menjadi sarana dan prasarana yang menunjang proses terjadinya komunikasi antarpribadi serta komunikasi antarkelompok khususnya di kalangan anak-anak.

Menyadari bahwa diwilayah Sumatera Utara memiliki banyak suku, etnik, budaya serta agama yang berbeda-beda. Maka pendidikan mutlak diperlukan, yaitu dengan cara menjaga kebudayaan disuatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya,

menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan antar siswa yang beraneka ragam suku, etnik juga agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengajarkan keterbukaan dan dialog. Bentuk pendidikan seperti inilah yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan tersebut dalam rangka mengantisipasi konflik etnik, keagamaan dan menuju perdamaian yang dikenal dengan sebutan *pluralisme* dalam pendidikan.

Sesuai dengan tujuan akhir pendidikan yaitu perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka seyogianya pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorong peserta didik mengambil keputusan untuk berubah. Dengan demikian untuk membentuk generasi muda yang memiliki sikap pluralis juga diorientasikan untuk menanam empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama.

2. Konteks Agama

Kemajemukan suatu masyarakat ditandai dengan adanya keterbukaan dalam kehidupan beragama yang dimana tingkat toleransi antar umat beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama dengan penganut agama lainnya, dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan (ibadah) masing-masing tanpa adanya tekanan juga paksaan dari satu pihak ke pihak lainnya.

Refleksi dari sikap toleransi itu, salah satunya adalah dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong menolong. Dalam konteks ini, sikap toleransi sangat diperlukan guna menghindari sikap egoisme yang berupa egoisme individu maupun kelompok. Untuk melakukan sikap toleransi ini maka diperlukanlah komunikasi antarumat beragama, dimana masing-masing dari setiap kelompok agama memberikan keluasaan untuk mereka yang berbeda agama menjalankan ibdahnya, selain itu melakukan kegiatan yang bersifat saling membantu. Hal ini lah yang terjadi di Sumatera Utara sudah sejak lama.

Keberagaman etnik di Sumatera Utara terjalin dengan baik hingga sekarang. Bisa dikatakan dalam semua kegiatan yang ada Sumatera Utaraselalu memanfaatkan keberagaman etnik tanpa memperdulikan atau membeda-bedakan latarbelakang agama, suku, ras, dan budaya, semuanya tetap mengambil bagian dalam mensukseskankegiatan-kegiatan atau acara di wilayah Sumatera Utara, baik itu kegiatan formal maupun kegiatan yang tidak formal. Momen-moen inilah yang mempertemukan masyarakat dari kelompok etnik manapun menjadi satu. Rasa simpati dan empati ini sudah terjadi sejak dari keturunan-keturunan sebelumnya, sehingga sampai sekarang rasa peduli terhadap sesama masyarakat Sumatera Utara tetap kuat, hal ini juga yang membuat adanya konflik-konflik jarang terjadi di masyarakat, di satu sisi juga masing-masing individu tiap masyarakat saling menghargai satu dengan yang lainnya dalam setiap kegiatan sehari-hari mereka.

Kebudayaan dapat dipandang sebagai landasan nilai dari segala perwujudan dalam kenyataan obyektif, atau konfigurasi dari semua nilai-nilai dasar dalam kehidupan kemasyarakatan kemanusiaan. Maka, dalam kebudayaan itu kita dapat menemukan nilai estetik, yang akan menentukan corak dan bentuk kesenian

D. Akulturasi Budaya Masyarakat Sumatera Utara

Akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru, namun unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada.Sedangkan budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Dalam hal ini, semua anggota dalam budaya memiliki asumsi-asumsi yang serupa tentang bagaimana seorang berfikir, berperilaku, dan berkomunikasi, serta cenderung untuk melakukan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Beberapa budaya ada yang di bentuk berbagai kelompok yang berbeda-beda dan terpisah, tetapi ada juga yang memiliki kecenderungan homogen. Kelompok berbeda (*distinct group*) yang ada dalam wilayah budaya mayoritas lebih tepat dikatakan sebagai subbudaya (*subcultural*).

Sumatera Utaratermasuk daerah yang memiliki subbudaya yang sangat beragam baik etnis maupun agama. Sehingga akulturasi budaya adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa yang dipengaruhi oleh unsur-unsur suatu kebudayaan lain sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan asli tersebut. Adapun bentuk-bentuk akulturasi budaya di Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Tahlilan Dalam Peringatan Kematian

Tahlilan itu berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *tahlilan*, artinya membaca kalimat *la ilaha illallah*. Kata tahlilan merupakan kata yang di singkat dari kalimat *la ilaha illallah*. Penyingkatan ini sama seperti takbir (dari *Allahu Akbar*), *hamdallah* (dari *alhamdulillah*), *haulakah* (dari *la haula wala quwwata illah billah*), *basmallah* (dari *bismillah ar-rahman ar-rahim*) dan sebagainya. Tahlilan merupakan tradisi yang sudah di jalani oleh sebagian masyarakat secara turun-temurun semenjak masuknya Islam di Jawa hingga sekarang ini untuk memperingati waktu kematian seseorang. “*tahlilan*” adalah tradisi masyarakat Muslim dalam rangka mendo’akan mereka yang telah meninggal secara bersama-sama.⁶

2. Yasinan

Yasinan adalah sebuah kegiatan membaca surah Yasin secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang, biasanya *yasinan* juga dilengkapi dengan bacaan al-fatihah, dan bacaan tahlil serta ditutup dengan do’a⁷ dan diaminin oleh jamaah. *Yasinan* ini dilakukan oleh masyarakat Muslim Sumatera Utara dalam waktu-waktu tertentu, misalnya malam Jum’at *yasinan* juga dilaksanakan untuk memperingati dan mengirim doa bagi keluarga yang telah meninggal.

6 Munawar Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka pesanteren:, 2012), hlm.276.

7 Muhammad Ma’ruf Khozim, *Tahlil Bid’ah Hasanah*, (Surabaya: Muara Prosesif : muara prosesif, 2013). hlm.1

3. *Maulid* Nabi Muhammad SAW

Secara bahasa *maulud* adalah waktu kelahiran. Secara istilah diartikan sebagai perayaan sebagai rasa syukur dan gembira atas kelahiran Rasulullah SAW yang biasanya dilakukan pada bulan Rabi'wul Awal.

Akulturasinya budaya di atas, tidak terlepas dari agama sebab masyarakat Sumatera Utara terdiri dari berbagai kepercayaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang mana masing-masing agama tersebut memberikan warna tersendiri dalam akulturasi budaya di Sumatera Utara. Agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan tatanan/ perintah dari kehidupan sehingga harus dihargai dan dihormati. Agama juga merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Adapun implementasi menghargai keberagaman agama dalam pada kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Utara yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menghormati dan menghargai hak-hak penganut agama lain. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Namun, kekuasaan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan ini dilakukan agar pelaksanaan hak seseorang tidak sampai melanggar hak orang lain.
2. Menjalankan semua kewajibannya sebagai umat beragama dengan baik. Kewajiban adalah sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya.
3. Saling membantu atau bergotong royong dalam kegiatan kemasyarakatan tanpa memandang agama sebagai pembatasnya.

Dalam keberagaman agama, bahwa masyarakat Sumatera Utara sangat menghargai apabila ada salah satu umat beragama yang sedang merayakan hari besarnya. Seperti pada saat agama Islam sedang merayakan hari suci atau Idul Fitri ataupun Lebaran, masyarakat yang

beragama lain mengucapkan “Selamat Idul Fitri Mohon Maaf Lahir dan Batin” kepada yang beragama Islam walaupun semisal tidak masyarakat yang beragama Islam tersebut yang mengucapkannya terdahulu. Begitu juga pada saat umat Nasrani merayakan Hari Natal, masyarakat yang beragama lain juga mengucapkan “Selamat Hari Natal”. Umat beragama Hindu merayakan Deepavali, masyarakat etnis Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek, tetap juga masyarakat dari agama lain mengucapkan selamat atas perayaan mereka tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya karena toleransi masyarakat Sumatera Utara tinggi dalam menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biasanya pada saat salah satu umat beragama sedang merayakan hari besar, maka tidak jarang masyarakat yang merayakan hari besar tersebut mengundang masyarakat dari agama lain untuk datang kerumah mereka terlepas dari latar belakang etnis mereka apapun itu dalam rangka acara syukuran seperti makan-makan dan doa ucapan syukur. Ini yang membuat toleransi antar umat bergama di Sumatera Utara tetap terawat.

Disini terlihat, bahwa kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam terjalinnya komunikasi yang baik dalam keberagaman etnik di Sumatera Utara. Kegiatan keagamaan ini biasanya dilaksanakan sesuai dengan tanggal-tanggal atau hari-hari besar keagamaan yang ada di kalender. Tapi tidak semuanya kegiatan ini berdasarkan hari raya atau hari besar keagamaan saja, ada juga kegiatan ini dilaksanakan bukan karena hari keagamaan melainkan dilakukan pihak keluarga dari salah satu masyarakat itu sendiri.

1. Kegiatan keagamaan di hari peringatan atau Hari Raya

Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Hari Raya atau hari besar yang dalam perhitungan tanggal kalender Indonesia sebagai suatu peringatan agama tertentu. Seperti beberapa contoh, yaitu adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi masyarakat yang beragama Islam, peringatan Natal bagi agama Kristen Protestan dan Katholik, peringatan Imlek bagi etnis Tionghoa yang beragama Buddha terutama, peringatan Deepavali atau Deepawali bagi orang India yang beragama Hindu, berbeda lagi dengan peringatan agama Hindu yang di Bali, mereka tidak melakukan peringatan Deepawali atau semacamnya, melainkan peringatan Nyepi.

Tradisi di masyarakat Sumatera Utara yang majemuk ini, apabila ada kegiatan atau acara keagamaan biasanya masyarakat dari golongan agama lain atau kelompok etnik lain tetap mendatangi rumah-rumah masyarakat yang sedang merayakan atau memperingatinya. Contohnya, pada saat Tahun Baru Imlek yang dilakukan etnik Tionghoa beragama Buddha, maka masyarakat dari etnik lain pun ikut memeriahkannya seperti etnik Batak, Jawa, India dan lainnya sering mendatangi kerumah-rumah warga yang sedang merayakan hari besar tersebut. Hal seperti ini sudah menjadi salah satu tradisi pada masyarakat Sumatera Utara terutama teman atau sahabat yang satu tempat tongkrongan, STM, ataupun teman satu pekerjaan datang untuk mengucapkan selamat, kemudian mereka saling bercerita-cerita seperti biasanya, dan tradisi pada saat peringatan Imlek ini yang tidak kalah penting adalah tradisi meminta angpao kepada tuan rumah atau pemilik rumah yang merayakannya. Angpao biasanya berupa uang atau pemberian lain dari tuan rumah untuk para tamu-tamu yang datang kerumahnya dalam peringatan Imlek sebagai bentuk keikhlasan, doa, dan juga agar diberi rezeki yang berlimpah oleh Sang Pencipta menurut ajaran agama mereka.

Sama halnya, saat masyarakat yang beragama Kristen Protestan ataupun Kristen Katholik merayakan hari peringatan Natal, mereka juga mengundang tetangga-tetangga mereka untuk datang makan-makanan yang dimasak mereka dan biasanya dengan tradisi makan-makan kue Natal yang disediakan oleh tuan rumah, hal ini hampir sama dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan masyarakat yang beragama Islam, dimana masyarakat dari agama lain datang mengunjungi rumah-rumah yang merayakan sambil mengucapkan selamat dan saling bermaaf-maafan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan apabila ada. Dan selain itu kegiatan yang dilakukan pada saat acara peringatan Natal dan peringatan Idul Fitri juga hampir sama dimana masing-masing masyarakat yang merayakan peringatan mereka melakukan ibadah sesama umat masing-masing yang sama dengan agama mereka tersebut.

Begitu juga, pada saat peringatan Deepawali atau juga Deepawali pada masyarakat India yang beragama Hindu juga tidak jauh berbeda dengan hari peringatan-peringatan keagamaan seperti agama lainnya. Pada peringatan Deepawali ini juga masyarakat dari agama lain datang mengunjungi rumah-rumah tetangganya untuk mengucapkan selamat, makan bersama, dan saling bercerita-cerita seperti biasanya.

Selain ini, di Sumatera Utara, banyak terdapat cara-cara unik dalam menjunjung tinggi toleransi beragama yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Sumatera Utara dari dulu. Seperti, pada saat umat Nasrani sedang melakukan ibadah Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang beragama Islam dan Hindu mengambil alih dalam membantu umat Nasrani dalam menunaikan ibadah mereka, dimana umat Islam dan Hindu berperan sebagai pihak yang menjaga keamanan dan kenyamanan umat Nasrani agar tenang dalam beribadah, seperti mengatur kegiatan arus lalu lintas, mengatur parkir kendaraan, menjaga keamanan tempat ibadah dari hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan beribadah saudara mereka yang beragama Nasrani sampai selesai beribadah. Begitu juga ketika umat Muslim sedang shalat waktu Idul Fitri atau bahkan pada waktu shalat Jum'at, maka yang beragama Nasrani yang bertugas menjadi penjaga keamanan seperti parkir, tutup jalan supaya orang yang mau lewat bisa mutar dari jalan yang diarahkan supaya tidak mengganggu ibadah shalat Jum'at tersebut. Buat masyarakat Sumatera Utara hal seperti ini sangat menyenangkan, karena di Sumatera Utara masyarakatnya saling toleransi dan menghargai sekalipun berbeda agama sebab semua merasa sama bersaudara.

Begitu juga pada saat umat Islam merayakan suatu kegiatan acara keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha, maka masyarakat yang beragama Nasrani dan Hindu mengambil posisi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan umat Islam yang sedang menunaikan ibadah tersebut. Begitu juga ketika umat Buddha mengadakan ibadah di klenteng atau vihara, maka masyarakat yang beragama umat Islam, Nasrani, dan Hindu pun mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bagi saudara-saudaranya yang beragama Buddha. Beginilah gambaran keberagaman etnik di Sumatera Utara dari aspek

agama yang sering terjadi di Sumatera Utara dan bisa dikatakan hal ini sudah menjadi tradisi sejak dari lama, dan sampai sekarang jiwa toleransi dan solidaritas seperti ini merupakan warisan dari para pendahulu untuk dijaga dan dilestraikan buat generasi-generasi selanjutnya.

2. Kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat pribadi

Kegiatan keagamaan yang dilakukan pribadi ini, maksudnya kegiatan atau acara yang dibuat salah satu pihak warga untuk membuat acara syukuran sesuai agama yang dianutnya dan itu bukan pada saat hari raya atau hari besar keagamaan. Salah satu contoh kegiatan dalam hal ini adalah ada masyarakat yang beragama Islam dan anaknya sedang sunatan, maka orang tuanya membuat acara atau kegiatan agama karena anaknya telah melakukan sunatan. Kegiatan lain yang sering terjadi di Sumatera Utara seperti acara peringatan lahiran anak yang dilakukan oleh semua etnik dengan mengundang masyarakat-masyarakat sekitar tanpa memperdulikan apa latar belakang suku dan agama.

Selain memperingati hari-hari besar tersebut di atas, bahwa dalam memupuk toleransi beragama di Sumatera Utara juga dilakukan dalam aspek kematian. Setiap makhluk yang hidup dan bernyawa pasti akan mati. Kematian tersebut akan menjadi tanggung jawab yang harus diurus oleh masyarakat yang ditinggalkannya. Apabila ada salah seorang masyarakat yang meninggal dunia, maka salah satu dari keluarganya akan mengumumkan kematian tersebut di musholla atau masjid dengan menggunakan microphone agar terdengar oleh semua masyarakat yang ada di masing-masing lingkungan sekitar mesjid atau musholla tersebut.

Apabila yang meninggal itu masyarakat yang beragama Hindu maka salah satu di antara keluarganya akan memberitahukan hal tersebut kepada tetangga terdekatnya, kemudian tetangga terdekatnya akan memberitahukannya kepada tetangga yang lain, dengan kata lain apabila yang meninggal adalah warga Hindu maka berita tersebut akan disampaikan melalui mulut kemulut. Begitu juga dengan masyarakat dari agama lainnya. Apabila ada terdengar pengumuman yang meninggal, misalnya yang meninggal adalah salah satu masyarakat yang beragama Islam, maka para warga akan berbondong-bondong

untuk mendatangi rumah yang sedang kemalangan tersebut, baik itu dari warga yang beragama Hindu, Kristen Protestan, Katholik, Buddha, karena mereka akan saling membantu tanpa membedakan latar belakang agama dan etnik dari yang berduka, memang dalam kepengurusan jenazah tersebut yang beragama Hindu, Kristen, Katholik, dan Buddha tidak akan ikut campur karena jelas hal tersebut sudah memiliki perbedaan sesuai dengan ajaran masing-masing, tetapi yang mengurus jenazah tersebut adalah yang seagama dengannya yaitu agama Islam dan akan segera diurus oleh bilal pengurus jenazah. Sedangkan peran yang beragama Batak, Jawa, Aceh, Mandailing, Tionghoa, Tamil, dan lainnya dalam kematian tersebut adalah ikut serta dalam membantu menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan, misalnya menyiapkan tenda, mengangkati kursi-kursi. Tidak hanya bantuan yang menggunakan jasa atau tenaga. Dalam hal ini ada juga bantuan yang sudah disepakati bersama apabila ada kematian yaitu bantuan dari STM. STM khusus untuk kemalangan ini fungsinya untuk membantu keluarga yang sedang berduka.

Apabila yang meninggal adalah suku Batak dan beragama Kristen, maka biasanya juga pihak keluarga hanyalah melakukan panggilan untuk memberikabar ke saudara atau keluarga besar mereka bahwasanya ada anggota keluarga mereka meninggal dunia. Untuk masalah kepengurusan jenazah juga tetap menjadi urusan pihak keluarganya. Dan masyarakat dari etnik Jawa, Tionghoa, Aceh, Mandailing, dan India membantu memberikan kabar kepada masyarakat-masyarakat di setiap lingkungan bahwasanya ada warga mereka yang berduka. Dalam hal ini peran etnik lain juga dibutuhkan semisal untuk memberikan kabar kepada STM untuk kemalangan dan juga masyarakat yang beragama Kristen akan membantu memberi tahu pihak dari gereja yang meninggal agar pihak dari gereja yang meninggal ini membantu mengurus acara ibadah buat keluarga yang berduka, kemudian memberi kabar kepada jemaat satu gerejanya bahwasanya ada jemaat mereka yang meninggal, dan juga untuk membantu keluarga yang berduka dalam mengurus penguburannya. Dan dalam hal ini sedikit rumit juga, karena dalam hal urusan gereja tadi, tidak bisa sembarangan menghubungi atau meminta bantuan ke gereja yang dimana yang meninggal tadi tidak

terdaftar dalam jemaat gereja tersebut. Sebagai contoh yang meninggal adalah jemaat dari Gereja HKBP, maka pihak keluarga atau masyarakat yang membantu tadi harus memberi kabar kepada Gereja HKBP yang lebih tepatnya di Gereja HKBP mana dia biasa beribadah dan terdaftar, sehingga tidak bisa sembarangan. Apabila di jemaat di Gereja HKBP semisal, maka apabila masyarakat mengabari pihak dari Gereja GKPI atau organisasi gereja diluar HKBP maka tidak akan bisa ditanggung jawabi sembarangan. Tujuan lain dari mengabari pihak gereja ini, selain dari membantu untuk penguburan juga untuk membuat tata acara penghiburan bagi Kristen Protestan dan sakramen kematian bagi Katholik ditujukan untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk mendoakan yang meninggal serta menguatkan pihak keluarga yang ditinggalkan.

Begitu juga dengan masyarakat yang beragama Hindu tetap sama, pada saat ada yang berduka masyarakat dari etnik Hindumaka dari etnik lain pun akan selalu turut membantu dengan tidak peduli latarbelakang yang meninggal tersebut mulai mengangkati kursi-kursi dari STM, memanggil ambulance, dan mengawal ambulance sampai ke tempat pembakaran jenazah tersebut. Tidak hanya sampai di situ, masyarakat yang berbeda etnik juga banyak yang ikut membantu seperti halnya mencuci piring, membantu menyiapkan hidangan dan minuman bagi para tamu yang datang melayat, mempersiapkan peralatan-peralatan seperti soundsystem, memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar tidak mengalami sedih berkepanjangan. Hal seperti ini dilakukan untuk semua kalangan masyarakat manapun Sumatera Utara tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, golongan, dan budayanya, semuanya sama di mata masyarakat Sumatera Utara karena semuanya merasa saling bersaudara.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa salah satu yang dapat mempererat tali toleransi antar umat beragama di Sumatera Utara adalah aspek gotong royong. Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka-mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam sebuah komunitas akan terlihat jelas menyatu dan saling berbaurnya antar komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Utara. Gotong-royong

juga terjadi dalam beberapa aktivitas kehidupan, seperti gotong-royong dalam bentuk kerjabakti, dilakukan untuk kepentingan bersama, kemudian gotong-royong dalam bentuk tolong-menolong pada saat ada masyarakat yang sedang melakukan pesta pernikahan, atau khitanan, masyarakat membantu dengan memberi sumbangan dari kenalan, tetangga ataupun kerabat datang membantu dalam bentuk bahan makanan, uang, ataupun tenaga, kemudian bantuan itu harus dikembalikan minimal dengan harga atau tenaga yang sama dikemudian hari pada saat ada lagi salah satu masyarakat yang sedang mengadakan pesta atau acara. Bahkan gotong-royong ini juga bisa dalam hal saling membantu yaitu apabila ada salah satu masyarakat yang mengalami musibah ataupun kemalangan maka akan dibantu secara bersama-sama atas dasar rasa kemanusiaan yang muncul di antara masyarakat Sumatera Utara, karena musibah atau kemalangan tidak bisa diperhitungkan ataupun diketahui kedatangannya, sehingga masyarakat yang mendapat musibah tersebut memerlukan bantuan dari masyarakat lainnya.

(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)



BAB 4

DINAMIKA MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI BUDAYA SOSIAL

A. Moderasi Beragama Di Tapanuli Selatan

Masyarakat Tapanuli Selatan merupakan masyarakat yang plural dan multikultural. Hal ini dilihat dari masyarakatnya yang beragam suku, agama, ras, dan budaya. Tapanuli Selatan secara garis besar di dominasi oleh suku Batak Angkola. Tapanuli Selatan dikenal “masyarakat muslim beradat” yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Meskipun memegang teguh tradisi leluhur, masyarakat di wilayah Tapanuli Selatan tetap memahami tradisi keagamaan secara baik.

Seiring dengan perkembangannya, Tapanuli Selatan terbiasa terbuka dan menerima keanekaragaman baik dari sisi suku, agama, ras, maupun antarbudaya, termasuk di dalamnya meliputi perbedaan pandangan aliran keagamaan. Dalam tradisi masyarakat Tapanuli Selatan dikenal istilah *dalihan natolu*. Istilah ini menjadi kearifan lokal yang terus-menerus disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, yang memungkinkan upaya penguatan moderasi beragama di masyarakat Tapanuli Selatan.

Sikap terbuka masyarakat Tapanuli Selatan salah satunya terlihat dari aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan. Misalnya aktivitas ormas Islam

yang dilakukan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Washliyah, dan Jamaah Tabligh. Dengan umat agama non-Islam pun demikian, seperti tampak pada Gereja Protestan, Gereja Pantekosta, dan Gereja Katolik. Pun demikian, dengan pemeluk agama Hindu, Buddha, dan Konghucu, bisa melakukan aktivitas keagamaan.

Toleransi beragama merupakan buah, moderasi beragama. Toleransi yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri serta berpikir positif. Toleransi beragama yang ditekankan adalah toleransi intra-agama (internal) dan antar agama (eksternal), baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Melalui relasi intra-agama, penelitian ini mendeskripsikan sikap hubungan antar ormas keagamaan dan pemahaman minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar suatu agama. Sedangkan toleransi antaragama (eksternal) menggambarkan sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain.

Perbedaan paham keagamaan adalah realitas kehidupan. Perbedaan ini bisa menjadi potensi, namun juga bisa menjadi persoalan. Menjadi potensi bila dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif untuk memperkaya makna hidup. Menjadi persoalan bila disikapi secara eksklusif dan intoleran. Toleransi intra-agama di Kota Tapanuli Selatan sangat berpotensi ke arah yang baik ketika ormas-ormas di Tapanuli Selatan, selain dengan ormas yang dilarang oleh pemerintah tentunya, dapat bekerja sama dan saling memahami satu sama lain.

Dalam konteks umat Islam misalnya, para narasumber menuturkan bahwa tidak ada perbedaan menonjol antara satu ormas dengan ormas lainnya sebagaimana di Tapanuli Selatan, perbedaan hanya bendera saja". Hal ini merujuk pada tradisi keagamaan yang dilakukan oleh para pemeluk agama Islam di Tapanuli Selatan. Misalnya, warga

Muhammadiyah yang notabene tidak tahlilan, ikut melaksanakan tradisi itu bila ada hari-hari besar keagamaan yang diselenggarakan oleh NU dan al-Khairat, bila ada tetangga yang dirundung kematian, pernikahan, dan lain-lainnya.

Ungkapan “perbedaan hanya bendera saja” semakin ditegaskan ketika Ketua MUI Tapanuli Selatan, Ahmad Ghazali, mengungkapkan bahwa dirinya selain sebagai pengurus MUI, juga merupakan anggota NU. Sementara dalam konteks umat Kristiani dibentuk wadah Badan Kerjasama Antar Gereja, yang salah satu fungsinya sebagai mediator agar mampu bekerjasama. Badan kerja sama ini meliputi umat Katolik dan Protestan.

Sementara persoalan intra-agama terjadi ketika ormas keagamaan bersinggungan dengan minoritas yang dianggap menyinggung suatu agama. Dalam konteks umat Islam di Tapanuli Selatan, kasus SARA di desa Aek Badak Julu Kecamatan Sayur Matinggi menjadi salah satunya. Kasus ini muncul pada tahun 2016. Kerusuhan antar warga muslim dan non Muslim menyebabkan 4 korban terluka ditambah dengan rumah warga yang mengalami kerusakan. Pada mulanya aktivitas kehidupan antar umat beragama di Aek Badak Julu berjalan secara baik. Keresahan masyarakat terjadi berawal dari tautan penghinaan dan pelecehan agama tertentu di Facebook sehingga menyulut kemarahan warga. Gesekan antar warga pun terjadi, saling lempar batu di antara warga pun tak terelakkan. Penyerangan itu langsung dibubarkan aparat Polres Tapanuli Selatan dan Dandim 0212/TS.

Dalam konteks saat ini, budaya khususnya memiliki peran, menjadi instrumen yang mampu mengayomi semua agama karena adanya kesadaran bahwa “Budaya Milik Bersama”, sebagaimana pernyataan Raja Kuria Muaratais H. Suangkupon Harahap “agama yang membudaya”. Keanekaragaman agama pada suku Batak menjadi penguat bagi sistem sosial yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip “*dalihan natolu*”. Hal tersebut diimplementasikan misalnya melalui dialog antarumat beragama, serta doa bersama. Kerlip-kerlip lampu cemara gereja menyimbolkan bahwa hak-hak minoritas, dalam hal ini ditandakan oleh umat Kristiani, harus tetap hidup dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Instansi lain yang menggalakkan

relasi dan toleransi antaragama adalah Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Festival Budaya Nusantara yang menyuguhkan festival kuliner, penampilan tari-tarian, pertunjukan baju adat, serta pembacaan narasi suku-suku di Indonesia menjadi agenda tahunan FPK. Kondisi masyarakat yang multikultur menjadi inspirasi mereka.

Pelaksanaan festival ini sebagai upaya untuk membangun kebersamaan sekaligus melestarikan budaya, baik kuliner maupun seni budaya. Keberagaman merupakan sebuah keindahan dalam menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong antar suku dan agama yang tinggal di Tapanuli Selatan. Tak hanya melakukan penguatan dan penyadaran dalam konteks lokal aktivitas-aktivitas yang digalakkan ormas turut memerhatikan wilayah lain di Indonesia. Misalnya, bagaimana mereka menyuarakan aspirasi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di Maluku, Ambon dan Papua.

Terkait dengan pendirian rumah ibadah serta interaksi antar pemeluk agama, Pemerintah Tapanuli Selatan mengikuti kebijakan atau pola yang diterapkan berdasarkan budaya yang berlaku di masyarakat. Islam sebagai agama mayoritas banyak mendirikan masjid dan musala yang menjamur di berbagai wilayah. Adapun beberapa desa yang dihuni oleh mayoritas warga yang beragama Kristen tetap memiliki kedekatan dengan umat Islam. Beberapa warga Kristen menduduki jabatan tertentu di Pemerintahan Tapanuli Selatan. Mereka kerap mendapat kehormatan berada di barisan depan saat acara-acara sosial kemasyarakatan.

Interaksi umat beragama sangat cair dan dinamis. Satu sama lain saling memahami keteguhan dan batasan masing-masing. Misalnya, setiap ada acara pernikahan dan kematian, warga Islam dan Kristen saling mengunjungi. Yang menarik, bila ada warga muslim berkunjung ke rumah orang Nasrani, tuan rumah menyuguhkan hidangan dengan alat makan (piring, gelas, sendok, dan lain-lain) yang mereka sediakan khusus untuk muslim. Karena mereka tahu ada perbedaan-perbedaan mendasar antara muslim dan Nasrani, maka mereka melakukan itu. Toleransi terjaga dengan sangat baik di daerah ini.

B. Akomodasi Agama dan Budaya di Tapanuli Selatan

Praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Meskipun tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur, akan tetapi orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Kebudayaan di Tapanuli Selatan terbentuk dari tradisi-tradisi leluhur yang dirawat hingga kini. Tradisi lisan yang disampaikan secara turun temurun menjadi acuan masyarakat dalam beragama. Hal ini terujar dalam: “*Hombar adat dohot ibadat*”. Adat dan Agama berjalan seiringan, bahkan ada beberapa adat (masyarakat) bersumber dari agama seperti melantunkan al-barzanji dalam tradisi *mangayun*. Agama bersumber dari Kitabullah. Kitabullah bersumber dari Allah Swt.”

Pintu masuk asimilasi antara budaya dan agama dalam masyarakat Tapanuli Selatan terjadi sejak penyebaran agama Islam yang tidak terlepas dari peristiwa perang Paderi di Sumatera Barat. Hal ini semakin diperkuat ketika masyarakat belajar agama ke tuan guru melalui pengajian rutin. Sentuhan agama dalam tradisi lokal mengubah tradisi menjadi lebih islami sehingga tatanan sosial masyarakat semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Integrasi agama dan budaya dalam kehidupan sosial masyarakat Tapanuli Selatan tercermin dalam falsafah “*hombar adat dohot ibadat*” sebagai salah satu aturan dasar, pedoman, dan pengaturan tata nilai. Pelaksananya bersumber pada lima kerangka dasar, yaitu: *adat sadalan dohot ugamo*, yakni adat harus sejalan dengan agama sebagai hukum dasar yang bersumber dari al-Qur`an dan al-Sunnah. Orang Batak, masih cukup yakin dan percaya diridengan sistem yang mereka punya. Sebab, lingkaran adat tidakhanya bertahan karena aspek norma dan etika yang terusdihidupkan namun juga keyakinan atas ancaman kesengsaraanjika melanggar. Seberapa lama unsur magis dari kepercayaanadat bisa bertahan, jika nalar dan rasionalitas generasi semakinmeninggi seiring dengan berkembangnya pendidikan dan

pemikiran masyarakat. Begitu juga peluang dan gejala puritanisme dari masing-masing agama, karena sejatinya agama besar cenderung melakukan purifikasi.

Kehadiran Islam di bumi nusantara tak dapat dipungkiri menjadi agama yang muda diterima karena keramahannya dan tidak abai terhadap kultur budaya yang telah mengakar di masyarakat. Penyebarannya pun dilakukan tanpa ada tekanan, justru sebaliknya Islam ditebarkan secara damai, memberikan penghargaan tinggi terhadap budaya yang sedang dipraktikkan masyarakat kala itu, tanpa menghilangkan identitas kebudayaan itu sendiri. Hal inilah yang menarik simpatik masyarakat Indonesia untuk memeluk dan mengikuti ajaran Islam. Antara Islam dan budaya lokal telah terjadi interaksi lebih bersifat lokal. Ajaran agama dalam hal Islam menjadi penentu dan semakin menguatkan praktik budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Ajaran agama yang bersifat universal akan mencapai realitas sosial budaya lokal.

Masyarakat multikultur seperti di Tapanuli Selatan tidak selamanya bisa hidup berdampingan sebagaimana yang seharusnya terjadi. Tantangan masyarakat yang memiliki keragaman kultur, budaya, ras bahkan agama pada suatu waktu akan menjadi persoalan. Beberapa tragedi yang telah terjadi di Tapanuli Selatan, sebagai akibat kekurangan dalam mengelola keberagaman yang berujung pada konflik horisontal yang mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik sebagai sebuah pengalaman pahit. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, maka salah satu pendekatan yang dianggap tepat oleh berbagai pakar yakni memperkuat falsafah lokal atau kearifan lokal yang penuh dengan pesan-pesan kedamaian, yang tentunya tetap dibarengi paham keagamaan yang bijak dengan mengkampanyekannya sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang multikultur.

Kearifan lokal atau *local wisdom* menjadi salah satu alternatif dalam mbingkai keanekaragaman pada masyarakat plural. Kearifan lokal dapat makna sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang melahirkan sikap bijaksana, bersifat baik dan telah diikuti dan dipraktikkan pada sebuah masyarakat secara turun temurun dan menjadi pengikat kebersamaan di antara kelompok masyarakat secara internal maupun kelompok yang berbeda suku, ras maupun agamanya.

Kearifan lokal dapat pula dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat (*lokal knowledge*) atau kecerdasan setempat (*lokal genius*).

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu sebagai bentuk pengalaman dari sebuah masyarakat. Pendekatan kebudayaan lokal dapat menjadi kunci membangun paradigma dan sikap moderasi beragama. Di sisi lain, dapat pula menahan pengaruh penetrasi radikalisme beragama. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat mengantarkan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran serta menjadikan suasana kehidupan keagamaan yang damai, dinamis dan semarak. Agama tidak datang untuk memberanguskan varian lokal yang menghampirinya. Sebaliknya agama mesti hadir untuk kemudian masuk dan berdifusi hingga memberikan pengaruh pada wajah kebudayaan sebuah komunitas tanpa menghilangkan identitas kebudayaannya. Dengan demikian agama dan kebudayaan lokal, berjaln-kelindan dan saling mengisi satu sama lain yang terwujud dalam sikap kearifan agama yang berbudaya dan budaya yang berlandaskan agama. Hubungan Islam dan tradisi lokal, dalam mengkajinya akan menjadi menarik dengan menggunakan teori yang dicetuskan oleh Abdurahman Wahid alias Gusdur yakni “pribumisasi Islam” dilontarkannya pertama kali pada 1980-an, yang merupakan pengganti dari istilah *indigenization*. Oleh Gusdur, bahwa pribumisasi Islam lahir dalam konteksnya sebagai upaya dalam mengokohkan kembali akar budaya yang mana akan tetap menjadikan manusia taat dalam beragama, bukan hanya sekadar menjadikan Islam sebagai alternatif pada persoalan kenegaraan dan kebangsaan.

Selain eksklusivisme maupun inklusivisme, pluralisme menjadi salah satu tipologi dalam sikap keberagamaan. Pluralisme menjadi niscaya adalah karena setiap tradisi keagamaan tidak akan mampu secara epistemologis merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan atau Allah Sang Misteri yang tidak bisa dinamakan. Gagasan tentang toleransi sendiri tidak berarti sesuatu yang benar tidak boleh dikatakan benar. Hal inilah yang oleh Surahman Hidayat sebagai toleransi islami sekaligus manusiawi.

Konflik agama pada sebuah masyarakat plural, adalah sesuatu yang sering terjadi, karena agama memiliki ciri dan karakteristis maupun perbedaan dari setiap agama. Akan tetapi semua agama sama-sama mengajarkan jalan kebenaran. Namun tak dapat dipungkiri bahwa agama juga dapat memengaruhi terjadinya disintegrasi jika masing-masing agama melakukan (*truth claim*) terhadap agama yang lainnya. Pluralisme merupakan tantangan bagi agama-agama, sehingga menjadi penting dilakukan pencaian titik temu agama-agama. Pluralisme agama sebagai fakta sosial, bahwa yang pada akhirnya mencerminkan beragama jalan menuju yang satu. Pandangan pluralisme tidak berarti adanya pertemuan dalam hal keimanan, namun hanya merupakan pengakuan keberadaan agama-agama lain, ia tidak masuk pada perbincangan kebenaran agama lain. Pluralisme tidak sekadar mengakui adanya keragaman atau kemajemukan, tetapi pluralisme menuntut kita tidak hanya mengakui adanya perbedaan tetapi bagaimana mewujudkan toleransi yang aktif dan tidak canggung demi terciptanya kerukunan dalam keragaman.

Konflik memang kerap terjadi pada masyarakat kita, namun disisi lain pun masih menemukan praktik-praktik toleransi beragama yang tulus di masyarakat. Praktik yang ditemukan di masyarakat didasari oleh kuatnya kearifan lokal sebagai pengikat di antara mereka dalam diwujudkan toleransi aktif tanpa canggung di antara mereka yang berbeda. Praktik-praktik itu, masih dapat ditemukan di Tapanuli Selatan di mana masyarakat membangun toleransi secara alamiah, baik pada masyarakat yang pernah berkonflik maupun masyarakat yang belum tersentuh dengan konflik. Contoh masa suram yang telah dialami Ambon kurang lebih empat tahun (1999-2003), peristiwa yang merontokkan kesadaran pluralisme, tetapi lebih dari itu meruntuhkan relasi kehidupan orang *basudara* yang awalnya hidup rukun dan damai dalam bingkai kearifan lokalnya harus menjadi evaluasi bagi daerah lain di Indonesia. Setelah keluar dari keterpurukan, maka hal penting yang harus dilakukan saat ini dan untuk jangka panjang yakni membangun kembali puing-puing relasi sosial yang telah runtuh sebagai upaya menciptakan kembali perdamaian di bumi Maluku.

Kuatnya teologi yang berbasis para realitas leluhur masyarakat Tapanuli selatan yang pluralis kini dapat hidup dalam perbedaan dan saling menyapa. Konsep "*dalihan natolu*" menjadi modal sosial kultural

pada masyarakat Tapanuli Selatan dan nilai budaya lainnya tetap terimplementasikan dalam kehidupan sosial dan interaksi di antara mereka. Walaupun modal sosial itu sebagai *pela* dan *gandong*, sebagai kontrak sosial yang dibuat masih terbatas pada kebutuhan dua atau beberapa negeri adat saja, namun kesemuanya masih menjadi ikatan yang kuat dalam meleraikan sebuah konflik dalam upaya menciptakan perdamaian di antara sesama.

Orang Batak dengan prinsip *semarga* umumnya sangat memahami arti bersaudara dan saling mengasihi. Hidup saling menyanyangi sebagai sebuah perintah adat yang sakral dan selalu dijalani secara teratur dalam tatanan hidup masyarakat adatnya. Persaudaraan dalam bingkai *dalihan natolu* adalah cara hidup masyarakat adat di Tapanuli Selatan yang menempatkan diri dan kepentingan sesama, baik yang berbeda suku, agama, bahasa dan budaya ibarat sebagai saudara kandung yang saling melindungi, mengasihi dan saling mendamaikan. Ketika bergotong royong dua komunitas bersaudara saling bertemu (Muslim dan Kristen) mereka sama-sama bekerja sama. Selain itu peran serta masyarakat Muslim tidak jarang dari menyiapkan makanan dan minuman para pekerja, tanpa membedakan agama dan sukunya.

Masyarakat Tapanuli Selatan memiliki kekhasan budaya tersendiri dibanding masyarakat suku lain di Indonesia. Konsep *dalihan natolu* sebagai sistem sosial dan hukum adat masyarakat Batak yang cukup otentik dimiliki oleh suku Batak sendiri, kandungannya sangat tinggi dan diklaim telah muncul sebelum masuknya agama Islam ke tanah Batak. Sistem sosial tersebut tetap hidup dan bertahan dalam diri masyarakat Batak di Tapanuli selatan, dihormati, dijaga, dilestarikan dan ditaati. Seringkali beberapa kasus yang menimpa Muslim dan non Muslim pun cenderung memilih diselesaikan dengan hukum adat. *Dalihan Natolu* tersebut memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan adat-istiadat yang terdiri *mora*, *kahanggi* dan *anak boru*.

Kehidupan masyarakat Tapanuli selatan dengan segala bentuk perbedaannya, baik agama dan keyakinan dapat hidup berdampingan tanpa rasa canggung, berinteraksi dalam berbagai aktifitas sosial, ekonomi maupun keagamaan menjadi pandangan yang menyejukkan. Kedua komunitas (Islam dan Kristen) hidup berdampingan, saling

berbagi antar tetangga, saling mengundang dalam setiap hajatan, suka maupun duka. Dari sisi ekonomi, mereka punbekerjasama tanpa adanya rasa curiga dan perasaan untuk menguasai satu dengan yang lain.

Hukum adat yang berkembang di Tapanuli Selatan menjadi kontrak sosial berlaku secara turun temurun untuk melindungi seluruh masyarakatnya. Tatanan hukum adat tidak hanya mengayomi tetapi mempersatukan seluruh kelompok masyarakat dari berbagai tempat, bahkan berbeda agama. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat diyakini mampu memelihara ketertiban dan hubungan keakraban antar penduduk, dapat menanamkan rasa gotong royong, serta dapat memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga keharmonisan. Singkatnya, faktor budaya dan istiadat dapat diandalkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang mendukung suatu keadaan yang kondusif dan harmonis.

Kearifan lokal adalah kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif, yaitu dalam pengembangan potensi dan sumber lokal material atau nonmaterial yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dan positif. Kearifan lokal mencakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak yang dituangkan dalam suatu tata sosial. Terdapat lima dimensi kultural tentang kearifan lokal yaitu pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, dan proses sosial lokal.

Sejatinya ruh toleransi itu sendiri adalah sistem kekerabatan yang sudah diwariskan sepanjang sejarah bangsa Indonesia dan menjadi entitas besar suku dan agama yang diyakini bersama dapat menurunkan nilai keretakan di masyarakat. Setidaknya terdapat tiga sub-indikator dalam memahami kesetaraan. Pertama, tentang tidak adanya diskriminasi antara superioritas dan inferioritas. Kedua adalah kesempatan yang sama. Ketiga, Saat ini, sistem demokrasi membuka ruang yang begitu luas kepada semua elemen masyarakat untuk memantaskan dirinya berperan pada kehidupan politik. Sistem pemilihan langsung tidak menghalangi kalangan di antara masyarakat

Tapanuli Selatan untuk menjadi pimpinan daerah, baik sebagai wali kota, bupati, atau wakilnya, begitu juga menjadi representasi di dewan perwakilan rakyat daerah.

C. Keseimbangan Sosial Pada Masyarakat “Berbilang Kaum” di Tapanuli Tengah dan Sibolga

Keberagaman adalah keniscayaan bagi Masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga. Masyarakat hidup dalam keragaman, mulai dari adat istiadat, kelompok, bahasa, bahkan sistem kepercayaan. Keberagaman masyarakat Sibolga bersifat alamiah dan merupakan sumber kekayaan budaya sejak lama. Perbedaan agama, suku dan budaya merupakan sealita yang harusnya dipahami dan didayagunakan untuk kemajuan bersama.

Jika dilihat dari kemerdekaan Indonesia 1945 sesungguhnya merupakan upaya untuk mematrikan eksistensi keberagaman (pluralitas) itu, yang kemudian dikonkretkan dengan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang maknanya pluralitas di dalam kesatuan. Kebhinnekaan adalah ‘rahmat yang terselubung’ (*blessingindisguise*). Oleh karenanya pluralitas masyarakat bangsa Indonesia sebagai suatu realitas sosial budaya dan realitas sejarah harus dilihat sebagai sesuatu yang seimbang, dalam arti bahwa semua konsep, semua wacana, dan semua realitas mengenai suku-suku bangsa itu ditempatkan pada tingkatan yang sederajat.

Hubungan antar kelompok etnis di satu sisidapat menciptakan konsensus, keserasian atau harmoni, tetapi disisi lain juga berpotensi menciptakan konflik. Dari hubungan antar kelompok etnis yang positif tersebut dapat menghasilkan hubungan kerjasama, bahkan pembauran antar kelompok etnis dalam interaksi sehari-hari secara alamiah. Dalam konteks sehari-hari kita juga dapat merasakan perbedaan budaya dan keberagaman kelompok etnistidak serta merta menjadi halangan dalam berinteraksi. Hal itu justru merupakan potensi masyarakat yang secara positif dapat dikembangkan sebagai unsur-unsur pembentuk identitas masyarakat Indonesia.

Gambaran potensi masyarakat yang positif inilah yang peneliti lihat pada masyarakat Kota Sibolga sebagai salah satu miniatur dari kehidupan sosial yang harmoni dan rukun ditengah keragaman etnis

dan agama masyarakat yang tinggal di Kota Sibolga. Hal inilah yang menjadikan masyarakat yang terdapat di kota ini relatif aman dan tidak pernah terjadi gesekan dan konflik, baik antar etnis maupun agama.

Kota Sibolga dahulunya merupakan Bandar Kecil di Teluk Tapian Nauli yang keberadaan kawasannya begitu strategis, tenang, nyaman, dan sangat cocok sebagai pelabuhan. Seiring perkembangannya, Kota Sibolga dikenal sebagai pusat perdagangan barang dan jasa pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari penelusuran sejarah, dimana perdagangan yang terjadi di wilayah Sibolga tidak hanya dengan orang-orang yang berasal dari wilayah Sibolga atau luar wilayah Sumatera, akan tetapi juga dengan bangsa asing yang datang ke Sibolga. Perdagangan itu semakin berkembang dan ramai dengan singgahnya kapal-kapal besar dari Eropa, diantaranya, Portugis, Inggris, Tiongkok, Siam, dan Birma untuk membeli rempah-rempah dan komoditas pertanian lainnya. Dengan sejarah perkembangan Kota Sibolga di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat yang terdapat di kota ini mempertahankan kondisi keserasian sosial yang sejak lama terbiasa dengan hidup dengan rukun dan sampai sekarang Kota Sibolga dijuluki sebagai “Negeri Berbilang Kaum”.

Masyarakat Sibolga adalah masyarakat majemuk. Konsep masyarakat majemuk (plural society) pertama kali diperkenalkan oleh seorang politikus dan administrator Inggris, yaitu J.S. Furnivall (1944) untuk menggambarkan Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda adalah masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup bersama tetapi tidak memiliki satu kesatuan politik dan sangat kurang memiliki tujuan sosial bersama.

Furnivall melihat kesatuan atau pembauran yang terjadi sangat sulit sehingga kaum pendatang dalam hal ini Kolonial Belanda lebih mendominasi dan lebih berkuasa dari pada masyarakat pribumi. Sedangkan dalam kehidupan politik, tidak adanya kehendak bersama (*commonwill*) atau dengan meminjam konsepsi Clifford Geertz (1992), maka masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub sistem-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, di mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam ikatan-

ikatan yang bersifat primordial. Kendati pun Indonesia sebagai negara yang dibangun atas dasar heterogenitas dan pluralitas baik suku, budaya maupun agama, mempunyai beragam norma sosial yang dipegang masyarakat di berbagai daerah. Kebudayaan nasional dipandang sebagai puncak kebudayaan daerah. Artinya, kebudayaan daerah menjadi unsur utama pembentuk entitas kebangsaan Indonesia.

Fakta ini merupakan modal amat besar dalam mewujudkan cita-citaluhur dari *the founding-fathers* bangsa ini dengan semboyannya “Bhinneka Tunggal Ika”. Persoalannya adalah bagaimana memasukkan dan menanamkan realitas empiris itu ke dalam kesadaran masyarakat. Hal ini mengingatkan bahwa kemajemukan menjadi sebuah dilematis, pada satu sisi merupakan sebuah potensi yang apabila dapat dikelola dengan baik, akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat dan bangsa. Namun, pada sisi yang lain kemajemukan juga menyimpan potensi konflik apabila kita tidak bisa mengelolanya dengan baik.

Persoalan ini juga yang menjadi fokus peneliti terhadap keragaman masyarakat yang ada di Kota Sibolga. Sebuah kota yang terletak dipantai Barat Sumatera Utara dengan komposisi penduduk yang multietnis sehingga mendapat julukan sebagai “Negeri Berbilang Kaum”. Inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melihat bagaimana gambaran dan pola pengelolaan keserasian sosial yang ada pada masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga.

Keserasian sosial adalah sebuah konsep sosiologis yang sulit diberi satu batasan yang tegas. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa esensi dan intensitas keserasian itu tidakselalu persis sama. Teori proses sosial menjelaskan bahwa interaksi sosial berlangsung secara dinamis dan karena itu tipe-tipe keserasian tersebut dapat berubah-ubah menempati kondisi-kondisi tertentu mulai dari yang paling serasi (asimilasi) sampai pada kurang serasi (konflik). Kondisi masyarakat Kota Sibolga yang multi etnis juga tidak menutup kemungkinan untuk terciptanya stereotipe dan prasangka terhadap etnis yang lain. Hal ini menjadi potensi untuk terciptanya konflik antar etnis yang ada di Kota Sibolga. Persoalan inilah yang peneliti ingin lihat sejauh mana potensi keserasian yang selama ini terbangun di Kota Sibolga dapat

dipertahankan dan keberadaan masyarakat yang multi etnis tersebut dapat menjadi wadah pembauran (*meltingpot*). Sehingga potensi-potensi konflik yang ada dapat dieliminir.

D. Hubungan Antar Kelompok Pada Masyarakat Sibolga

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang memiliki naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain (*gregariousness*). Jika kita membahas hubungan antar kelompok cenderung dipusatkan pada deskripsi dan penjelasan hubungan sosial antara kelompok yang statusnya berbeda. Kata kelompok dalam konsep hubungan antar kelompok mencakup semua kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria ciri fisiologis, kebudayaan, ekonomi dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi kelompok minoritas dapat dikaji dengan menggunakan dimensi sejarah, demografi, sikap, institusi, gerakan sosial dan tipe utama hubungan antarkelompok. Suatu bentuk hubungan yang banyak disoroti dalam kajian terhadap hubungan antar kelompok ialah hubungan mayoritas-minoritas. Dalam definisi Kinloch kelompok mayoritas ditandai oleh adanya kelebihan kekuasaan, konsep mayoritas tidak dikaitkan dengan jumlah anggota kelompok. Ada pula ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa konsep mayoritas didasarkan pada keunggulan jumlah anggota.

Permasalahan hubungan antar kelompok etnis di Indonesia terkadang menyulut emosi dan konflik. Hal ini terjadi karena adanya stereo tipe antar etnis dan sikap etnosentrisme. Selain itu, disparitas sosial dan ekonomi juga berpotensi sebagai pemicu konflik diantara kelompok etnis. Disamping potensi konflik yang terjadi, ada juga hubungan antar kelompok etnis di Indonesia yang diwarnai dengan kerjasama dan hubungan yang positif. Hal inilah yang peneliti lihat pada masyarakat Kota Sibolga yang dikenal sebagai "*Negeri Berbilang Kaum*" yang menggambarkan kondisi masyarakatnya yang majemuk. Potensi keserasian inilah yang terus dijaga oleh masyarakat Kota Sibolga sebagai miniatur dari kehidupan yang harmoni dan menjaga serta menghormati kemajemukan ditengah carut marutnya konflik yang terjadi akibat adanya isu-isu SARA yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran keserasian sosial dalam masyarakat “Berbilang Kaum” di Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Peran bahasa pesisir Sibolga sebagai pendukung terciptanya keserasian sosial, dimana bahasa pesisir tersebut menjadi bahasa pemersatu dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh masyarakat yang terdapat di Kota Sibolga. Hal ini terlihat dengan kemampuan dari etnis lain dalam menguasai bahasa pesisir. Selain itu, keberadaan bahasa Batak juga menjadi bahasa pengantar dalam berkomunikasi di Kota Sibolga khususnya dengan sesama orang Batak. Bahkan keberadaan bahasa Batak juga telah banyak dikuasai oleh etnis lain, seperti etnis Nias, Tionghoa, dan etnis lainnya.
2. Kekompakan dan kebersamaan masyarakat di kota ini dalam mensukseskan setiap perayaan hari-hari besar di Kota Sibolga. Hal ini terlihat dalam setiap perayaan Hari Jadi Sibolga, dimana masyarakat terlihat antusias, kompak, dan bersama-sama bahu membahu dalam mensukseskan acara tersebut. Perayaan Hari Jadi Sibolga ini telah menjadi agenda tahunan yang penting di kota ini dan bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa peradaban, kebudayaan, sejarah, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki kota ini agar tidak dilupakan, terutama oleh generasi muda. Disamping itu, perayaan Hari Jadi Sibolga ini juga untuk mempromosikan dan menggaungkan dirinya keseluruh penjuru nusantara, agar banyak orang tahu bahwa Kota Sibolga identik dengan kerukunan, kekompakan, kebersamaan, dan keterikatan satu sama lain. Perayaan Hari Jadi Sibolga selalu diperingati setiap tanggal 2 April. Selain itu, kondisi yang sama juga dapat di jumpai dalam setiap perayaan acara-acara resmi yang terdapat di Kota Sibolga, seperti perayaan pesta pernikahan dan perayaan keagamaan.
3. Terjadinya asimilasi dalam masyarakat di Kota Sibolga. Bentuk asimilasi ini diwujudkan dengan adanya perkawinan campuran (*amalgamasi*) yang dilakukan oleh etnis yang terdapat di Kota Sibolga. Proses terjadinya asimilasi yang terjadi di Kota Sibolga saat ini tidak terlepas dari faktor historis Sibolga di masa lalu. Hal ini terjadi akibat adanya interaksi perdagangan ketika itu, dimana interaksi yang terjadi tidak hanya dilakukan dengan bangsa asing

seperti Inggris, Portugis, dan lainnya, tetapi juga dengan berbagai masyarakat yang ada di penjuru negeri ini. Bahkan kemunculan Adat Sumando juga akibat terjadinya perkawinan campuran antara anak Datuk Itam dengan anak keturunan Datu Ompu Huringjom Hutagalung yang bermukim di Sibolga ketika itu. Dimana kemunculan adat tersebut juga dipicu akibat adanya benturan adat mana yang dipakai dalam proses palamaran. Keberadaan adat inilah yang membuat keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Kota Sibolga saat ini telah mengkristal dalam satu kesatuan budaya dan adat istiadat Pesisir SumandoSibolga.

4. Terjadinya akulturasi dalam masyarakat di Kota Sibolga. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa kesamaan bahasa dan budaya terdapat dalam beberapa etnis yang ada di Kota Sibolga. Misalnya, bahasa pesisir Sibolga yang memiliki kesamaan dengan bahasa Minangkabau, dimana yang membedakannya adalah logat atau dialek pengucapannya dengan volume suara yang keras seperti bahasa Batak. Disamping itu, keberadaan budaya yang berkembang di Kota Sibolga juga tidak terlepas dengan adanya akulturasi, dimana Adat Sumando Sibolga juga memiliki kesamaan dengan Adat Minangkabau, dimana dalam upacara adat perkawinannya, disamping menggunakan istilah-istilah nama yang sama, juga prosesi dan tata aturan pelaksanaan adat perkawinan banyak yang mengalami persamaan, contohnya acara pelamaran, dalam bahasa Minang disebut maminang dan dalam bahasa Pesisir Sibolga juga disebut maminang. Istilah menganta pitih dalam bahasa Minang dan manganta kepeng dalam bahasa Sibolga. Hal ini juga terlihat pada busana yang dipakai juga menggunakan paduan busana adat Batak dan adat Minang.
5. Adanya toleransi yang mendukung keharmonisan di Kota Sibolga. Budaya toleransi yang sudah sejak lama tertanam, dapat terlihat ketika pesta demokrasi dalam pemilihan suksesi kepemimpinan yang diselenggarakan di kota ini. Seperti yang terlihat dalam setiap pasangan calon kepala daerah selalu berpasangan dengan pasangan calon agama yang berbeda, terutama terlihat pada pasangan calon yang menganut agama Islam dan Kristen. Misalnya

calon Walikota beragama Islam dan wakilnya beragama Kristen dan begitu juga sebaliknya. Potret kerukunan dan toleransi inilah yang mencerminkan bahwa masyarakat yang terdapat di Kota Sibolga telah mapan mengelolah dan memelihara keberagaman yang dimiliki masyarakatnya, sehingga dapat menjadi *pilotproject* bagi daerah lain dalam mengelolah kemajemukan yang ada di dalam masyarakat.

Dari berbagai gambaran keserasian sosial yang terdapat di Kota Sibolga diatas, juga terdapat beberapa permasalahan dan konflik yang pernah yang terjadi pada masyarakat yang terdapat di Kota Sibolga. Persoalan inilah yang mengindikasikan bahwa masyarakat multietnis yang terdapat di kota juga tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan dan konflik. Hal ini terjadi karena masyarakat majemuk tersebut bersifat dinamis, terbuka, dan cair. Sehingga berbagai dinamika masyarakat yang berpotensi memicu pertikaian dan konflik sulit dihindarkan. Permasalahan dan potensi konflik laten yang ada di Kota Sibolga terlihat dengan adanya:

1. Stereo tipe terhadap etnis tertentu, seperti adanya stereo tipe terhadap etnis Tionghoa yang dianggap bersifat licik dan “pintar” menipu. Stereotipe ini juga terjadi pada etnis Nias yang dianggap bersifat kasar, pembuat onar, keras kepala, dan berbagai kebiasaan buruk lainnya. Bahkan etnis Nias yang terdapat di kota ini dianggap bukan “manusia”.
2. Konflik pemilukada pada tahun 2010, dimana akibat adanya ketidatakpuasan salah satu calon terhadap hasil pemungutan suara yang dilakukan. Hal ini terjadi akibat adanya klaim terjadinya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu.
3. Penistaan agama yang dilakukan oleh harian Metro Tapanuli Sibolga, dimana akibat terjadinya kesalahan dalam menuliskan “Nabi Muhammad” yang berakibat fatal, dimana dalam harian tersebut tertulis “Babi Muhammad”. Akibat dari pemberitaan harian tersebut ratusan orang mengadakan aksi unjuk rasa di depan kantor surat kabar harian Metro Tapanuli Perwakilan Sibolga, memprotes berita yang dianggap sebagai penistaan agama dan melukai perasaan umat Islam yang diterbitkan oleh harian

tersebut dan berakhir dengan perusakan kantor serta inventaris kantor surat kabar harian tersebut oleh massa pengunjuk rasa. Dampak dari peristiwa itu, membuat harian Metro Tapanuli tersebut berganti nama menjadi harian New Tapanuli sampai saat ini.

Oleh karena itu, dalam rangka membina kesatuan dan kebersamaan, maka setiap kelompok etnis yang terdapat di kota ini membentuk perkumpulan. Bahkan dalam etnis-etnis tersebut masih ada perkumpulan dibawahnya seperti perkumpulan marga, perkumpulan berdasarkan daerah asal, dan lain-lain. Disamping itu, untuk menjaga keharmonisan hubungan antar etnis dan antar tradisi adat yang berbeda-beda maka dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Adat (FORKALA) Kota Sibolga. Selain itu, beberapa etnis yang terdapat di kota ini juga membentuk asosiasi/organisasi mereka, seperti etnis Pesisir ada Lembaga Budaya Pesisir Pantai Barat Sumatera Utara (LBPBSU) Kota Sibolga, etnis Batak juga telah dibentuk Lembaga Adat Masyarakat Batak Sibolga-Tapanuli Tengah (LAMBASA-TT), etnis Minang dengan Budi Masyarakat Indonesia Minangkabau (BUMIM), etnis Tionghoa membentuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Sibolga dan juga membentuk Himpunan Tjinta Teman (HTT) Kota Sibolga. Sedangkan dalam rangka pembinaan kerukunan antar umat beragama, maka di Kota Sibolga juga di bentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sibolga. Keberadaan berbagai asosiasi kesukuan inilah diharapkan dapat menjadi wadah silaturahmi dan memperkuat solidaritas, baik antar sesama etnis maupun dengan etnis lainnya.

Jika dilihat kondisi keserasian sosial yang terdapat di Kota Sibolga tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

1. Faktor historis, dimana sejak berdirinya Kota Sibolga telah ramai dikunjungi oleh pendatang dari berbagai daerah dan beragam etnis yang terjalin dalam interaksi sosial yang harmonis sehingga menjadikan kota ini sebagai kotayang dinamis dan terbuka serta menjadi kota yang mapan dalam mengelola masyarakat yang harmonis dalam keberagaman (harmonyin diversity).
2. Faktor adaptasi, dimana kemampuan masyarakat yang tinggal di kota ini dalam menguasai bahasa Pesisir dalam berinteraksi sehari-hari, sehingga kemampuan adaptif inilah yang membuat

masyarakat hidup serasi dan rukun. *Ketiga*; faktor demografi dan pola pemukiman, dimana dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di kota ini mengakibatkan pola pemukiman membaur yang cenderung meniadakan garis pemisah (*borderline*) atau mereduksi komunikasi yang terbatas, sehingga dapat meningkatkan interaksi dan kontak sosial yang semakin intens. Kondisi keserasian sosial dalam masyarakat “*Berbilang Kaum*” di Kota Sibolga terlihat dari peran bahasa pesisir sebagai bahasa pemersatu dalam setiap interaksi dan kontak sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kota ini. Hal ini juga didukung adanya asimilasi dalam bentuk perkawinan campuran (*amalgamasi*) yang tercermin dari adanya Adat Sumando. Keberadaan adat inilah yang sampai sekarang sebagai adat pemersatu dalam setiap perkawinan. Bahkan ketika etnis lain masuk ke dalam Adat Sumando yang notabene beragama Islam, maka bahasa dan budaya yang mereka pakai merepresetasikan Adat Sumando tersebut.

Kata Sumando dalam bahasa Batak adalah cantik dan sesuai, secara luas diartikan besan berbesan. Adat Sumando dimulai dari tahapan *marisik* sampai tahapan *tapanggi*. Dari tahapan tersebut digelar acara pelaksanaan tarian seperti tari saputangan, payung, adok, sampaya, sikambang Botan sampai pada tahapan mengarak pengantin pria dengan sambutan gelombang duo baleh dan tari dampeng.

Selain itu, keberadaan masyarakat yang hidupserasi dan rukun tersebut juga terlihat dari tingkat toleransi yang sejak lama sudah tertanam pada masyarakat yang tinggal di Kota Sibolga. Hal ini terlihat ketika ada pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dimana masyarakat yang tinggal di kota ini sudah terbiasa menghadiri pesta pernikahan, walaupun itu berbeda etnis dan agama. Bahkan bentuk toleransi ini juga tercermin ketika terjadi pemilihan suksesi kepemimpinan di kota ini, dimana dalam setiap pasangan calon selalu berpasangan dengan agama yang berbeda.

Jika dilihat gambaran keserasian sosial yang terdapat pada masyarakat Kota Sibolga saat ini tidak terlepas dari adanya pengaruh faktor historis, faktor adaptasi, dan faktor demografi dan pola permukiman. Disamping itu, keberadaan lembaga dan asosiasi

kesukuan yang terdapat di daerah ini juga memberikan kontribusi yang positif dalam memelihara dan menjaga kesatuan, kebersamaan, dan tingkat solidaritas antar sesama etnis maupun etnis yang lain. Oleh karena itu, kehadiran lembaga dan asosiasi kesukuan tersebut diharapkan dapat melahirkan kesadaran bersama (*collective consiousness*) dalam menjaga hubungan baik antar etnis dan agama yang berbeda, sehingga identitas Kota Sibolga sebagai “Negeri Berbilang Kaum” dapat dijaga dari berbagai potensi konflik yang ada.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah untuk lebih mendorong masyarakat yang berada di Kota Sibolga meningkatkan proses interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan keharmonisan masyarakat yang telah terbangun selama ini. Kemudian semua lapisan masyarakat Sibolga juga jangan melupakan sejarah masa lampau karena faktor historis inilah yang banyak mempengaruhi perkembangan masyarakat Sibolga sehingga mampu mempertahankan kerukunan dan keharmonisan ditengah masyarakat yang multi etnis saat ini. Disamping itu perlu ditingkatkan lagi sinergitas antara pemerintah, lembaga adat, tokoh adat, dan agama serta masyarakat dalam menjaga keserasian, kerukunan, dan kehidupan yang harmoni di Kota Sibolga sehingga potensi konflik yang bakal terjadi dapat dikelola dengan baik dan dapat diminimalisir. Dengan demikian afirmasi Sibolga sebagai “Negeri Berbilang Kaum” menjadi suatu pembenaran.

Kemudian kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Sibolga saat ini agar terus dijaga dan dilestarikan sehingga keberadaannya tidak memudar dan hilang di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga diharapkan dalam suksesi kepemimpinan Kota Sibolga tahun 2015 ini dapat terpilih pemimpin yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjaga identitas budaya lokal yang akhir-akhir ini semakin memperhatikan.

E. Moderasi Beragama Sebagai Penawar Konflik Sosial Dalam Masyarakat Multikultural

Dalam kehidupan sosial masyarakat, manusia tidak bisa sama sekali terlepas dari konflik. Konflik, sebagaimana dinyatakan oleh Ralf Dahrendort, merupakan fenomena yang selalu hadir di masyarakat. sebenarnya merupakan fenomena alamiah yang menyertakan pola interaksi manusia sepanjang masa. Tidak semua konflik berlangsung melalui kekerasan. Persoalannya adalah ketika konflik berubah menjadi kekerasan atau anarki apalagi dengan melibatkan massa dalam jumlah yang sangat banyak. Harmoni sosial yang telah terbangun biasanya akan berubah menjadi chaos dan menimbulkan disintegrasi.

Ada banyak teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Salah satunya di antaranya yang dikemukakan oleh Simon Fisher yang menyebutkan beberapa teori tentang terjadinya konflik. Pertama; teori hubungan masyarakat. Teori yang menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kedua; teori negosiasi konflik yang menyatakan bahwa konflik terjadi oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Ketiga; teori kebutuhan manusia. Menurut teori ini, konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik secara mental, dan sosial yang tidak terpenuhi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Keempat; teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantaranya berbagai budaya yang berbeda. Keenam; teori transformasi konflik. Konflik terjadi karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.¹

Berbagai teori tentang sebab munculnya konflik sebagaimana dipaparkan di atas masih bersifat umum. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan konflik antar agama atau lebih tepatnya konflik antar pemeluk agama?. Untuk itu penting dijelaskan kajian

¹ Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta: The Britis t.th.) hlm. 4.

yang secara spesifik membahas mengenai kekerasan yang terjadi antar komunitas umat beragama, khususnya antara Islam dan Kristen.

Banyak kajian mengenai konflik antar umat bergama dan telah menghasilkan beragam teori. Salah satu kajian yang menarik diulas adalah penelitian mengenai konflik antara Islam dan Kristen di Tapanuli Selatan. Sebagaimana diketahui, hubungan Islam dan Kristen terkadang penuh ketegangan, dan konflik kekerasan. Sejumlah konflik yang menelan korban kerab muncul di beberapa kawasan tersebut. Konflik kekerasan bahkan kadang masih terjadi saat ini, meskipun upaya pemisahan telah dilakukan dengan mendirikan forum kerunanan umat beragama.

Terdapat beberapa penjelasan teoretis mengenai konflik yang melibatkan umat Islam dan Kristen di Tapanuli Selatan. Mark memetakan ada dua kubu yang saling bertentangan yaitu; mengenai primordialis dan artifisialis. Pandangan primordialis menyatakan bahwa konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan “nilai-nilai dasar” antara keduanya. Islam dan Kristen merupakan dua agama berbeda yang dilandasi oleh ide-ide dan konsep-konsep yang saling bertentangan sehingga Budaya menjadi alat pemersatu kedua agama sebagai bentuk moderasi.

Pandangan kedua adalah pandangan yang terkategori sebagai mazhab “*Artifisialis*”. Mazhab ini berpandangan bahwa munculnya konflik bukan diakibatkan oleh perbedaan antara Islam dan Kristen tetapi akibat ulah oknum yang secara artifisial menghasut kelompok penganut agama sehingga terjadi permusuhan sejak kaman kolonial hingga masa sekarang. Menurut kelompok ini sejak awal identitas Islam dan Kristen berbeda sejak awal, tetapi bukan identitas tersebut yang menstimulasi konflik, melainkan rekayasa aktor-aktor yang secara pintar memanipulasi perbedaan tersebut.

Mengkritisi dua teori yang bertolak belakang di atas, Mark mengemukakan pandangan yang lebih realistis yang terletak antara pandangan primordialis dan artifisialis. Islam dan Kristen memiliki banyak kesamaan dalam bidang agama dan sosial. Mereka dapat bekerjasama dalam satu masyarakat yang sama dan bahkan dalam satu sistem politik yang sama. Namun mereka juga memiliki identitas

sendiri-sendiri yang dapat menimbulkan pengelompokan yang saling bertentangan. Dengan kata lain, perbedaan dan persamaan yang ada di antara kedua kelompok merupakan sebuah keniscayaan dan karenanya bersifat wajar. Persoalan timbul manakala ada keterlibatan para politisi. Kedua faktor ini menyumbang terjadinya gesekan antara Islam dan Kristen.

Saat ini perkembangan paradigma lebih luas lagi, tidak hanya dikotomi besar sebagaimana paparan di atas. Setidaknya ada empat pandangan besar dalam mengkaji konflik; primordialis, instrumentalis, konstruktivis, dan institusionalis. Pandangan promordialis melihat bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan identitas. Perbedaan ini secara alami akan menyebabkan permusuhan. Instrumentalis berpandangan bahwa konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang menggerakkan sentimen identitas. Para konstruktivis menyatakan bahwa identitas bisa diciptakan, dihilangkan, dan/atau dibuat untuk tujuan konflik maupun damai. Adapun pandangan institusionalis menganalisis bahwa konflik terjadi karena pengaturan kelembagaan gagal mengakomodasi interaksi antar kelompok. Keempat teori besar ini menurut penuturan sebagian ahli tidak cukup memadai untuk mengungkapkan konflik ditingkat lokal atau regional. Varshney misalnya mengatakan bahwa keempat teori ini terlalu umum, bersifat makro dan gagal mengungkapkan hal-hal kecil yang bersifat lokal. Oleh karenanya Varshney mengenai hubungan Islam dan Kristen lebih memilih konsep civil society dan peranannya bagi penciptaan hubungan antar etnis.

Mengkaji hubungan antara Islam dan Kristen di Tapanuli Selatan, ada baiknya dikaji tentang fenomena konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Pengenalan atas fenomena dengan skala nasional dirasa perlu ketika mengkaji kasus lokal. Alasannya, karena berbagai persoalan relasi sosial di tingkat lokal, tak bisa dilepaskan dari konteks nasional. Selain itu, konflik kekerasan juga bisa dilihat dari perspektif konflik elite. Seperti diketahui pascareformasi, selain beberapa kerusuhan, kondisi sosial politik di Indonesia ditandai dua gejala yang mencolok yakni konflik politik dan kekerasan politik. Teri menarik kepentingan politik elit di satu sisi dapat menyumbang proses demokratisasi, akan

tetapi dampak buruknya dapat memunculkan pengotak-kotakan masyarakat yang akibatnya cenderung menimbulkan kekerasan kolektif.² Perbedaan yang telah ada di masyarakat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga memunculkan batas-batas yang jelas di antara kelompok untuk selanjutnya digiring pada situasi yang saling berhadap-hadapan.

Terkait dengan fenomena maraknya konflik kekerasan di Indonesia, khususnya dalam rentang satu dekade terakhir, setidaknya ada tiga teori besar. Jacques merangkum dalam tiga kelompok besar analisis mengenai kekerasan etnik pasca tumbang rezim Soeharto. Pertama; analisis yang menekankan pada keterlibatan elite yang ada di Jakarta (negara, militer, dan lawan-lawan politik mereka). Karena ketidakjelasan penyebab kekerasan etnik di daerah. Biasanya analisis ini menyebutkan istilah “provokator” sebagai dalang di balik semua kerusuhan. Analisis ini mirip dengan teori konspirasi. Akan tetapi analisis model teori konspirasi seperti ini tidak cukup berhasil menjelaskan mengapa begitu banyak orang terlibat sehingga eskalasi konflik terus meninggi.

Pertama, analisis yang menfokuskan pada keterlibatan elite lokal dari pada elite nasional yang saling berkompetisi. Menurut analisis ini kekerasan muncul akibat keterlibatan elite lokal yang berusaha dan berkompetisi untuk mendapatkan sumber-sumber negara, akses terhadap pelayanan umum dan mengontrol para pemimpin daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka, para elite lokal ini sering memobilisasi massa guna kepentingan politiknya. Sentimen agama kerap digunakan mengingatkan identitas keagamaan merupakan identitas kelompok yang paling kuat dalam struktur sosial. Analisis ini muncul dalam kasus-kasus kerusuhan yang terjadi di Maluku, Kalimantan dan Poso. Menurut Bertrand kedua analisis di atas sama-sama memiliki kelemahan, karena hanya berkuat pada teori konspirasi dan persoalan provokasi. Elite (nasional maupun lokal) tidak mampu memobilisasi massa untuk terus berkonflik tanpa ada kesamaan ketidakpuasan. Selain itu, ketidakmampuan mencari penyebab utama konflik kerap dialihkan dengan menggunakan istilah provokator.

2 Muhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan implementasi Resolusi Konflik*, (Semarang: Walisongo, 2007), hal. 67.

Kedua, pendekatan berfokus pada penderitaan yang dialami masyarakat lokal terkait dengan kebijakan negara. Kasus kerusuhan di Kalimantan Barat misalnya terjadi karena etnis Dayak merasa tersingkir oleh kebijakan negara sehingga mereka tidak memiliki akses ekonomi dan kekuasaan di daerah mereka sendiri. Demikian juga dengan Aceh. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat adalah bentuk perlawanan atas kebijakan negara yang dinilai tidak adil. Rakyat Aceh merasa dirugikan oleh pengelola kekayaan yang semua tersedot ke pusat. Rasa benci terhadap Pemerintah Indonesia terutama pada TNI semakin kuat apalagi sejak diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Perbedaan ketiga analisis di atas, Bertrand melihat bahwa konflik yang marak merebak di daerah setelah Orde Baru berakhir sebetulnya sangat terkait dengan persoalan bangsa yang lama mengendap. Persoalan konflik etnik terkait dengan persoalan model kebangsaan dan strategi institusionalisasi yang dikembangkan rezim Orde Baru. Kejatuhan rezim Orba telah menjadi pintu terbukanya keran negosiasi ulang elemen pembentuk model negara kesatuan.

Munculnya berbagai konflik etnik diberbagai daerah mempunyai keterkaitan yang erat dengan persoalan konstruksi negara bangsa. Sejumlah isu dan tema kebangsaan yang selama ini terbungkam erat di masa Orde baru menemukan momentum untuk diperbincangkan kembali. Persoalan mulai dari peran Islam dalam institusi politik negara, persoalan pembagian kekuasaan pusat dan akses daerah serta beberapa persoalan yang belum selesai. Apa yang dilakukan Bertrand dengan mengetengahkan pendapat bahwa konflik yang terjadi di Indonesia sangat terkait dengan persoalan kebangsaan memang tepat. Akan tetapi ketika konflik di daerah di cermati secara detail. Sejumlah fakta menunjukkan adanya keterlibatan tiga persoalan tadi. Konflik yang terjadi di daerah memang terkait dengan keterlibatan elite lokal maupun nasional, sekaligus juga menyiratkan adanya semacam protes dari warga lokal akan adanya praktik-praktik diskriminasi dan ketidakadilan yang mereka alami. Oleh karena itu, mungkin yang dapat diterima adalah bahwa konflik di daerah sangat terkait dengan banyak faktor. Faktor keterlibatan elite, politisasi pemimpin lokal,

teriakan protes atas ketidakadilan sosial ditambah dengan persoalan belum tuntasnya konstruksi nasionalisme yang dikembangkan bangsa ini. Semua ini semakin menguatkan momentum tumbanganya Orde Baru.

Lanjutan analisis di atas, secara spesifik Franz Magnis Suseno menilai bahwa konflik etnis agama di Indonesia disebabkan oleh latar belakang yang kompleks. Setidaknya ada tiga faktor: Pertama; pengaruh modernisasi dan globalisasi yang telah jauh memasuki relung masyarakat Indonesia. Modernisasi dengan *de-sosialisasinya* dan kecendrungan individualistis telah menyumbang menguatnya konflik komunal; komunitas lebih ditentukan oleh identitas agama, bahasa dan kesadaran umum daerah.

Modernisasi dan globalisasi memberi daya tekan yang luar biasa karena keuntungan dan ancaman tidak terdistribusi secara merata. Kondisi ini kemudian memunculkan *gap* antara kelas menengah, atas dan bawah. *Gap* semacam ini ditambah munculnya ancaman secara ekonomi, politik, budaya dan psikologi akibat modernisasi yang tak terbandung, pada gilirannya menyumbang munculnya primordialisme dan sikap eksklusif terhadap mereka yang berada di luar kelompok.

Kedua; faktor akumulasi kebencian masyarakat. Berbagai streatip, stigma atas kelompok lain yang selama ini hanya bergulir sebagai *hidden transcript* menguat dan pada saat yang tepat muncul dipermukaan. Kebencian individu terus bergabung dengan yang lain dan membuahkan kebencian kolektif seluruh anggota grup. Anggapan kelompok atau gama lain sebagai kafir dan sebagai saingan terus menguat sehingga menjadi amunisi yang kuat sebagai pemicu kerusuhan dan konflik agama di Indonesia dan di daerah.

Ketiga masyarakat telah lama dicengkram dalam budaya kekerasan. Masyarakat Indonesia sedang sakit, mengingat kerap dijadikan solusi menyelesaikan persoalan. Akan tetapi, pada bagian ini Magnisnya tampak kurang begitu ekspresif menganalisis faktor ketiga.

Keseluruhan teori di atas belum semuanya mampu menjawab kasus konflik di daerah. Mencermati nuansa konflik bernuansa agama memerlukan pelibatan factor agama atau keyakinan sebagai pemicu

konflik. Penjelasan lain mengenai hubungan agama dapat di lihat dari aspek teologi. Hal ini dilihat dari beberapa fenomena konflik kekerasan bernuansa agama dilatarbelakangi salah satunya oleh faktor teologi, juga karena teologi sendiri merupakan hal penting dalam keberagamaan. Dengan teologi pemeluk agama mengembangkan dan mengekspresikan muatan keimanan mereka. Teologi merupakan rumusan akal pikiran pemeluk agama yang bersumber dari kitab suci. Teologi memainkan peran penting karena mencirikan pada komitmen persoalan terhadap ajaran agama. Agama adalah persoalan hidup dan mati. Selain itu, kesetiaan pada agama dapat berimplikasi menyeluruh pada pemeluknya. Seseorang atau kelompok penganut agama akan berupaya sebisa mungkin untuk mempertahankan prinsip keyakinan sebagaimana agama yang diyakininya.

Terkait dengan sikap umat beragama terhadap agama lain, menurut Nurcholish Madjid secara tipologi dapat dibedakan ke dalam tiga tipe: inklusif, eksklusif dan pluralis. Eksklusif adalah pandangan yang mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Bagi kelompok ini kebenaran, keselamatan dan berbagai keutamaan lainnya hanya ada pada agama yang dianutnya. Pandangan ini hanya akan mengakui kebenaran tunggal, yakni agama yang dianutnya. Agama lain dipandang tidak memiliki kebenaran dan tidak menawarkan keselamatan.

Eksklusivisme adalah sikap yang menyakini bahwa agama yang paling benar merupakan tampak sekali pada agama-agama yang memiliki kitab suci. keunggulan pada kitab suci yang dimiliki dianggap superior dibanding dengan agama-agama yang tidak memiliki kitab suci. Agama Islam, Kristen dan Yahudi mengklaim sebagai agama yang memiliki kebenaran secara ultim. Hal ini sedikit berbeda dengan keyakinan agama-agama di India yang masih mengakui adanya kemiripan dari manipestasi agama lain. Dalam sejarah agama-agama bahwa eksklusivitas dibentuk sehingga menghasilkan pandangan yang bersikap dikotomis, seperti pembagian agama wahyu dan non wahyu atau agama samawi dan ardhhi, serta semitik dan non semitik. Klasifikasi semacam ini dapat ditemukan dalam teologi Kristen seperti Thomas Aquinas maupun muslim seperti al Shahrastani. Pola klasifikasi ini dilakukan untuk meneguhkan superior agama satu terhadap agama lainnya.

Sikap agama yang eksklusif biasanya menghalangi seseorang untuk menjalin interaksi secara bebas dengan kelompok yang berbeda. Hal ini karena adanya keyakinan agama menganggap bahwa agama yang dianutnyalah yang paling benar. Kemudian sikap ini menjadi pedoman bahwa perintah mengajak orang lain mengakui kebenaran yang dimiliki. Setelah pengakuan didapatkan maka kelompok lain akan diajak untuk masuk dalam rengkuhan agamanya. Munculnya perasaan milik sendiri sebagai superior dan milik orang lain salah.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Sumatera Utara merupakan masyarakat yang plural dan multikultural, masyarakatnya yang beragam suku, agama, ras, dan budaya namun memegang teguh tradisi leluhur memahami keagamaan secara baik. Selalu terbuka dan saling menerima keanekaragaman tersebut. Dalam tradisi masyarakat Tapanuli Selatan dikenal istilah *dalihan natolu* yang merupakan kearifan lokal yang terus menerus disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi sebagai upaya penguatan moderasi beragama di kalangan masyarakat Tapanuli Selatan.

Di Sumatera Utara, interaksi umat beragama sangat cair dan dinamis, dimana satu sama lain saling memahami keteguhan dan batasan masing-masing. Misalnya, pada acara pernikahan dan kematian, warga Islam dan Kristen saling mengunjungi. Yang menarik, bila ada warga Muslim berkunjung ke rumah orang Nasrani, tuan rumah menyuguhkan hidangan dengan alat makan (piring, gelas, sendok, dan lain-lain) yang mereka sediakan khusus untuk Muslim. Karena mereka tahu ada perbedaan-perbedaan mendasar antara Muslim dan Nasrani, sehingga toleransi terjaga dengan sangat baik.

B. Implementasi Hasil Penelitian

Penelitian ini telah melahirkan karya atau hasil berupa draf jurnal yang rencanakan akan diterbitkan pada jurnal yang terindeks scopus, serta hasil penelitian berupa laporan akademik penelitian yang diharapkan bisa menjadi menambah referensi mahasiswa mengenai moderasi beragama yang berbasis kearifan lokal di Sumatera Utara. Selain itu hasil penelitian ini juga, menerangkan bagaimana kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Sumatera Utara dalam menjaga kerukunan umat beragama untuk menjadi bahan percontohan buat wilayah-wilayah lain termasuk daerah-daerah yang sangat berpotensi konflik.

C. Saran

Sudah seharusnya kita semua menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengembangkan prinsip moderasi dalam beragama di Tanah Air. Moderasi dalam beragama adalah suatu yang niscaya, tetapi jangan sampai *berlebihan* (ekstrem). Moderasi beragama, harus terus digaungkan mengingat fenomena disrupsi saat ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi, melainkan telah merambah pada persoalan agama.

Disrupsi agama, yang mana agama yang sejatinya hadir untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan justru disalahgunakan untuk merendahkan sesama manusia. Tidak hanya melontarkan ucapan yang bertolak belakang dengan ajaran agama tetapi diwujudkan dalam bentuk kekerasan atas nama agama serta merendahkan bahkan meniadakan eksistensi sesama manusia. Inilah yang akan terjadi di banyak belahan dunia yang harus kita waspadai bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Munir Aritonang, Tokoh Muhammadiyah Tarutung. Wawancara, pada tanggal 16 Agustus 2021
- Alam, Sutan Tinggi barani Perkasa, (2007). *Burangir Barita*. Padangsidimpuan. Pemkab Tapanuli Selatan.
- Andersen, Masyarakat Sibolga, wawancara pada tanggal 7 September 2021.
- Antonius Simanjuntak, Bungaran, (2009). *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.
- Armawy, Armaidy, “Kearifan Lokal Batak Toba *Dalihan na Tolu dan Good Governance* dalam Birokrasi Publik”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2008.
- Balitbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pengembangan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Keagamaan*, 2019.
- Budianto, Adi, “*The Tradition of The Community of Maleku Village in the District of The East Luwu District*, *Jurnal La Geografia*, Vol. 17 (2018)
- Dauda, Kazeem Oluwaseun. (2020). *Islamophobia And Religious Intolerance: Threats To Global Peace And Harmonious Co-Existence*. 8 (2). 257-292. DOI : 10.21043/qijis.v8i2.6811

- Dawing, Darlis, “Megusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat”, *Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, Vol.. 13, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Geertz, Clifford, *Kebudayaan dan Agama*, Terjemahan Francisco Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Gogali, Nerlian, *Suara-suara di Balik Kesenyapan: Studi Eksploratif tentang Ingatan Perempuan dan Anak-anak dalam Konflik Poso Sulawesi Tengah*, Tesis pada Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2006.
- Gultom, Ibrahim. (2010), *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul & HM, Pahrudin. (2019). *The Role Of Local Wisdom As Religious Conflict Resolution In Jambi Indonesia*. 27 (2). 353-373. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4358>
- Harahap, Parsadaan Marga, (1993). *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*. Jakarta: Grafiti.
- Harisman Hutabarat, Tokoh Masyarakat Sibolga. Wawancara, pada tanggal 8 Agustus 2021
- Haryani, Elma, “Pendidikan Moderasi Beragama untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf pada Anak di Medan”, *Jurnal Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Hasanah, Hasyim, “Implikasi Psiko-Sosio-Religius Tradisi Nyadran Warga Kedung Ombo Zaman Orde Baru” *Tinjauan Filsafat Sejarah Pragmatis, Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 3, No.2, Oktober 2016.
- Hutagalung, W.M, (1991). *Pustaka Batak*, Medan: Tulus Jaya.
- Jamil, Muhsin, (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo.
- Jauhari, Tokoh Masyarakat Tarutung. Wawancara, pada tanggal 15 Agustus 2021

- Kawangung, Yudhi. (2019). *Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia*, 3 (1). 160-170. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>
- Kriyantoro, Rachmat& Halimatus Sa'diyah, "Kearifan Lokal dan Strategi Public Relation", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15, No. 2, Desember 2018.
- Kurniawan, Puji. (2014), *Mengakhiri Pertentangan Budaya & Agama*, Bandung: Pustaka Aura Semesta.
- Kusumastuti, Ratih, dkk. (2020). *The Role Of Religious Control Moderation In Relationship Of Locus Of Control To The Dysfunctional Audit Behavior: Evidence From Indonesian Auditors*. 29 (5). 11967-11976. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/25393>
- Latif, Yudi, "Revitalisas Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme", *Jurnal Kofrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi, dan Perubahan Sosial*, Vol. 5, No. 1, Januari 2016.
- Lindawaty, Debora Sanur, "Konflik Ambon: Kajian terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya", *Jurnal Politica*, Vol.2 No.2, Nopember 2011.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Malik, MTT. (2007). *Pura dan Masjid: Konflik dan Integrasi pada Suku Tengger*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Manshur, Fadlil Munawwar & Husni, Husni. (2020). *Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study*. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29 (6). 5849 – 5855. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/19864>
- Mappangara, Suriadi, *Respon Militer terhadap Konflik Sosial di Poso*, Palu: Yayasan Bina Warga Sulawesi Tengah, 2000.

- Maskuri, Abdullah. (2001). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Nasution, Pandapotan, (2005). *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: FORKALA.
- Pesurnay, Althien John, “*Local Wisdom in a New Paradigm: ApplyingvSystem Theory to The Study of Local Culture in Indonesia*”, IOP Conference Series: Eart and Environmental Science, Volume 175, International Conference on Industrial Technology for Sustainable Development (Icon-ITSD), 2017.
- Pipit Aidul Fitriyana dkk, (2020). *Dinamika Moderasi Beragama di Indonesia*, Litbang diklat press Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Prescilla, Hayner, *Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity*, New York and London: Routledge, 2001.
- Rahyono. E.X. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Rappaport, Roy A. (1999). *Truch and Order. Ritual and Religion in the Making of Humanity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ridwan, Nurma Ali, “Landasan Keilmuan Kearifan Lokal”, *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol. 5, No. 3 2007.
- Ritonga, Parlaungan, (2002). *Sistem Pertuturan Masyarakat Tapanuli Selatan*. Medan: Yandira Agung.
- Ropi, Ismatu. (2019). Whither Religious Moderation? The State and Management of Religious Affairs in Contemporary Indonesia. 26 (3). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/14055/7203>
- Salim, Agusdkk, (2009). *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Adat Sipirok Tapanuli Selatan*, Padangsidimpuan: Pemda Tapanuli Selatan.

- Simon Fisher, (t.th). *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The Britis.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Suprpto. (2013). *Semberak Dupa diPulau Seribu Masjid; Kontestasi, Integrasi, dan Resolusi Konflik Hindu Muslim*. Jakarta: Kencana.
- Tigor Sianturi, Tokoh Masyarakat Tarutung. Wawancara, pada tanggal 16 Agustus 2021.
- Vergounwen, JC, (2004). *Masyarakat dan Hukum Batak Toba*. Jakarta: LKiS.
- Wagiran, “Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, No. 3, 2012.
- Wasisto Raharjo Jati. (2014). Agama dan Politik: Teologi Pembebasan sebagai Arena Profetisasi Agama, *22* (1). 133-156. DOI : 10.21580/ws.22.1.262
- Wilson Simanjuntak, Tokoh Masyarakat Tarutung, Wawancara, pada tanggal 15 Agustus 2021.

(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)



BIOGRAFI PENULIS

A. Penulis 1

Nama	: Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
T.T. Lahir	: Padangsidimpuan, 13 Maret 1972
Alamat Rumah	: Jalan Jamalayu Lubis, Gg. Hidayah Lingkungan IV, Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara
Alamat Kantor	: IAIN Padangsidimpuan Jalan T. Rizal Nurdin KM 4.5 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Telepon	: 0812 23 15 1945
E-mail	: sumper_mulia@yahoo.com

1. Keluarga

Ayah	: H. Abdul Rahman Harahap
Ibu	: Hj. Sity Aisyah Siregar
Mertua (Ayah)	: H. Amru Sitompul
Mertua (Ibu)	: Hj. Husny Nainggolan
Istri	: Dr. Juni Wati Sri Rizki Sitompul, S.Sos., MA
Anak	: Syareihan Mulia Harahap (Sulung) Al-Athir Mulia Harahap (Tengah) Mumtaza Mulia Harahap (Bungsu)

2. Riwayat Pendidikan

- Sekolah Dasar Negeri 4, Padangsidempuan, 1979-1985
- Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, 1985-1991
- S-1 Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, 1992-1996
- S-2 IAIN Sulthan Syarif Qasim (SUSQA), Riau, 1999-2001
- S-3 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2002-2009

3. Riwayat Pekerjaan

- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Padangsidempuan, 2017-2021
- Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan, 2017-2022
- Sekretaris Jenderal Forum Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama se-Indonesia, 2020-2022
- Sekretaris Jenderal Forum Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama se-Indonesia, 2018-2020
- Sekretaris Senat Institut, IAIN Padangsidempuan, 2017-2021
- Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2013-2017
- Sekretaris Senat Institut, IAIN Padangsidempuan, 2013-2017
- Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan, 2004- Sampai Sekarang
- Ketua MUI Tapanuli Selatan 2016-2021 (Salah satu Unsur Ketua)
- Tim Seleksi KPU Kota Padangsidempuan, 2013
- Ketua Jurusan Syariah, STAIN Padangsidempuan, 2010- 2013
- Sekretaris Senat, STAIN Padangsidempuan, 2010-2013
- Katib Syuriah Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan, 2012-2017
- Anggota Badan Wakaf Pondok Pesantren Al-Abrar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 1996- sampai Sekarang
- Sekretaris MUI Tapanuli Selatan 2011-2016
- Ketua Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan, 2011- 2012

- Staf Pusat Pengembangan Bahasa STAIN Padangsidimpuan, 2004
- Staf Jurusan Tarbiyah STAIN Padangsidimpuan, 2004-2005
- Tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darut Taqwa, Cibinong, Bogor, 1991-1992
- Tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Abrar, Tapanuli Selatan, 1997-1998
- Tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Tapanuli Selatan, 1997-1998
- Tenaga pengajar di Pondok Pesantren Syekh Ahmad Basyir, 1998-1999
- Tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darul Azhar, Panyabungan, 1998-1999
- Tenaga Musiman (Temus) Haji Tahun, Arab Saudi, 1997
- Sekretaris MUI TAPSEL 2001-2002
- Penerjemah Di Lembaga Gazirah Abdi Ummah, Jakarta, 2002
- Staf Pengajar Bahasa Arab Di Lembaga Bahasa Arabic Super Learning, Jakarta, 2002
- Guide Umrah & Hajj Exhibition PT. Lamtri Utama Tours & Travel, Jakarta, 2002-2003
- Staf pengajar Program Bahasa Arab Di Lembaga Pendidikan Profesi Insan Institute, Jakarta, 2002-2003
- Div. Umrah & Haji PT. Adzikra Andiarta Wisata, Jakarta, 2005
- Konsultan Najma Center, Jakarta, 2005-2007
- Konsultan Di Lafadz Center, Jakarta, 2007

1. Daftar Jejak Akademik

a. Seminar, Workshop dan Lokakarya

- November 2019. Presenter Guest Lecture Tolerance And Religious Moderation di Fatoni University Thailand, Sebagai presenter
- November 2019. International Seminar Islam Multiculturalism and Radicalism di International Islamic University College Selangor (KUIS). Sebagai peserta
- Desember 2019. Pelatihan Pendidikan Interstruktur Nasional Moderasi Islam Beragama (PIN-MB) di KEMENAG RI. Sebagai peserta
- November 2016. Seminar Wawasan Kebangsaan: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Islam Keagamaan di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- Juni 2016. Workshop Konsorsium Keilmuan Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Padangsidempuan. Sebagai Narasumber
- Juni 2016. Seminar “Meraih Kesuksesan Melalui Program Mahad Jamiah” Narasumber Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA di Padangsidempuan. Sebagai Moderator
- Mei 2016. The 3rd Meeting of Asian Islamic Universities Association (AIUA) di Fatoni University, Pattani, Thailand. Sebagai Peserta
- Mei 2016. Seminar Nasional Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Sebagai Peserta
- Mei 2016. Workshop Penyusunan Statuta di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- 2016. Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Pemerintahan Kota Padangsidempuan) di Padangsidempuan. Sebagai Narasumber
- 2016. Studium General Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Narasumber: Dr. Wildana Wargadinata, Malang) di Padangsidempuan. Sebagai Moderator

- 2016. Studium General: Arah dan Kebijakan PTKIN (Narasumber: Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA) di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- Januari 2016. Seminar Ilmiah Ma'had Jamiah (Narasumber Walid al-Sayid Muhammad al-Sayyid) di Padangsidempuan. Sebagai Moderator
- 2015. Workshop Penyusunan Kurikulum KKNi di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- 2015. Seminar Internasional Dakwah and Multicultural di Padangsidempuan. Sebagai Moderator
- November 2015. Seminar Nasional Arah dan Kebijakan Pengelolaan PTKIN (Narasumber: Prof. Dr. Ishom Yusqi, MA. Sekretaris Dirjend Pendis Kemenag) di Padangsidempuan. Sebagai Moderator
- November 2015. Seminar Ma'had Jami'ah: Sarana Peningkatan Kualitas Diri Menuju World Class University (WCU) Narasumber: Prof. KH. Imam Suprayogo di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- September 2015. Studium General (Narasumber Drs. H. Marwan Dasopang. Anggota Komisi IX DPR RI) di Padangsidempuan. Sebagai Moderator
- September 2015. Annual International Conference on Islamic Studies di Manado. Sebagai Peserta
- 2015. Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Pemerintahan Kota Padangsidempuan) di Padangsidempuan. Sebagai Narasumber
- Desember 2014. Workshop Konsorsium Dosen di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- Desember 2014. Seminar Perkembangan Aliran Sesat di Sumatera Utara di Medan. Sebagai Peserta
- Desember 2014. Seminar Sehari Metodologi dan Implementasi Fatwa MUI Sumatera Utara di Medan. Sebagai Narasumber
- Desember 2014. The 3rd International Islamic Conference on Media di Jakarta. Sebagai Peserta

- November 2014. Annual International Conference on Islamic Studies di Balikpapan. Sebagai Peserta
- Oktober 2014. Seminar Nasional: Syariah, Kemanusiaan dan Semangat Anti Korupsi di Jakarta. Sebagai Peserta
- 2014. Orientasi Penyusunan Renstra IAIN Padangsidempuan di Padangsidempuan. Sebagai 2014
- Mei 2014. Seminar dan Lokakarya Penyusunan Kurikulum FEBI di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- 2014. Workshop Kurikulum Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- 2014. Workshop Kurikulum Prodi Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- 2014. Workshop Konsorsium Dosen di Padangsidempuan. Sebagai Peserta
- Januari 2012. Sosialisasi BKD dan Rekrutmen Asesor Internal di Purwokerto. Level Nasional, sebagai peserta
- 2012. Sosialisasi BKD dan Rekrutmen Asesor Internal di Padangsidempuan. Level Nasional, sebagai peserta
- Mei 2012. Seminar dan Workshop Nasional: Arsitektur Ilmu Ekonomi Islam 2 di Medan. Level Nasional, sebagai peserta
- September 2012. International Conference: Islam and Social Change di Purwokerto. Level International, sebagai peserta
- September 2013. Pengembangan Perguruan Tinggi Yang Unggul di Kerinci. Level Nasional, sebagai peserta
- 2010. Annual Conference on Islamic Studies di Banjarmasin. Level Internasional, sebagai peserta
- 2012. Annual International Conference on Islamic Studies di Surabaya. Level Internasional, sebagai peserta
- 2013. Annual International Conference on Islamic Studies di Mataram. Level Internasional, sebagai peserta
- 2014. Annual International Conference on Islamic Studies di Balikpapan. Level Internasional, sebagai pemakalah

- Oktober 2010. The State of Our Democracy: Upaya Kontekstualisasi Demokrasi, Makalah Disajikan dalam Seminar Internasional Serumpun Indonesia-Malaysia tentang Islam dan Negara. Tema: Hubungan dan Negara dalam Diskursus Pemikiran Sosial Politik dan Ketatanegaraan Indonesia-Malaysia di IAIN Imam Bonjol Padang. Level Internasional, sebagai pemakalah
- November 2010. International Seminar on Islam, Development of Law, and Global Economy di Jambi. Level Internasional, sebagai peserta
- Oktober 2009. International Seminar on Contemporary Islam. Islam in The West and The East: Boosting Democracy, Human Right, Freedom and Peaceful Coexistence di Syahida Inn Jakarta. Level Internasional, sebagai peserta
- Agustus 2009. Juri pada Kegiatan Grand Final Lomba “Pengembangan Kreasi Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Nasional Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Depag di Jakarta. Level Nasional, sebagai Peserta
- 2009. International Conference. Debating Progressive Islam: A Global Perspective. Syahida Inn di Jakarta. Level Internasional, sebagai peserta
- 2008. Orientasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada SMP Tingkat Nasional Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Depag RI di Jakarta. Level Nasional, sebagai peserta
- 2008. Seminar Posisi Guru Pendidikan Agama Di Era Otonomi Daerah di Forma Pasca UIN. Level Nasional, sebagai peserta
- 2008. Konsultasi Pengembangan Akhlaq Mulia Pendidikan Agama Islam Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Depag RI di Jakarta. Level Nasional, sebagai peserta
- 2008. Penyusunan Naskah Pengembangan PAI Berwawasan Multikultural Pada SD, SMP, SMA dan SMK, Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Depag RI di Jakarta. Level Nasional, sebagai peserta

- 2008. Pendamping Juri pada Kegiatan Grand Final Lomba “Pengembangan Kreasi Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SD, SMP, SMA dan SMK tingkat Nasional Tahun yang diselenggarakan oleh, Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Depag RI di Jakarta. Level Nasional, sebagai peserta
 - 2008. Workshop Penulisan Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada SMA Tingkat Nasional, Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Depag RI di Jakarta. Level Nasional, sebagai peserta
 - 2006. Peserta Seminar Menggagas Paradigma Islam Rahmatan lil `Alamin, Rahmat Semesta, Forum Komunikasi dan Alumni Pps UIN Syahid di Auditorium UIN Syahid. Level Nasional, sebagai peserta
 - 2006. Peserta Seminar Perempuan dan Media Massa. Objek atau Subjek, Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media di Jakarta. Level Nasional, sebagai peserta
- b. Karya Tulis Ilmiah, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat
- 2014. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Muara Opu Dengan Pendekatan Ekonomi Syari’ah Di Desa Muara Opu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan. Level Nasional, sebagai Peneliti
 - 2014. Muhammad Rasyîd Ridhâ Antara Modernisme Dan Tradisionalisme Jurnal Fitrah. Level Nasional (Tidak Terakreditasi), sebagai penulis
 - 2014. Konsep Syûrâ Muhammad Rasyîd Ridhâ Jurnal el-Qanuniny. Level Nasional (Tidak Terakreditasi), sebagai penulis
 - 2014. Epistemologi Kekuasaan Dalam Sistem Politik Islam Jurnal Fitrah. Level Nasional (Tidak Terakreditasi), sebagai penulis
 - 2014. Pemikiran Politik Islam Kontemporer (Studi Kritis terhadap Konsep Khilafah Taqiyudin An-Nabhâni) di Balikpapan, Samarinda. Level Internasional, sebagai poster presentation
 - 2014. Persepsi Masyarakat terhadap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Penelitian Kolektif LPPM IAIN PSP, sebagai peneliti

B. Penulis 2

Nama : Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
Tempat/ tanggal lahir : Padangsidimpuan, 28 Nopember 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Dosen
Unit Kerja : IAIN Padangsidimpuan
Alamat Kantor : Jl HT Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang
Padangsidimpuan
Alamat Rumah : Jl. Jati Lk. II Pijor Koling
Padangsidimpuan Tenggara
No HP : 085275251726
Scopus ID : 57216348220
ID Reviewer Litapdimas : 20201818140305
ID Peneliti : 202811730207884
NIRA : 2109210360065023957

1. Keluarga

Nama Ayah : Drs.H. Mahabat Siregar
Pekerjaan : Pensiunan Dosen IAIN Padangsidimpuan
Nama Ibu : Dra. Hj. Kartini Nasution
Pekerjaan : Pensiunan Tenaga Kependidikan
IAIN Padangsidimpuan
Alamat Ayah/ Ibu : Jl. Mawar Gg. Aman No. 6 Padangsidimpuan
Nama Isteri : Yusroyani Mardia, S.Ter. Keb.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Unit Kerja : Puskesmas Padangmatinggi Padangsidimpuan
Nama Anak : Hamim Faiz Mahbub (Tunggal)
Pekerjaan : Siswa SMA Muhammadiyah I Yogyakarta

2. Riwayat Pendidikan

- Sekolah Dasar Negeri No. 142437 Padangsidempuan Lulus tahun 1986.
- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Padangsidempuan Lulus tahun 1989.
- Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Koto Baru Padang Panjang, Lulus Tahun 1992
- S-1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 1998.
- S-2 Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus tahun 2001.
- S-3 Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, tahun 2011- 2016

3. Riwayat Pekerjaan

a. Fungsional Dosen

- Asisten Ahli Mata Kuliah Fiqh Mawaris, Tahun 2003
- Lektor Mata Kuliah Fiqh Mawaris, Tahun 2005
- Lektor Kepala Mata Kuliah Fiqh Mawaris, Tahun 2013

b. Struktural

- Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Padangsidempuan, 2005-2006.
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Padangsidempuan, 2006-2014.
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, 2014-2018.
- Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2018- sekarang

c. Karya Ilmiah

- Studi terhadap Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad Abduh, (Skripsi S-1 pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Pendekatan Sosiologis versus Normatif dalam Memahami Hukum Islam (Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

- Peranan Hukum Islam dalam Pergeseran Kewarisan Adat Batak di Tapanuli Selatan, (Disertasi pada Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang)
- “Hukum Keluarga Islam di Aljazair” dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan Undang-undang Modern dari Kitab-kitab Fikih (Buku diterbitkan oleh Ciputat Pers, 2003)
- Konsep Peradilan dalam Naskah Hujjah Balighah dalam Naskah Klasik Keagamaan, Edisi Melayu (Buku, diterbitkan oleh Puslitbang Lektur Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Tahun 2009)
- Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Alquran dan Sunnah
- Metode Ijtihad Kontemporer: Studi Atas Fatwa Abdul Aziz Bin Baz
- Islam Nusantara, ulemas, and social media: understanding the pros and cons of Islam Nusantara among ulemas of West Sumatera (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol 9, No 2 (2019_

C. Penulis 3

Nama : Dr. Darwis Harahap, S. HI., M. Si.
Instansi Tempat Tugas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhanbatu Selatan/18 Agustus 1978
Agama/Jenis Kelamin : Islam/laki-laki
Pangkat/Gol/ TMT : Pembina /Lektor Kepala/05 Januari 2009
Jabatan Struktural : Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Km.4,5 Sihitang
Padangsidimpuan - Sumatera Utara
Alamat Rumah : Jl. Jamalayu Lubis No. 8 Link. IV Sihitang
Padangsidimpuan - Sumatera Utara
Scopus ID : 57219150085
ID Reviewer Litapdimas : 201808780202021
ID Peneliti : 201808780202870
NIRA : 211121036133011524409

1. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri No. 112225 Hadundung Labuhan batu Selatan, tamat tahun 1991
- Madrasah Tsanawiyah Simatahari Labuhan batu Selatan, tamat tahun 1994
- Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Hakim Tembung, Medan, tamat Tahun 1998
- S-1 Fak. Syariah-IAIN Medan Jurusan Muamalat, tamat tahun 2003
- S-2 Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, tamat tahun 2007
- S-3 Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tamat tahun 2016

2. Pengalaman Organisasi

- Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Padangsidempuan Periode 2019-2022
- Bendahara Umum Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAIN Padangsidempuan periode 2019-2023
- Pengurus Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) TAHUN 2012-2017
- Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Kota Padangsidempuan Masa Khidmat 2012 – 2017
- Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Dan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (PP IPMA-LABSEL) Periode 2008-2012
- Ikatan mahasiswa Pascasarjana Sumatera Utara di Jakarta tahun 2004 – 2006
- Wakil Ketua Koalisi Mahasiswa, Pemuda, Pelajar, Alumni Kota Pinang Sekitarnya Medan (KOMPAK'S) 2002 – 2004
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Labuhan Batu (HIMLAB) tahun 2001- 2002
- Ketua Forum Kajian Ilmu-Ilmu Syariah (FKIS AIQAN) Mahasiswa IAIN SU Medan tahun 2000 - 2001
- Sekretaris Umum Remaja Masjid Al-Hidayah Medan tahun 2000 - 2001

3. Karya Ilmiah

- The Effect Of Online Transportation System On Unemployment Rate and Public Welfare At Indonesia, At-tijarah Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 2021
- Problematika Perilaku Konsumen Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam Islam, HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- Policy Reform and It's Impact on Economic growth, Evidence in Develeoping – 8 Countries, Prof. Dr. M. Nur Rianto Al Arif, Dr. Darwis Harahap, M.Si. and Arisman, Penerbit Qiara Media, Jatim, 2020

- Gold Pawning in Syariah Banking: An Economic Analysis, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 6, Ver. 5 (June. 2017) PP 40-48 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. Terindeks DOI Diakses pada: [http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/pages/22\(6\)Version-5.html](http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/pages/22(6)Version-5.html)
- Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia: Model Vector Autoregressive, Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus (*Terakreditasi*) Vol. 10 No. (1) 2017 E-ISSN: 2502 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/issue/view/258>
- Analisis Determinan Struktur Modal Perusahaan Anggota Daftar Efek Syariah (DES): Studi Empiris Menggunakan Harga Saham Syariah dan Variabel Fundamental, Tim Penelitian Kompetitif LPPM IAIN Padangsidempuan, 2015
- Analisis Stabilitas Dinar Emas dan Dolar AS dalam Denominasi Rupiah Jurnal *Iqtishad Terakreditasi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014
- IAIN Padangsidempuan: Harapan Menuju Perubahan, Harian Analisa, tahun 2014
- Analisa Kritis terhadap Fatwa DSN No 77 tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Perspektif *Masalah* Ekonomi Dalam Menumbuhkan Sektor Riel) Penelitian Kompetitif LPPM STAIN Padangsidempuan, 2013
- Stabilitas Moneter Menurut Ekonomi Islam (Sebuah Solusi Alternatif) Jurnal El-Qonuniy STAIN Padangsidempuan, tahun 2012
- Salah satu Penulis Buku: Antologi Ekonomi Syariah tahun 2007

4. Pengalaman Kerja

- Financial Advisor pada Asuransi Bumiputera tahun 2007
- Wartawan koran *Syi'ar Umat* di Medan Tahun 2003.

